



**PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BANGUNAN
KUNO/BERSEJARAH DI KOTA SEMARANG
SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh
Ana Prasetyowati, SH
B4A 006 294

PEMBIMBING
Dr. Budi Santoso, SH, MS.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BANGUNAN
KUNO/BERSEJARAH DI KOTA SEMARANG
SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Ana Prasetyowati, SH
B4A 006 294

Pembimbing

Dr. Budi Santoso, SH, MS.
NIP. 131 631 876

**PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BANGUNAN
KUNO/BERSEJARAH DI KOTA SEMARANG
SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA**

Disusun Oleh :

ANA PRASETYOWATI, SH

B4A 006 294

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 6 Oktober 2008

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Magister Ilmu Hukum

Mengetahui

Ketua Program

Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 131 631 876

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H.

NIP. 130 531 702

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Ana Prasetyowati, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelas kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 6 Oktober 2008

Penulis

Ana Prasetyowati, SH
NIM. B4A 006 294

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkan daku." (Fil 4:13)

"Masa Depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi mereka"

~ Eleanor Roosevelt ~

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapamu yang di sorga akan memberikan yang baik, kepada mereka yang meminta kepada-Nya." (Mat 7:7;11)

"Kata-kata yang baik bisa singkat dan mudah diucapkan, tetapi gemanya sungguh tiada batas"

~ Ibu Teresa ~

"Take time to get started. Take time to grow. Take time to be healthy. Take time to play. Take time to be quite. Take time for those you love"

~ Zig Ziglar ~

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

❖ Tuhan Yesus Kristus,

Untuk semua berkat-Nya yang melimpah

❖ Ibunda Tati dan Ayahanda Marcus,

Untuk cinta, perjuangan, dan doa yang senantiasa menyertaku

❖ Kedua kakakku : Mas Sigit dan Mas Hari,

Untuk setiap dukungan dan perhatiannya

❖ My wonderful future

The reason why I'm here

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME atas karunia dan berkat serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BANGUNAN KUNO/BERSEJARAH DI KOTA SEMARANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA** ini guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar pascasarjana di bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perlindungan karya cipta bangunan kuno/bersejarah di Indonesia.

Hal yang tidak dapat dilupakan adalah mereka yang telah begitu banyak membimbing, mendoakan dan membantu sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik. Ucapan syukur dan terima kasih yang tak terhingga perlu penulis sampaikan kepada mereka yang begitu banyak menolong, yaitu :

1. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.
2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH., selaku ketua program Magister Ilmu hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

3. Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH, atas saran dan nasihat yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH. MS., selaku dosen pembimbing tesis yang telah dengan sabar memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan serta meluangkan waktu dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Budiharto, SH. MS., atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Irwansyah, Kasie Penataan Bangunan dan Pengawasan beserta staff BAPPEDA Kota Semarang atas informasi dan bantuan bahan-bahan dalam penulisan tesis ini.
7. Ibu Nik Setiyani, Kasudin Energi dan Pertambangan Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang atas informasi dan bantuan bahan-bahan dalam penulisan tesis ini.
8. Ibu Endang Riwayati, Kasie Muskala (Museum dan Purbakala) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang atas informasi dan bantuan bahan-bahan dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Hamidin, Head Legal Pura Group yang telah memberikan izin kepadaku guna pengurusan dan penyelesaian tesis program s2 ini.
10. Kedua orang tuaku, Marcus Djumino dan Anastasia Suprpti untuk setiap doa dan semangat yang tidak pernah berhenti serta kasih sayangnya selama ini.
11. Kedua kakakku, Antonius Sigit Prabowo dan Petrus Hari Prasetyo, terima kasih atas doa yang diberikan dan harapan-harapannya.

12. Buat sahabat-sahabatku masku ariy, mas ucap, mas benny, kickie, mas david, vira, mba eni, yoan, mia, mba hesti. Terima kasih atas semua perhatiannya selama ini.
13. Buat mas edi, mas andre, mas andi, mas fian, bang daniel, dan mba yani terima kasih atas motivasi dan bantuannya serta perhatian yang diberikan.
14. Semua teman di s2 beasiswa unggulan diknas angkatan 2006 kelas HKI, mita, mba kanti, nuzulia, adit, banjar, hendi, mas wenang, onal, rifki, dan Hukum Laut, ucil, mba luk, mba nur, dimas, atas kekompakan kalian dan persahabatan selama di s2. Semoga sukses dalam kehidupan dan pekerjaan.
15. Adek-adek kostku di Singosari VI no 4, gita, audrey, prima, uyunx, fina, agi atas kebersamaan dan canda tawanya.
16. Teman kost baruku di Kudus, mba ayu, della, mba ike, lina, dini, mba tanti, terima kasih atas pertemanan dan persahabatan yang diberikan.
17. Semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tentunya banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Dengan kemampuan yang sangat terbatas, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang,

Penulis

ABSTRAK

Beragam ciptaan bangunan dengan arsitektur kuno bernafaskan Belanda banyak dijumpai di Kota Semarang namun belakangan ini bangunan kuno/bersejarah yang berupa gedung maupun rumah tinggal tersebut perlahan tapi pasti mulai dibongkar sesuai dengan selera pemiliknya untuk dialihfungsikan dengan pembangunan fasilitas baru atau berbagai alasan tertentu sehingga dapat menghilangkan aspek orisinalitas suatu obyek ciptaan. Bangunan kuno bersejarah merupakan karya cipta bangunan di bidang arsitektur sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki nilai seni dan historikal yang sangat tinggi sehingga perlu dilindungi kelestariannya.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, maka penulis berusaha menjelaskan mengenai kondisi pengaturan terhadap perlindungan bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang, apakah pengalihfungsian bangunan kuno bersejarah merupakan suatu tindakan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam UUHC 2002 dan bagaimanakah peran Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian bangunan kuno bersejarah sebagai warisan budaya.

Hasil penelitian terakhir yang diperoleh bahwa pada Tahun 2006 Kota Semarang memiliki sebanyak 290 buah bangunan kuno/bersejarah. Adapun perlindungan terhadap bangunan kuno/bersejarah tersebut telah lebih dahulu diatur oleh Surat Keputusan Walikota Semarang No.646/50/Tahun 1992, sebelum UU Benda Cagar Budaya diterbitkan. Selama ini masyarakat mengetahui bahwa ciptaan bangunan kuno/bersejarah hanya dilindungi oleh UU Benda Cagar Budaya padahal karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya dalam bidang seni arsitektur pada bangunan kuno/bersejarah juga dilindungi oleh UUHC 2002.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa minimnya pengetahuan akan prinsip-prinsip dan bentuk perlindungan bangunan kuno/ bersejarah menyebabkan kondisi pengaturan hukum terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelestarian bangunan kuno tidak berjalan efektif. Pada dasarnya suatu konsep alih fungsi terhadap karya ciptaan bangunan kuno bersejarah tidak melanggar UUHC 2002 maupun UU Benda Cagar Budaya sepanjang dilakukan menurut kaidah-kaidah konservasi atau pelestarian. Adapun usaha pemerintah yang telah dilakukan belum berjalan maksimal dikarenakan faktor sumber daya manusia yang kurang memahami prinsip perlindungan bangunan kuno/bersejarah serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penanganan bangunan kuno. Rekomendasi yang diberikan adalah penanganan permasalahan bangunan kuno per kasuistik, penyediaan dana pemeliharaan bangunan kuno atau pemberian kompensasi berupa keringanan pajak bagi pemilik bangunan, pembentukan lembaga pengawas atau pemerhati bangunan kuno maupun lembaga inventarisir bangunan kuno, sosialisasi perangkat peraturan, dan melengkapi UUHC 2002 dengan PP mengenai pertimbangan pelaksanaan teknis sebagai aplikasi 15 huruf f maupun Pasal 10 ayat (1) beserta ketentuan pidananya.

Kata Kunci : bangunan kuno, warisan budaya, perlindungan hak cipta

ABSTRACT

Various structural creations with classic Dutch architecture can be found many in Semarang City, however, in recent days, those classic/historical structures whether in form of buildings or dwelling houses, slowly but surely, begin to be modified according to their owners tastes to be converted by building new facilities or various particular reasons, thus, it may diminish the originality aspects of objects of creation. The historical classic structures are structural creations in the field of architecture as a national cultural heritage having very high art and historical values, therefore, their conservation should be protected.

By utilizing a juridical-empirical approach method and a descriptive-analytical research specification, the writer makes an effort to describe the condition of the regulation of historical classic structures protection in Semarang City, can the conversion of historical classic structures be included in violating actions as determined in the 2002 Copyrights Act, and what are the roles of Semarang City Government in giving protection to the conservation of historical classic structures as a cultural heritage ?

From the obtained last research results, they state that in 2006, Semarang City has as many 290 classic/historical structures. Meanwhile, the conservation of those classic/historical structures had been previously regulated in the Decree of Mayor of Semarang No. 646/50/1992, before the Act of Cultural Object Preservation was issued. So far, the society acknowledges that the classic/historical structure creations are only protected by the Cultural Object Preservation Act, whereas, the work of pre-historical relics, history, and other national cultural objects in the field of architectural arts on classic/historical structures are also protected by the 2002 Copyrights Act.

The obtained conclusion states that the lack of knowledge of the principles and forms of classic/historical structure conservation cause the legal regulation of the execution of classic structures protection and conservation cannot run effectively. Basically, a concept of the conversion of the work of art of historical classic structures does not violate the 2002 Copyrights Act and Cultural Object Preservation Act as long as it is conducted within the conservational principles. Meanwhile, the government's efforts that have been executed have not run maximally due to the factors of human resources that are unable to comprehend the principles of classic/historical structure conservation and also the lack of socialization to the society concerning classic structures. The given recommendations are the handling of classic structure problems per case, provisioning of maintenance budget for classic structures or provisioning of compensations in form of tax dispensation for building owners, establishing a supervisory institution or classic structure observer and also classic structure inventory institution, socializing the regulating instruments, and completing the 2002 Copyrights Act with a Government Ordinance concerning the consideration of technical execution as the application 15 letter f and also Article 10 verse (1) together with their penal terms.

Keywords : classic structures, cultural heritage, copyrights protection

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR ISTILAH | xvi |
| DAFTAR BAGAN | xx |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| DAFTAR TABEL..... | xxiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 10 |
| C. Kerangka Pemikiran | 10 |

| | | |
|--------|---|----|
| | D. Tujuan Penelitian | 28 |
| | E. Kontribusi Penelitian | 28 |
| | F. Metode Penelitian | 29 |
| | G. Sistematika Penulisan | 35 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA..... | 37 |
| | A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta | 37 |
| | A.1.Filosofi Perlindungan Hukum Hak Cipta | 37 |
| | A.2.Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta | 40 |
| | A.3.Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik | 44 |
| | B. Perlindungan Hak Cipta Menurut UUHC 2002 | 46 |
| | B.1.Pengertian Hak Cipta | 46 |
| | B.2.Hak Moral dan Hak Ekonomi | 50 |
| | B.3.Fungsi dan Sifat Hak Cipta | 56 |
| | B.4.Ruang Lingkup Hak Cipta | 58 |
| | B.4.a.Ciptaan Yang Dilindungi..... | 60 |
| | B.4.b.Ciptaan Yang Tidak Dilindungi..... | 61 |
| | B.4.c.Pembatasan Hak Cipta..... | 62 |

| | |
|---|----|
| B.4.d.Kepemilikan Hak Cipta Oleh Negara..... | 64 |
| B.5.Pendaftaran Hak Cipta..... | 69 |
| B.6.Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta..... | 70 |
| B.7.Pelanggaran Hak Cipta..... | 71 |
| C. Tinjauan Tentang Karya Ciptaan Bangunan Kuno/Bersejarah..... | 75 |
| C.1.Ciptaan Bangunan Merupakan Karya Seni Arsitektur..... | 75 |
| C.1.a.Seni Untuk Arsitektur | 76 |
| C.1.b.Arsitektur Bukan Sekedar Bangunan | 81 |
| C.1.c.Arsitektur Sebuah Bagan Kebudayaan | 83 |
| C.2. Bangunan Kuno/Bersejarah Sebagai Warisan Budaya Bangsa..... | 85 |
| D. Keterkaitan UU Hak Cipta dengan UU Benda Cagar Budaya Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Bangunan Kuno/Bersejarah..... | 90 |
| D.1. Rambu-rambu Perlindungan Bangunan Kuno/Bersejarah Menurut UU Hak Cipta | 91 |

| | | |
|---------|---|-----|
| | D.2. Rambu-rambu Perlindungan Bangunan Kuno/Bersejarah Menurut UU Benda Cagar Budaya | 93 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 99 |
| | A. HASIL PENELITIAN..... | 99 |
| | A.1.Ketentuan Substantif Mengenai Perlindungan Terhadap Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang | 99 |
| | A.1.1. Profil Kota Semarang | 99 |
| | A.1.2. Inventarisasi Peraturan Hukum Mengenai Perlindungan Bangunan Kuno/Bersejarah..... | 106 |
| | A.2.Pengalihfungsian Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang..... | 110 |
| | A.2.1. Dokumentasi Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang..... | 110 |
| | A.2.2. Profil Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang | 112 |
| | a.Stasiun Tawang..... | 112 |
| | b.Gereja Blenduk | 116 |
| | c.Lawang Sewu..... | 119 |
| | d.Gedung Jiwasraya..... | 123 |

| | |
|---|-----|
| e. Marba (De Ziek) | 125 |
| f. Ex Pengadilan Negeri | 127 |
| g. Pasar Johar | 129 |
| h. Kantor Perusahaan Sirop Fresh..... | 134 |
| i. Restoran Oen | 135 |
| j. Wisma Driyarkara..... | 138 |
| k. SMA Sedes Sapientiae | 139 |
| l. Gereja Katolik Admodirone | 144 |
| m. Rumah Sakit Elizabeth | 145 |
| n. Rumah Tinggal Bp. Gunawan | 147 |
| o. Rumah Tinggal Bp. Condro..... | 150 |
| p. Rumah Tinggal Keluarga Kwan | 152 |
| q. Rumah Tinggal drs. Heru Sutyanto | 154 |
| r. Rumah Tinggal Keluarga Flatterman | 156 |
| A.3. Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Melindungi Bangunan Kuno/Bersejarah..... | 159 |
| A.3.1. Upaya Pemkot Semarang Dalam Melindungi Bangunan Kuno/Bersejarah..... | 159 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| | A.3.2.Hambatan Yang Dihadapi Pemkot Semarang Dalam Melindungi Bangunan Kuno/Bersejarah.. | 161 |
| B. | PEMBAHASAN | 162 |
| B.1. | Kondisi Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang | 163 |
| B.2. | Pengalihfungsian Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang Berdasarkan UUHC 2002 Maupun Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya | 182 |
| B.2.1. | Pengalihfungsian Bangunan Kuno/ Bersejarah Menurut Ketentuan UUHC 2002..... | 182 |
| B.2.2. | Pengalihfungsian Bangunan Kuno/Bersejarah Menurut UU Benda Cagar Budaya 1992 | 187 |
| B.3. | Peranan Pemerintah Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah Sebagai Warisan Budaya Bangsa | 200 |
| BAB IV | PENUTUP | 205 |
| A. | Kesimpulan | 205 |
| B. | Saran..... | 207 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 209 |

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

| | |
|---------------------|---|
| Art Deco | : Gaya Dekoratif campuran yang biasanya ditandai dengan bentuk – bentuk geometris, warna yang mencolok, garis dan ornamen – ornamen |
| Arsitektur Neogotik | : Suatu sistem yang mati untuk itu perlu diberikan kembali kehidupan, perbaikan dan perubahan konstruksinya dalam bentuk alami agar kekuatannya dapat bangkit kembali |
| Atap Limasan | : Konstruksi atap bangunan yang terbentuk dari 2 sisi bagian yang memanjang dengan 2 pengakhiran bidang segitiga sisi depan dan belakang memiliki sudut kemiringan jika dilihat dari atas 45° |
| Atap Pelana | : Konstruksi atap bangunan yang terbentuk dari 2 sisi bagian yang memanjang dengan sudut kemiringan 30° |
| Bata Rollag | : Susunan batu bata baik tersusun vertikal maupun horisontal tergantung pada bidang yang ada disebelahnya hanya sebagai nilai estetis |
| Bergaya Dorik | : Pemakaian elemen – elemen Classicism pada bangunan yang |

digabungkan dengan pola – pola modern yang memiliki nilai historism

| | |
|------------------|---|
| Bouvenlight | : Lubang Cahaya/ Sirkulasi Udara |
| Cornice | : Bagian dari plafond yang berfungsi sebagai list Gypsum untuk keindahan juga pengakhiran plafond suatu ruangan |
| Cupola | : Pengakhiran bagian atas atap bangunan bisa berupa kubah, kerucut, tajuk maupun limasan |
| Dome | : Kubah |
| Entrance | : Pintu masuk |
| Eternit | : Plafon yang materialnya menggunakan asbes |
| Fasade | : Tampilan depan bangunan/ tampak dari suatu bangunan |
| Gable | : Bagian ujung atap (nok) |
| Konstruksi Jamur | : Konstruksi bangunan jamur (payung) beton bertulang dengan cukup cahaya dan sirkulasi udara, tidak mudah terbakar dan atap plat beton tanpa plafon menghindari kemungkinan adanya sarang – sarang tikus/ serangga lainnya, konstruksi mudah perawatannya |
| Kolom | : Sebuah unsur linier vertikal yang membentuk sebuah titik pada bidang |

| | |
|------------------|---|
| | tanah yang berfungsi memperkuat sudut suatu ruangan |
| Konsol | : Penyangga tritisan/ penahan kemiringan atap bisa dari kayu, cor beton maupun besi |
| Landmark | : Tetenger/ Pusat perhatian yang menonjol pada suatu kota yang menjadi kebanggaan tersendiri oleh masyarakat |
| Langgam Indische | : Langgam Arsitektur yang masih memperhatikan kondisi iklim juga lingkungan sekitar serta menerapkan ornamen/ elemen – elemen motif pada dinding dan warna |
| Lansekap Kota | : Penataan ruang terbuka berupa open space (taman) pada suatu bangunan |
| Listplank | : Bagian depan bangunan yang biasanya menempel di pengakhiran kemiringan atap selain berfungsi sebagai penutup talang jalannya air hujan juga sebagai keindahan |
| Loteng | : Bagian ruangan lantai atas pada bangunan 2 lantai yang bersifat ruang service |
| Lubang Krepyak | : Celah – celah lubang pada lubang dinding sebagai sikulasi udara dan pencahayaan |

| | |
|-------------------|--|
| Panel | : Lapisan yang berupa plywood sebagai dinding kayu |
| Panel Krepyak | : Panel plywood yang fungsinya sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan karena terdapat kisi – kisi/ lubang – lubang untuk ventilasi |
| Point of Interest | : Hal yang paling menonjol pada sebuah bangunan karena memiliki keunikan tersendiri |
| Renaissance | : Langgam bangunan yang lebih mengarah ke proposi ruang baik lebar dan tinggi ruang yang tepat serta selain fasade yang lebih ditekankan juga fungsi antara ruang dengan denah keseluruhan |
| Rooster | : Lubang cahaya/ sirkulasi udara pada suatu ruangan dengan ukuran bervariasi |
| Rumah Panggung | : Rumah yang menggunakan konstruksi pondasi umpak dengan ketinggian dari tanah ke lantai bangunan kurang lebih 150 cm biasanya untuk material yang dipakai menggunakan kayu dan papan |
| Rumah Kopel | : Suatu hubungan ruang yang saling bersebelahan dengan 1 bidang dinding pemisah yang membatasi pencapaian visual maupun fisik |

diantara 2 ruangan yang bersebelahan

| | |
|----------|---|
| Serambi | : Suatu ruang linier yang secara fungsional menghubungkan suatu ruang terhadap ruang lain yang biasanya dapat diorganisir terhadap tempat masuk kedalam bangunan disepanjang alur gerak yang melaluinya (teras) |
| Sirap | : Suatu material untuk penutup atap yang mudah terbakar |
| Tritisan | : Sebelum teras/ serambi untuk atapnya biasanya kemiringan diberi jarak min 100 cm keluar fungsinya apabila hujan air tidak masuk ke teras/ serambi |
| Usuk | : Konstruksi pada atap material bisa berupa kayu |
| Void | : Suatu ruang bebas yang dapat dilihat dari sudut pandang dimana saja biasanya posisi void berada pada bangunan tingkat |

DAFTAR BAGAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Bagan 1 : Dua Macam Hak Cipta : Hak Ekonomi dan Hak Moral..... | 54 |
| Bagan 2 : Tahapan/ Proses Konservasi..... | 198 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1 : Stasiun Tawang | 112 |
| Gambar 2 : Gereja Blenduk | 116 |
| Gambar 3 : Lawang Sewu | 119 |
| Gambar 4 : Jendela Lawang Sewu | 119 |
| Gambar 5 : Ruang Utama Gedung Lawang Sewu..... | 119 |
| Gambar 6 : Serambi Lantai Dua Gedung Lawang Sewu | 120 |

| | |
|--|-----|
| Gambar 7 : Gedung Lawang Sewu Tampak Samping | 120 |
| Gambar 8 : Gedung Jiwasraya | 123 |
| Gambar 9 : Gedung Marba | 125 |
| Gambar 10: Gedung Ex Pengadilan Negeri Semarang | 127 |
| Gambar 11: Gedung Pasar Johar..... | 129 |
| Gambar 12: Kolom Penyangga Gedung Pasar Johar | 130 |
| Gambar 13: Pabrik Limun Fresh | 134 |
| Gambar 14: Restoran Oen | 135 |
| Gambar 15: Wisma Driyarkara..... | 138 |
| Gambar 16: Gedung SMA Sedes Sapientiae | 139 |
| Gambar 17: Gereja Katolik Admodiriono | 144 |
| Gambar 18: Rumah Sakit Elizabeth..... | 145 |
| Gambar 19: Rumah Tinggal Bp.Gunawan | 147 |
| Gambar 20: Rumah Tinggal Bp.Candro..... | 150 |
| Gambar 21: Rumah Tinggal Keluarga Kwan | 152 |
| Gambar 22: Rumah Tinggal drs.Heru Sutyanto/Tan Yat Tiong | 155 |
| Gambar 23: Rumah Tinggal Keluarga Flatterman..... | 156 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1 : Kondisi dan Jumlah Bangunan Kuno Di Kota Semarang..... | 112 |
| Tabel 2 : Tabel Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perlindungan Bangunan Kuno/Bersejarah | 180 |
| Tabel 3 : Tingkat Perubahan Kegiatan Konservasi Bangunan | 190 |

LAMPIRAN :

- **Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No : 64/50/Tahun 1992 Tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Bersejarah Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang**
- **Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Semarang**
- **Surat Keterangan Melakukan Riset dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kota Semarang**
- **Surat Keterangan Melakukan Riset dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Semarang**
- **Surat Keterangan Melakukan Riset dari Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Semarang**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seperti ada ungkapan, "Kalau ingin kota dengan bangunan lama, maka Semarang termasuk kota yang memiliki hal tersebut".¹ Keberadaan jumlah bangunan kuno/ bersejarah di wilayah Kota Semarang cukup banyak karena banyak dijumpainya beragam ciptaan bangunan dengan arsitektur kuno bernafaskan Belanda di wilayah tersebut. Berbagai bangunan bercorak arsitektur atau seni ciptaan bangunan bergaya Eropa, khususnya Belanda berderet di sepanjang jalan sekitar utara dan barat Pasar Johar yang sekarang lebih dikenal dengan kawasan kota lama. Bangunan kuno tersebut telah dialihfungsikan menjadi kantor-kantor pemerintah atau swasta yang berderet di jalan-jalan kawasan kota lama diantaranya PT Telkom, Kantor Pos, PT Asuransi Jiwasraya, Bank NISP, Jakarta Loyd, Bank Mandiri, GKBI, Ro-kok Praoe Lajar, Marba, Marabunta, Stasiun Tawang serta Gereja Blenduk sebagai 'mahkota'-nya bangunan kuno di kawasan kota lama. Oleh karena itu tak heran bila banyak pula yang menyebut kawasan tersebut sebagai 'Little Netherland' atau 'Belanda kecil' dikarenakan begitu banyaknya ciptaan bangunan bercorak arsitektur Belanda. Gereja Blenduk, Lawang

¹ Kedaulatan Rakyat, 26 /09/01, *Rancang : Kawasan Arsitektur Tua yang Kian Merana*, (Sumber : <http://www.google.com>, diakses tgl.05-12-2007).

Sewu, dan Kantor Pos Besar merupakan beberapa contoh 'masterpiece' dan 'artefak' peninggalan bangunan kuno di Kota Semarang.

Beberapa tahun lalu di awal 1990-an (tepatnya 1992) Walikota Semarang melakukan pendataan bangunan kuno bersejarah. Lewat sebuah SK Walikota No 646/50/92, dinyatakan 101 bangunan kuno di Semarang harus dilindungi. Namun dari jumlah itu semakin banyak yang rusak karena diperlakukan sembarangan bahkan sampai dibongkar oleh pemiliknya. Selama 10 tahun terakhir saja, 17 bangunan kuno di Semarang runtuh atau sengaja dirobohkan.² Jika tidak segera dievaluasi, dikhawatirkan bangunan kuno/ bersejarah banyak yang "menemui ajal". Dari pendataan beberapa tahun silam setidaknya masih ada 80-an bangunan kuno yang harus dilindungi, kebanyakan bercorak arsitektur Belanda di kawasan kota lama Semarang. Sebut saja seperti kondisi balkon pada Gereja Blenduk yang juga semakin keropos dan pondasinya sempat ambles sehingga bisa mengganggu konstruksi keseluruhan bangunan.³ Hilangnya sebagian bangunan hotel Du Pavillon atau sekarang dikenal dengan nama Hotel Dibya Puri. Selain Du Pavillon, ada beberapa bangunan kuno lain yang terancam hilang, contohnya Gedung Batik Pekalongan di dekat perempatan Gendingan.⁴ Bangunan

² Suara Merdeka, Rabu, 22 Maret 2006, *Pemeliharaan Perlu Kontribusi Pemkot, Daftar Bangunan Kuno Dievaluasi*, (Sumber : <http://www.google.com>, diakses tgl. 28-01-2008).

³ *Sekilas Blenduk*, Brosur yang dikeluarkan oleh pengelola Gereja Blenduk, 2004, (Sumber : <http://www.google.com>, diakses tgl. 05-12-2007).

⁴ Purwoko, *Sebagian Hotel Dibya Puri Dibongkar - Satu Lagi Bangunan Bersejarah Hilang*, *Pemkot Lalai Jaga Bangunan Bersejarah*, Suara Merdeka, Kamis, 14

tersebut merupakan salah satu yang bergaya arsitektur Art Deco dan sangat langka di Kota Semarang. Kalau bangunan ini sampai hilang, maka Kota Semarang kehilangan salah satu aset yang sangat berharga. Bangunan lain yang juga terancam hilang yaitu Penjara Wanita di Jalan Sugiyopranoto. Bangunan itu memiliki nilai sejarah tinggi karena berkaitan dengan peristiwa pertempuran lima hari di Semarang. Belum lagi adanya rencana pembongkaran terhadap bangunan Pasar Johar seperti yang telah diungkapkan dengan pernyataan Wali Kota Semarang yang tetap bersikukuh akan merobohkan Pasar Johar untuk dijadikan mal atau pusat perbelanjaan bergaya modern. Juga rencana pengalihfungsian terhadap bangunan kuno Lawang Sewu menjadi hotel. Terbukti banyak bangunan kuno yang kini telah dialihfungsikan. Beberapa bangunan kuno di kawasan Kota Lama yang telah dialihfungsikan tersebut contohnya penggunaan bangunan eks pengadilan negeri di Jalan Letjen Suprpto menjadi rumah makan yaitu Resto Ikan Bakar Cianjur dan sate kambing serta bangunan kuno bekas pabrik Limun Fresh dekat Gereja Blenduk di Jalan Taman Srigunting 5-6 mulai direnovasi untuk dijadikan galeri seni.⁵

Namun bagaimana dengan bangunan kuno yang dimiliki oleh orang. Bukan tidak mungkin, bangunan kuno yang berupa hunian atau

Oktober 2004, (Sumber: <http://www.freshwell.com/nsh.php?nsh=0063> *arsitektur indis**Arsitektur Art Deco*, diakses tgl 05-12-2007).

⁵ Suara Merdeka, Jumat, 09 November 2007, *Bangunan Kuno Jadi Galeri, "Perizinan Jangan Terbatas Untuk Renovasi"* (Sumber : <http://www.google.com>, diakses tgl 15-12-2007).

rumah tinggal dijual, disewakan atau dialihfungsikan secara sembarangan oleh pemiliknya kepada pihak lain tanpa memikirkan aspek perlindungannya. Bangunan rumah tinggal tersebut perlahan tapi pasti mulai berubah sesuai dengan selera pemiliknya atau karena dorongan kebutuhan untuk membangun yang terus meningkat. Akibatnya, banyak bangunan kuno/bersejarah yang dibongkar untuk dialihfungsikan dengan pembangunan fasilitas baru atau dengan berbagai alasan tertentu. Bangunan-bangunan kuno/bersejarah itu semakin menghadapi kuatnya tekanan pembangunan baru yang seringkali bangunan tersebut dialihfungsikan. Padahal bangunan-bangunan kuno/ bersejarah merupakan aset nasional sebagai warisan budaya bangsa karena termasuk karya peninggalan bersejarah yang memiliki nilai historis dan sosial serta nilai ekonomi yang bisa dijual atau dipromosikan sebagai aset wisata. Untuk itu diperlukan suatu perangkat untuk mengatur perlindungannya serta perlu ditata kelayakannya suatu bangunan kuno/ bersejarah sebagai karya intelektual di bidang seni ciptaan bangunan bernilai tinggi yang berasal dari warisan budaya atau aset kekayaan bangsa karena terkandung hal-hal yang harus dilindungi dan dipelihara agar dapat dilestarikan atau diberi fungsi baru sesuai dengan tuntutan jaman.

Warisan budaya yang mumpuni ini berunsur budaya etnik, adiluhung, sakral, kreatif, sekaligus bernilai jual.⁶ Bangsa Indonesia telah memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan berbagai pengembangan-pengembangannya. Oleh karena itu perlu adanya suatu perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman kreatifitas manusia di bidang seni termasuk karya ciptaan yang bernilai seni tinggi pada arsitektur bangunan kuno/bersejarah tersebut.

UU Hak Cipta dikeluarkan dalam rangka untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian diharapkan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang telah mengalami beberapa kali revisi dari UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, dan UU No. 12 Tahun 1997, selanjutnya disebut dengan UUHC 2002 telah diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa ciptaan bangunan kuno merupakan obyek ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta yaitu bidang arsitektur antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan. Pada ciptaan bangunan kuno tersebut terkandung seni gambar

⁶ Agus Sardjono, "Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa". Melalui makalahnya pada seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Rabu 11/7 pukul 17.00 di Ruang Cenderawasih, Balai Sidang Senayan, Jakarta. (Sumber : <http://www.google.com>, diakses tgl.05-12-2007).

bangunan atau nilai arsitektur tersendiri yang khas dan unik dengan gaya-gaya arsitektur yang indah dan berkualitas seni tinggi.

Menurut Pasal 10 ayat (1) UUHC 2002, negara ditetapkan juga sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya yang tidak diketahui penciptanya. Ketentuan ini lebih diarahkan pada perlindungan terhadap obyek hak cipta yang dimaksud dari ancaman kepunahan, terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain. Nilai historislah yang menjadi tolak ukur utama dalam penentuan kaedah ini, meskipun secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk benda berwujud mempunyai nilai jual yang tinggi sebagai aset wisata. Wujud perlindungan itu istimewa dalam hal mewakili kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta untuk penghargaan terhadap karya intelektualitas ciptaannya yang bernilai seni tinggi terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak yang bersifat komersil maupun non komersil.

Hak cipta sendiri terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dalam hal ini jelas hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian "*mengumumkan atau memperbanyak*", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Selanjutnya penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer hanya diperbolehkan seizin pencipta atau pemegang Hak Cipta dan dengan alasan pertimbangan teknis karena berdasarkan Pasal 15 huruf f UUHC 2002 untuk perubahan terhadap ciptaan bangunan bukan merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan dengan pertimbangan pelaksanaan teknis. Dapat dikemukakan suatu contoh bahwa, ada kemungkinan bahwa suatu bangunan sketsa-sketsanya, pemagaran balkon tingkat atasnya terlalu rendah sehingga perlu dipertinggi yang

menyimpang dari gambar sketsa karena itu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan atas dasar pertimbangan teknis.⁷ Pertimbangan teknis merupakan pertimbangan mengenai persyaratan teknis bangunan yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta, perubahan terhadap ciptaan bangunan hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis sehingga perubahan atau penambahan jumlah suatu ciptaan bangunan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer tanpa seizin pemegang hak cipta dan bukan didasari dengan pertimbangan teknis merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Memang sungguh ironis kenyataan yang terjadi sekarang, banyak bangunan kuno/ bersejarah di Kota Semarang yang dialihfungsikan bersama kemungkinan dilakukannya pembongkaran dengan pembangunan fasilitas baru atau berbagai alasan tertentu seperti pertimbangan pelaksanaan teknis yang tidak tepat sebagai alasan pembenarnya. Contohnya gedung di perempatan Jalan Ki Mangunsarkoro dan Jalan Ahmad Yani yang kini digunakan untuk Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.⁸ Pada gedung

⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 85.

⁸ Purwoko, *Op.cit.*

tersebut terlihat ada upaya penambahan bagian-bagian dari bangunan kuno. Kenyataannya, penambahan tersebut seringkali tidak tepat. Ketika gedung itu dibangun, manusia sudah mengenal teknologi modern. Namun kemudian di beberapa bagian ditambah dengan pilaster-pilaster yang mencerminkan nilai arsitektur pada zaman romawi kuno. Hal itu tidak tepat dan justru bisa mencerminkan kemunduran.. Juga pada kasus Pasar Johar, bangunan utama Pasar Johar tersebut harus tetap dipertahankan karena bangunan tersebut merupakan bangunan cagar budaya yang mempunyai nilai sejarah dan arsitektural yang tinggi.⁹ Perubahan-perubahan yang terjadi harus dapat dilihat sejauh mana batas kewajarannya, apa hanya menata kembali wujud fisik luarnya, atau merubah bentuk dan strukturnya.

Bilamana pembongkaran bangunan kuno tidak segera dihambat, dikhawatirkan pada suatu saat nanti generasi mendatang tidak akan dapat lagi melihat sejarah atau suatu daerah yang tercermin dalam lingkungan binaannya. Setiap kota dan daerah akan berwajah tunggal (*monotone*) tanpa memiliki identitas. Keberadaan bangunan kuno bersejarah tersebut mencerminkan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya. Padahal dengan hilangnya bangunan kuno tersebut, lenyap pulalah bagian dari sejarah suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri.

⁹ Kompas, 5 November 2007, *Johar Tetap Perlu Dikonservasi*.

Timbullah erosi identitas budaya, dengan lenyapnya bangunan kuno yang merupakan warisan berharga dari nenek moyang.¹⁰

Seperti celoteh Eugene Ruskin, 1898 seabad yang silam yaitu "Membongkar bangunan kuno, apalagi yang bernilai sejarah, bukanlah dosa kecil". Yang memprakarsai pembongkaran tidak menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan dosa yang besar, khususnya dosa terhadap anak cucu generasi mendatang. Nenek moyang kita pun tidak kalah bijak dengan petuahnya "Yen wis kliwat separo abad, jwa korsi binabad" (kalau sudah melewati separuh abad atau 50 tahun, jangan sampai dihancurkan).¹¹ Dengan lenyapnya bangunan kuno, ikut lenyap pulalah bagian dari sejarah suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri. Generasi penerus tidak akan dapat lagi menyaksikan bukti-bukti sejarah dari perjalanan hidup generasi sebelumnya. Timbullah erosi identitas budaya akibat terbantainya warisan arsitektur yang tak ternilai harganya itu.¹²

Begitu pentingnya perlindungan bangunan kuno/ bersejarah bagi Kota Semarang karena peninggalan bangunan kuno dengan ragam seni ciptaan bangunan atau arsitekturnya yang khas dan kuno yang bernilai sangat tinggi baik tradisional maupun peninggalan kolonial merupakan rekaman sejarah dalam bentuk visual yang menyiratkan kesinambungan

¹⁰ Sidharta, Eko Budihardjo, *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, Hal. 1.

¹¹ Eko Budihardjo, *Tata Ruang Perkotaan*, PT. Alumni, Bandung, 2005, Hal. 180.

¹² *Ibid.*, Lihat "Perkembangan Konsep Konservasi", Hal. 180-182.

peri kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Peninggalan tersebut menjadi bukti sejarah bagi anak cucu dan sebagai aset yang sangat berharga dalam bidang pariwisata. Dan diharapkan pula bagi generasi mendatang membutuhkan rasa aman dan kebanggaan, yang akan diperoleh melalui peluang untuk melihat, menyentuh, dan merasakan bukti-bukti fisik sejarah serta kekayaan budaya nenek moyangnya. Dengan kata lain, secara ekonomis bangunan kuno/ bersejarah akan merupakan salah satu daya tarik wisata. Dari aspek sosial budaya terpeliharanya bangunan kuno akan menumbuhkan ikatan yang erat antara masa kini dan masa lampau dan menciptakan kebanggaan serta harga diri sebagai bangsa. Sedangkan dilihat dari aspek fisik, keberadaan bangunan kuno/ bersejarah akan memperkaya wajah lingkungan dan menciptakan identitas yang khas, unik, dan berkarakter.¹³ Untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian yang akan mengkaji permasalahan mengenai perlindungan karya cipta bangunan kuno/ bersejarah sebagai warisan budaya bangsa di Kota Semarang.

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu, diharapkan dapat memberikan arah pembatasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas.

¹³ Sidharta, Eko Budihardjo, *Op.cit.*, Hal. 5.

Bertolak dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi pengaturan hukum terhadap perlindungan ciptaan bangunan kuno/ bersejarah di Kota Semarang ?
2. Apakah pengalihfungsian bangunan kuno/ bersejarah di Kota Semarang melanggar UUHC 2002 ?
3. Bagaimanakah peranan Pemerintah Kota dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta bangunan kuno/ bersejarah di Kota Semarang ?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Banyak bangunan kuno di Kota Semarang yang telah dialihfungsikan seperti yang terjadi di kawasan Kota Lama. Selain itu tidak sedikit bangunan-bangunan kuno tersebut dialihwujudkan (dibongkar atau dirubah baik sebagian maupun seluruhnya) secara sembarangan karena seringkali dialihfungsikan. Hal ini tentu saja membuat gerah kita semua dan harus segera diatasi karena di dalam ciptaan bangunan kuno/ bersejarah tersebut terkandung nilai historis dan seni bangunan atau arsitektur yang bernilai tinggi sebagai warisan budaya bangsa.

Karya ciptaan bangunan kuno tersebut mengandung nilai seni arsitektur yang sangat tinggi dari hasil kreatifitas manusia. Kreatifitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi, serta apresiasi

budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi harus dilindungi¹⁴ karena untuk dapat melahirkan suatu karya yang mempunyai nilai seni yang tinggi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pengorbanan akan waktu, tenaga, pikiran bahkan biaya untuk menciptakan karya-karya intelektual tersebut sehingga sudah menjadi suatu keharusan jika haknya diberikan penghargaan yang bersifat eksklusif sebagai hak kekayaan intelektual (*intelektual property rights*) sekaligus perlindungan hukumnya di bidang hak cipta. Oleh karena itu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan bentuk pengakuan, penghargaan serta perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta sekaligus obyek hak ciptaannya di bidang seni.

Di sini dibutuhkan hukum untuk mengubah masyarakat secara sadar sebagai *social engineering* (*law as social engineering*). Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku dalam masyarakat tetapi mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola kelakuan baru.¹⁵ Penggunaan hukum

¹⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 56.

¹⁵ Dengan meminjam istilah dari ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai *social engineering by law* dan langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

1. Mengetahui problem yang dihadapi dengan sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengetahui dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal

untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses-proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Sebaliknya, apabila konsepnya justru merupakan kebalikan dari itu, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu peranan hukum yang demikian itu berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Perencanaan membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan yang mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Apabila pilihan telah ditentukan, maka pilihan inilah yang akan diwujudkan melalui hukum. Hukum dibentuk untuk melindungi hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra secara yuridis melalui Undang-Undang Hak Cipta menyangkut kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta maupun hasil karya ciptaannya tersebut.

social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih, mana yang paling layak untuk dilaksanakan;

4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 207-208.

Bagaimana hukum memandang warisan budaya. Konsep warisan budaya itu sendiri dilihat sebagai bentuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi kebudayaan tradisional (*traditional cultural expression*) dari masyarakat lokal Indonesia, baik dalam bentuk teknologi berbasis tradisi maupun ekspresi kebudayaan seperti seni musik, tari, seni lukis atau seni rupa lainnya, seni bangunan atau arsitektur, tenun, batik, cerita, dan legenda. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dalam terminologi “modern”, hasil kreativitas anggota masyarakat tidak dipandang sebagai individual property sebagaimana pandangan masyarakat Barat. Hasil kreatifitas individu akan ditempatkan sebagai wujud dharma bakti anggota masyarakat tersebut dalam kelompoknya. Perilaku dan sikap masyarakat semacam ini memang rentan untuk terjadinya *misappropriation* atas warisan budaya mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memandang keuntungan pribadi sebagai tujuan hidupnya.¹⁶ Di sinilah faktor hukum memainkan peran yang penting. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti, siapa yang berhak. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya. Bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan sarana atau

¹⁶ Agus Sardjono, *Op.cit.*

perangkat hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang lahir dari keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya dengan dibentuknya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 selanjutnya disebut UUHC 2002. Sebelumnya, UUHC 2002 merupakan hasil revisi dari UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, dan UU No. 12 Tahun 1997. UU Hak Cipta tersebut dimaksudkan untuk melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian diharapkan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, sastra dapat dilindungi secara yuridis.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian "*mengumumkan* atau *memperbanyak*", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Berarti setiap kegiatan *perbanyakan* menurut Pasal 1 angka 6 UUHC 2002 yaitu penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk *mengalihwujudkan* secara permanen atau temporer tanpa izin pemegang hak cipta, dalam hal ini negara menyangkut kepentingan obyek hak cipta yang dimaksud dari ancaman kepunahan terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain merupakan tindakan pelanggaran terhadap UUHC 2002.

Menurut Pasal 10 ayat (1) UUHC 2002, dalam hal negara ditetapkan sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya maka obyek ciptaan bangunan kuno yang tidak diketahui siapa penciptanya atau pemiliknya otomatis hak ciptanya dikuasai atau dipegang oleh negara sehingga tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, atau bahkan mengalihwujudkan sembarangan tanpa izin pemegang hak cipta yaitu negara. Ketentuan ini lebih diarahkan pada perlindungan terhadap objek hak cipta yang dimaksud yaitu karya ciptaan bangunan kuno/ bersejarah dari ancaman kepunahan, terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain. Nilai historislah yang menjadi tolak ukur utama dalam penentuan kaedah ini, meskipun secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk benda berwujud mempunyai nilai jual yang tinggi sebagai aset

wisata dari nilai seni ciptaan bangunan atau arsitektur yang khas dan unik. Wujud perlindungan itu istimewa dalam hal mewakili kepentingan pencipta atau negara sebagai pemegang hak cipta terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak baik secara komersil maupun non komersil.

Pengertian bangunan kuno/ bersejarah menurut SK Walikota No. 646/50/1992 adalah bangunan yang berumur lebih dari 50 tahun atau memiliki masa bangunan sedikit-sedikitnya berumur 50 tahun dan dikategorikan mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, atau *kesenian*. Oleh karenanya bangunan kuno merupakan objek hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Menurut Pasal 12 ayat (1) huruf g UUHC 2002, arsitektur yang terdapat pada bangunan kuno/ bersejarah merupakan ciptaan di bidang seni yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Apabila ada perbuatan yang melawan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta maupun obyek hak ciptaan bangunan kuno/ bersejarah yang bertentangan dengan UUHC 2002 maka hal tersebut merupakan pelanggaran. Tindakan menjual, menyewakan kepada pihak lain bahkan sampai mengalihwujudkan bangunan kuno tanpa izin pemegang hak ciptanya, dalam hal ini negara, merupakan pelanggaran terhadap hak cipta karena perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta atas Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002.

Perubahan yang terjadi terhadap bangunan-bangunan kuno/

bersejarah tersebut harus dapat dilihat sejauh mana batas kewajarannya, apa hanya menata kembali wujud fisik luarnya, atau merubah bentuk dan strukturnya. Menurut Pasal 15 huruf f UUHC 2002 perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, contohnya pada ciptaan bangunan, bukan suatu pelanggaran hak cipta. Tetapi apabila melakukan perubahan, penambahan jumlah suatu ciptaan bangunan baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk *mengalihwujudkan* secara permanen atau temporer tanpa didasari pertimbangan pelaksanaan teknis maka merupakan suatu pelanggaran. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, teknis berarti bersifat teknik atau secara teknik, yaitu cara melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan seni.¹⁷ Dalam hal ini pertimbangan teknis merupakan cara atau pedoman yang digunakan untuk mengerjakan ciptaan bangunan di bidang seni arsitektur khususnya terhadap ciptaan bangunan kuno/ bersejarah tersebut. Sedangkan terhadap alasan pertimbangan pelaksanaan teknis yang diatur dalam UUHC 2002 tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut baik mengenai petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya sehingga belum diketahui secara jelas apa ruang lingkup atau batasan dari pelaksanaan teknis yang dimaksud tersebut.

Menurut Pasal 47 Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan

¹⁷ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*, Difa Publisher, Tanpa Tahun, Hal. 801.

Pengguna Jasa dari Ikatan Arsitek Indonesia, syarat-syarat teknis, sekurang-kurangnya mencakup:¹⁸

1. Persyaratan bahan dan cara pelaksanaan:
 - jenis dan uraian teknis pelaksanaan pekerjaan,
 - jenis dan mutu bahan yang dipergunakan,
 - persyaratan tata cara pelaksanaan dan
 - persyaratan teknis lainnya.
2. Persyaratan perlengkapan/peralatan bangunan atau elemen/bagian bangunan yang digunakan, menjelaskan tentang:
 - persyaratan mutu/kualitas produk dan kinerja (*performance*)
 - standar acuan yang digunakan, dan
 - tata cara pengujian.

Mengingat bahwa syarat-syarat teknis mempunyai hubungan sangat erat dengan gambar-gambar dan Rencana Anggaran Biaya, syarat-syarat teknis merupakan keterangan lengkap dari semua hal yang tidak dapat dijelaskan secara/melalui gambar. Oleh karena itu, harus lebih teliti dan cermat agar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) atau gambar-gambar tidak satu bagian pun yang bertentangan satu dengan yang lain.

Dalam hal ini bisa diambil suatu kesimpulan bahwa perubahan yang dilakukan dengan pertimbangan pelaksanaan teknis merupakan cara yang digunakan untuk merubah suatu ciptaan bangunan dengan menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan secara lebih detail dan menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek historis dan orisinalitas (keaslian) serta

¹⁸ Sumber : <http://www.iai.or.id> diakses tgl 19-02-2008.

keandalan/ pengamanan bentuk bangunan asli yang menjadi prinsip perlindungan hak cipta terhadap kepentingan pemegang hak cipta maupun obyek ciptaan bangunan yang dimaksudkan dari ancaman kepunahan, maupun pengalihannya dengan cara melawan hukum. Hal ini tentunya menyangkut perlindungan suatu seni arsitektur terhadap bangunan kuno itu sendiri sebagai obyek hak cipta dan negara atau orang sebagai pemegang hak ciptanya.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC 2002 memang belum diketahui masyarakat luas. Padahal perlindungan terhadap ciptaan bangunan kuno/ bersejarah menyangkut nilai seni arsitektur tinggi yang patut diberikan perlindungan dari sisi pencipta atau pemegang hak cipta maupun obyek ciptaannya tersebut. Namun pada kenyataannya banyak bangunan kuno yang dialihfungsikan dengan kemungkinan-kemungkinan adanya perubahan bentuk secara keseluruhan ataupun bagian substansial tanpa mempertimbangkan alasan pelaksanaan teknisnya. Dengan kata lain banyak bangunan kuno yang terancam hilang atau berubah bentuk baik sebagian maupun keseluruhan. Untuk pelanggaran terhadap perubahan-perubahan atau pengalihwujudan bangunan kuno/ bersejarah yang dilakukan tanpa pertimbangan teknis belum ada pasal yang mengatur secara langsung mengenai ketentuan pidana atau ancaman pidananya. Apabila ditarik kepada pelanggaran terhadap hak eksklusif yaitu penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan

menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk *mengalihwujudkan* secara permanen atau temporer tanpa izin pemegang hak cipta, dalam hal ini negara menyangkut kepentingan obyek hak cipta yang dimaksud dari ancaman kepunahan terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain merupakan tindakan pelanggaran terhadap UUHC 2002. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif atas Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 dan dapat dikenakan ancaman pidana menurut ketentuan pidana Pasal 72 ayat (1) UUHC 2002, yaitu "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)." Hal ini merupakan wujud perlindungan yang diberikan dalam hal mewakili kepentingan pemegang hak cipta yaitu negara yang diarahkan pada perlindungan terhadap obyek hak cipta yang dimaksud dari ancaman kepunahan, terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain dari tindakan menjual, menyewakan atau mengalihwujudkan tanpa izin pemegang hak cipta maupun pertimbangan pelaksanaan teknis.

Selama ini perlindungan hukum terhadap bangunan kuno/bersejarah diberikan oleh Undang-Undang Benda Cagar Budaya dalam

rangka pelestarian (konservasi). Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya selanjutnya disebut sebagai UUBCB, pengertian benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dari deskripsi tersebut di atas maka bangunan kuno merupakan salah satu obyek benda cagar budaya. Namun pengertian di atas tidak menyinggung nilai seni yang terkandung di dalam obyek benda cagar budaya.

Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUBCB diatur mengenai perlindungan dan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan/keaslian bentuk serta pengamanannya. Juga pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UUBCB, mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya dilarang tanpa izin dari pemerintah. Tetapi UUBCB tidak memberikan perlindungan terhadap nilai seni/kesenian yang terkandung pada arsitektur ciptaan bangunan kuno/ bersejarah, padahal bangunan tersebut memiliki nilai seni arsitektur yang sangat tinggi. Dalam ketentuan pidana UUBCB juga tidak ada batas atau standar minimum ancaman pidana. Hal ini tentunya sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Hakim bisa

berpedoman terhadap standar minimum sanksi pidana yang dapat dijatuhkan atas perbuatan yang dilanggar seperti dituangkan dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC 2002 tersebut, lain halnya dengan Pasal 26 UUBCB "Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)".

UUHC mengatur perlindungan hukum di bidang seni terhadap kepentingan pemegang hak cipta atau obyek ciptaan yang dimaksud dari ancaman kepunahan terutama pengalihannya secara melawan hukum yaitu melakukan perubahan, penambahan jumlah suatu ciptaan bangunan baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk *mengalihwujudkan* secara permanen atau temporer tanpa didasari pertimbangan pelaksanaan teknis maka merupakan suatu pelanggaran. Namun tidak serta merta mengenyampingkan pula UUBCB yang juga memberikan perlindungan dari sisi pelestarian dalam memperlakukan dan memelihara atau merawat bangunan kuno sebagai benda cagar budaya di mana hal ini tidak diatur oleh UUHC 2002. Penggunaan UUHC dapat dilihat dari pengalihan bangunan kuno secara

melawan hukum dengan kemungkinan menyebabkan seberapa besar nilai seni tersebut yang hilang. Apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni arsitektur yang sangat tinggi seperti terdapat pada ciptaan bangunan kuno harus dilindungi oleh UUHC. Ini pun kembali kepada pertimbangan aparat penegak hukum yang menilai apakah karya seni arsitektur yang hilang dari ciptaan bangunan kuno/ bersejarah tersebut benar-benar substansi atau penting sehingga dianggap mengkerdilkan atau melecehkan nilai seni, keunikan dan nilai historis bangunan kunonya yang asli sebagai tolak ukur utama dari perlindungan UUHC karena undang-undang tersebut digunakan sebagai jaminan perlindungan untuk kepentingan pemegang hak cipta atau obyek ciptaannya di bidang seni. Sedangkan untuk perlakuan maupun pemeliharaan atau perawatan dalam rangka melestarikan bangunan kuno/ bersejarah di wilayah Semarang maka UUCB beserta PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UUCB, serta Perda Kota Semarang NO. 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama menjadi bahan rujukannya. Rumusan pemeliharaan bangunan itu perlu dibuat karena belum banyak masyarakat Kota Semarang yang mengetahui tentang tata cara pengelolaan dan perawatan bangunan kuno.¹⁹ Hal itu juga dapat menjadi patokan umum atau aturan main bagi penyewa bangunan kuno sebagai obyek benda cagar budaya agar tidak memperlakukan bangunan itu sembarangan.

¹⁹ Kompas, 17 September 2007, *Bangunan Kuno; Didukung, Pembuatan Draf Pengelolaan*.

Sekalipun UUHC maupun UUBCB bertujuan untuk memberikan perlindungan bangunan kuno/ bersejarah, di masa sekarang ini masyarakat mempunyai kesadaran tentang penggunaan hukum untuk menyusun dan mengubah masyarakat, namun masih harus dipertanyakan seberapa jauh hukum mampu dipakai sebagai instrumen yang demikian dan jika hukum memang mampu menimbulkan pengaruh dan efek yang dikehendaki maka seberapa jauh pengaruh tersebut dapat ditimbulkan oleh hukum juga perlu diketahui. M. Friedman melihat hukum sebagai komponen struktur, substansi, dan kultur hukum.²⁰ Ketiga komponen tersebut berada di dalam suatu proses interaksi satu sama lain dan membentuk satu totalitas yang dinamakan sistem hukum.

Komponen substantif adalah segi *out-put* dari sistem hukum. Dalam hal ini dimaksudkan adalah norma-norma hukum itu sendiri yang berupa peraturan-peraturan sejauh semuanya digunakan, baik untuk yang mengatur maupun yang diatur. Komponen substantif ini tidak terikat oleh formalitas tertentu, seperti apakah itu undang-undang yang belum mendapatkan pengakuan secara formal, yang penting itu digunakan atau tidak. Aspek substansi merupakan rantai pengikat dari rangkaian aspek-aspek yang lain yaitu aspek struktur dan kultur hukum. Jadi substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

²⁰ Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, Hal. 154.

Komponen struktur merupakan institusi-institusi yang telah ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan, mempertahankan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, yaitu memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum, dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh peraturan-peraturan hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Lembaga-lembaga hukum itu adalah pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga) yang mempunyai kewenangan menangani perkara yang berbeda-beda. Dengan komponen struktur ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Di sisi lain komponen kultur hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan. Menurut Friedman, kultur hukum itu mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum. Menurut Darmodihardjo dan Sidharta, budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum

yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Sementara itu Soekanto dan Taneko mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.²¹ Walaupun memang tidak mudah untuk memastikan apakah hukum memang telah berhasil menimbulkan perubahan seperti yang dikehendaki.²² Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*legal awareness*),
- 2) pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*legal acquaintance*),
- 3) sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*),
- 4) pola perilaku hukum (*legal behaviour*).

Berdasarkan fungsi sistem hukum dalam masyarakat menurut perspektif tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa tujuan untuk terciptanya perlindungan hukum Hak Cipta terhadap aset

²¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 158.

²² Berkali-kali Roscou Pound menggunakan istilah "engineering". Tujuan *social engineering* adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dengan seminimum mungkin benturan dan pemborosan. Untuk menggarap lebih lanjut pendapatnya itu, Pound mengembangkan suatu daftar kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dibaginya menjadi tiga golongan, yaitu kepentingan-kepentingan umum, sosial dan perorangan. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia senang melihat, "semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* yang semakin efektif", Lihat Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, Hal. 298-300.

warisan budaya bangsa khususnya terhadap karya ciptaan bangunan kuno/ bersejarah akan dapat terwujud jika antara pemerintah dan masyarakat mampu mengharmonisasi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya serta peraturan yang terkait atau peraturan pelaksana di bawahnya dengan perilaku masyarakat setempat. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap prinsip-prinsip dan bentuk perlindungan bangunan kuno/ bersejarah sebagai warisan budaya bangsa belum mampu mengfungsikan suatu sistem hukum sebagai *social engineering* sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap karya cipta bangunan warisan budaya seperti bangunan kuno/ bersejarah belum menjadi kesadaran luas di masyarakat walaupun perangkat hukumnya sudah ada. Selain itu sikap apatis atau kurangnya kepedulian masyarakat sehingga memperlakukan bangunan-bangunan tersebut secara sembarangan disebabkan karena masyarakat belum bisa memberikan penghargaan terhadap nilai seni arsitektur yang sangat tinggi serta aspek historis dan kultural yang unik pada ciptaan bangunan kuno/ bersejarah sebagai hasil karya intelektual manusia. Padahal bangunan kuno/bersejarah tersebut mempunyai sisi-sisi historis dan kultural yang bisa dijadikan sebagai identitas kota sekaligus merupakan aset wisata yang bisa dijual atau dipromosikan. Masyarakat sekarang lebih memilih bersikap apatis, belum bisa memberikan penghargaan terhadap nilai seni serta aspek historis dan kultural pada elemen kota yang

dituangkan dalam arsitektur ciptaan bangunan kuno. Karena itu, kota-kota di Indonesia nyaris kehilangan identitas, seperti halnya Kota Semarang.

Dimulai dari pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan hukum (*legal awareness*) mengenai perlindungan karya seni ciptaan bangunan kuno/ bersejarah tersebut, apakah dapat digunakan sebagai landasan atau acuan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi pengaturan terhadap perlindungan bangunan kuno/ bersejarah selama ini dan apakah pengalihfungsian ciptaan bangunan kuno di Kota Semarang melanggar ketentuan yang berlaku sehingga diperlukan peranan pemerintah kota sebagai kontribusi secara konkret untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan bangunan kuno/ bersejarah di Kota Semarang yang tidak sekedar dilihat dari ketentuan pelestarian dalam UUBCB saja melainkan UUHC yang secara yuridis memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sekaligus obyek ciptaan dari ancaman kepunahan terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain berupa karya peninggalan bersejarah di bidang seni arsitektur yang bernilai tinggi. Oleh karenanya peranan Pemerintah Kota Semarang sangat diperlukan, tidak ketinggalan bekerjasama dengan kelompok swadaya masyarakat/LSM-LSM pemerhati benda cagar budaya serta kelompok arsitektur untuk mengawasi atau mengontrol dalam melakukan perubahan atau pemugaran tidak gegabah demi pelestarian benda cagar budaya

terhadap ciptaan bangunan kuno/bersejarah. Komponen-komponen terkait dalam pemerintah kota yang seharusnya menjadi pengawal kelestarian bangunan bersejarah bukan hanya Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pun ikut bertanggung jawab. Badan tersebut dalam membuat perencanaan kota harus mengacu pada kelestarian bangunan bersejarah. Disamping itu perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan terhadap ketentuan mengenai perlindungan hak cipta, benda cagar budaya dan peraturan terkait atau pelaksana di bawahnya. Adanya perangkat peraturan serta peranan pemerintah kota secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan bangunan kuno/bersejarah di Kota Semarang sebagai identitas kota tersebut sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karya ciptaan bangunan kuno/ bersejarah.

Melalui perlindungan hak cipta pada seni ciptaan bangunan khususnya bangunan kuno/bersejarah sekaligus sebagai benda cagar budaya diharapkan agar para pemilik bangunan kuno maupun semua pihak lainnya mau melindungi bangunan-bangunan yang menjadi cagar budaya tersebut sehingga mampu dipertahankan demi keutuhan sebagai warisan budaya bangsa. Diharapkan karya ciptaan bangunan kuno/bersejarah tersebut bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi dengan kesadaran dan talenta masing-masing warga masyarakat hendaknya turut menyikapi dan memberikan kontribusi

konkret pada aspek perlindungan secara operasional maupun direksional sehingga mampu menjadi sebuah gerakan (*movement*) masyarakat.

D. TUJUAN PENELITIAN

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi pengaturan hukum terhadap perlindungan karya seni ciptaan bangunan kuno/ bersejarah di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui apakah pengalihfungsian bangunan kuno/ bersejarah melanggar ketentuan UU Hak Cipta 2002.
3. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Kota dalam memberikan perlindungan terhadap karya seni ciptaan bangunan kuno/ bersejarah sebagai warisan budaya bangsa.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini berusaha memberikan suatu kontribusi dalam perlindungan di bidang hak cipta terhadap karya seni

ciptaan bangunan kuno/ bersejarah yang akhir-akhir ini semakin mengalami kemunduran, di antaranya :

1. Kontribusi secara teoritis, dengan adanya penelitian tentang bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya seni ciptaan bangunan kuno/bersejarah sebagai warisan budaya bangsa maka diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun kalangan akademisi mengenai berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini marak terjadi beserta bentuk perlindungan hukumnya terhadap karya seni ciptaan bangunan kuno/bersejarah.
2. Kontribusi secara praktis, dapat memberikan masukan khususnya terhadap pemerintah maupun lembaga atau instansi terkait untuk menentukan berbagai macam solusi atau langkah konkret dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap karya seni ciptaan bangunan kuno/bersejarah.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,

disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.²³ Pada hakekatnya metode tersebut memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan di lingkungan yang dihadapinya, sehingga diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, dan menganalisa suatu masalah tertentu dan pada akhirnya diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

F.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.²⁴ Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.²⁵

Aspek yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai hak cipta dan cagar budaya serta peraturan terkait di bawahnya yang

²³ H. Hadari Nawawi, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 9.

²⁴ Soerjono S dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, Hal. 1.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 10.

mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Adapun beberapa perangkat peraturan yang dipakai adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Serta perangkat peraturan di bawahnya yang berkaitan dengan perlindungan bangunan kuno/ bersejarah di Kota Semarang, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama yang secara garis besar memuat pedoman mengenai perlindungan kawasan Kota Lama Semarang dari berbagai kegiatan yang menyimpang rencana dan yang hendak menghilangkan sisa-sisa bangunan kuno yang bernilai sejarah, arsitektural, ilmu pengetahuan dan budaya, serta SK Walikota No. 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/ Bersejarah Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Sedangkan pendekatan empiris²⁶ yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui segala sesuatu mengenai permasalahan terhadap pelaksanaan perlindungan

²⁶ Menurut Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, bila kajian itu terarah pada permasalahan hukum yang terdapat dalam ranah riil, maka pendekatannya empiris dengan metode berpikir induktif. Sementara menurut Soetandyo Wignjosebroto, Hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial empirik sehingga metode penelitiannya bersifat sosial/ nondoktrinal dengan pendekatan struktural/ makro dan lazimnya data-datanya terkuantifikasikan. Lihat Paulus Hadisuprpto dalam makalah “Ilmu Hukum dan Pendekatannya” disajikan dalam Diskusi Panel “ Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum” dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 17 Januari 2006, Hal.11-15.

terhadap bangunan kuno/bersejarah di Kota Semarang. Dalam hal ini melakukan penelitian untuk dapat menjawab permasalahan yang ada yaitu bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap pengaturan hukum mengenai perlindungan karya ciptaan bangunan kuno/bersejarah di Kota Semarang dan menjelaskan apakah pengalihfungsian terhadap bangunan kuno/bersejarah di Kota Semarang melanggar UUHC 2002. Selain itu dilakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana bentuk kontribusi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang berkaitan dengan perlindungan karya ciptaan bangunan kuno/bersejarah sebagai warisan budaya bangsa. Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung.

F.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hal. 35.

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai kondisi pengaturan terhadap perlindungan karya ciptaan bangunan kuno dan memberikan penjelasan apakah pengalihfungsian terhadap beberapa bangunan kuno/ bersejarah yang akhir-akhir ini marak terjadi di Kota Semarang melanggar ketentuan UUHC 2002 serta bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya digunakan analisis terhadap data tersebut sesuai dengan obyek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini kemudian dibuat suatu deskripsi yang faktual dan akurat terhadap hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada.

F.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat *interview* yang dilakukan adalah *interview* bebas terpimpin. Dalam melakukan penelitian dimungkinkan tidak hanya menggunakan pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi dapat dilakukan pengembangan pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan.

b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder ini mencakup :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya serta peraturan terkait di bawahnya dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus bahasa, kamus ilmiah, surat kabar, media informasi dan komunikasi lainnya.

F.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Semarang, dengan pertimbangan terdapat sebanyak 101 bangunan kuno/bersejarah di Kota Semarang yang masih harus dilindungi dan dari jumlah itu semakin banyak yang dibongkar pemiliknya atau rusak serta mengalami penambahan karena kurang pemeliharaan maupun dialihfungsikan sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap karya ciptaan bangunan kuno/bersejarah tersebut sebagai warisan budaya bangsa.

F.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. studi kepustakaan, yaitu studi perundang-undangan dan studi dokumenter yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya ciptaan bangunan kuno/ bersejarah di Kota Semarang.
2. wawancara/ *interview* digunakan untuk mengumpulkan data primer yang bersumber langsung dari para responden dengan instrumen penelitian dalam bentuk outline interview atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu.

Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *Non Random Sampling*, yaitu metode *Purposive Sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subjek-subjek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.²⁸ Berdasarkan teknik ini maka dipilihlah sampel yang cukup mewakili sesuai fungsi dan peran masing - masing instansi yang bersangkutan untuk menjawab

²⁸ *Ibid.*, Hal 36.

permasalahan dalam penelitian ini. Sedang berdasarkan objek dan subjek penelitian tersebut, maka para responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
2. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang
4. Pemilik Bangunan Kuno

F.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis data empiris dan kualitatif. Semua data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik dari inventarisasi data tertulis yang ada maupun penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan melalui wawancara kepada responden atau masyarakat, kemudian data tersebut diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif. Sehingga dengan analisis ini dapat ditarik kesimpulan dari jawaban permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan

memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian tersebut. Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab. Pada Bab I mengenai pendahuluan akan dipaparkan tentang latar belakang, perumusan masalah tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian pada Bab II yaitu Tinjauan Pustaka akan diuraikan tentang Tinjauan Umum tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta Menurut UUHC 2002, dan Tinjauan tentang Karya Seni Ciptaan Bangunan Kuno/ Bersejarah. Pada Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan akan dipaparkan mengenai profil atau keadaan beberapa bangunan kuno/bersejarah di Kota Semarang, kondisi pengaturan hukum selama ini terhadap perlindungan karya ciptaan bangunan kuno, pengalihfungsian ciptaan bangunan kuno/ bersejarah di Kota Semarang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peranan pemerintah kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya ciptaan bangunan kuno/ bersejarah. Sedangkan Bab IV yaitu Penutup, terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta

A.1. Filosofi Perlindungan Hukum Hak Cipta

Wacana perlindungan hukum terhadap warisan budaya dengan rezim HKI seringkali dikaitkan pula dengan persoalan “hukum moral” atau “landasan moral”. Teoritis HKI biasanya menggunakan teori hukum alam atau hukum moral sebagai dasar pijakannya. Gagasan dasarnya adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Oleh karena itu, pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Doktrin tersebut oleh rezim HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau IPR (*Intellectual Property Rights*) diadopsi untuk memberikan landasan guna memberikan perlindungan bagi individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun, sesungguhnya doktrin hukum alam yang disebutkan di atas bersifat lebih luas daripada sekadar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu juga dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak pihak lain, termasuk hak masyarakat lokal atau masyarakat tradisional. Salah satu dasar

argumennya adalah apa yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tentang kodrat manusia.²⁹

Menurut Aquinas, kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia merupakan landasan moral bagi hukum positif. Dengan demikian, terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum moral dengan hukum positif, dalam arti bahwa hukum positif harus selaras dengan moral. Hubungan hukum alam dan hukum positif biasanya dirumuskan dalam bentuk hak. Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atas dasar prinsip kesamaan. Sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui dua cara. *Pertama*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui kodratnya yang disebut hak kodrati. Hak kodrati sebagaimana diatur oleh hukum alam bersumber dari Tuhan. *Kedua*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui perjanjian atau persetujuan dengan orang lain, baik persetujuan antar individu maupun persetujuan publik. Hak yang kedua ini disebut hak positif dan diatur di dalam hukum positif. Melalui ajaran hukum alam dari Aquinas ini menjadi tidak sulit untuk memahami aspirasi yang menghendaki pengakuan terhadap hak kolektif atas warisan budaya (*cultural heritage*).

Selain pendekatan hukum moral dan keadilan, wacana HKI dalam memandang warisan budaya juga bisa didekati dengan *teori utilitarian*

²⁹ Lihat Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hal. 28-31.

untuk menganalisis bahwa pada hakikatnya hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dari sebagian terbesar warga masyarakat. Teori *utilitarianisme Bentham* tentang hukum menyatakan bahwa *the ultimate end of legislation is the greatest happiness of the greatest number*.³⁰ Mengacu pada pernyataan Bentham tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum akan warisan budaya bisa dilakukan melalui perangkat hukum apabila perlindungan hukum tersebut memberikan kemanfaatan terbesar bagi bagian terbesar warga masyarakat lokal. Hukum harus diciptakan berdasarkan rasa keadilan masyarakat demi kebahagiaan warga masyarakat yang bersangkutan. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan tersebut adalah jika hukum yang dimaksud secara ekonomis mampu menciptakan kesejahteraan bagi sebagian terbesar warga masyarakatnya. Di sinilah pertemuan antara teori utilitarian Bentham dengan teori hukum alam Aquinas tentang kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia. Hukum harus diciptakan untuk kebahagiaan masyarakatnya atau kebahagiaan dari bagian terbesar warga masyarakatnya.

Mengapa HKI khususnya hak cipta perlu diberikan perlindungan dan diberikan penghargaan terhadap karya-karya tulis, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Perlunya perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya bermula dari teori hukum alam tersebut yang menekankan pada

³⁰ *Ibid.*, Hal. 33.

faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pendapat Thomas Aquinas, maka John Locke, filsuf Inggris terkemuka pada abad XVIII, menjelaskan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat. Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian tersebut yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi untuk memberikan penghargaan sekaligus kompensasi (insentif) bagi pencipta dalam menghasilkan karya ciptaannya maka perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan.

A.2. Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta

Pada dasarnya negara-negara penganut *Common Law System* dan *Civil Law System* menggunakan prinsip-prinsip dasar sama dalam pemberian perlindungan hukum hak cipta buku. Kedua sistem hukum ini pada analisis akhir pemikiran teorinya mendasarkan pada penggunaan akal atau nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal. Hanya saja, perbedaannya bahwa negara-negara penganut *Common Law System* menggunakan akal melalui empirisme, sedangkan negara-negara penganut *Civil Law System* menggunakan akal melalui perundang-

undangan. Ini berarti ciri Common Law System terletak pada kaidah-kaidahnya yang bersifat konkret, yang sudah mengarah penyelesaiannya suatu kasus tertentu, dimana pengadilan memegang peranan yang utama (= *judge made rule*). Lain halnya dengan negara-negara *Civil Law System* yang membentuk kaidah-kaidah hukumnya secara sistematis doktrinal dan berdasarkan perundang-undangan yang merupakan produk badan legislatif negara.³¹

Beberapa dari prinsip yang mempunyai kesamaan-kesamaan dimaksud beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. *Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli*

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Dari prinsip yang fundamental ini (yaitu prinsip ide yang berwujud) dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai sub-principles, yaitu :

³¹ Bdgk. Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, Hal. 251; Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*, Penerbit Remadja Rosdakarya, 1991, Hal. 51, menjelaskan buah pikiran John Chipman, yaitu bahwa selain penggunaan unsure akal atau logika yang memegang factor penting dalam pembentukan perundang-undangan, juga unsure kepribadian, prasangka, dan unsure lain di luar logika berpengaruh sangat besar; faktor-faktor dimaksud dapat berupa factor-faktor politik, kualitas individual hakim terhadap penyelesaian perkara, sehingga timbul slogan terkenal : All the Law is Judge-made-law; bdgk.juga pendapat W. Friedman, *Legal Theory*, Hal.368 tentang perbedaan prinsip pembuktian dan hukum acara dalam *Common Law System* dan *Civil Law System*. Baca Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, Hal.98-106.

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil)³² untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
- c. Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dengan perkataan lain hak khusus mengandung arti suatu "*monopoli terbatas*" terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud

³² Syarat perlu adanya keaslian suatu ciptaan supaya ciptaan bersangkutan memperoleh perlindungan, merupakan suatu syarat tradisional yang selalu terdapat pada UUHC setiap Negara yang semuanya mengacu pada Konvensi Bern.

Shaun Mc.Vicar dalam kuliah umum di hadapan para mahasiswa Fakultas Hukum Unpad, tanggal 19 September 1998, berjudul *An Overview of IPR Principles...*; tentang originality, mengemukakan : *Although there is no accepted international definition of "originality", generally "original" is not considered in the sense of requiring any particularly inventive thought or degree of creativity. As copyright is an economic right, it is generally sufficient if the work in question has not been copied from another and has involved a degree of skill and labour on the part of the author in its creation. If these tests are satisfied the material will generally be considered "original"*.

dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. *Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta*

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

4. *Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right)* yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. *Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)*

Pasal 1 ayat (1) UUHC 2002 menetapkan : Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 (1) UUHC 2002 tersebut di atas, yaitu hak cipta dibatasi undang-undang. Selain hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat dicontohkan dari suatu ciptaan

yang tercipta secara keinsidental (*coincidence* = terjadi pada waktu yang sama) dengan ciptaan lain yang sama. Dalam hal yang demikian bukan merupakan suatu pelanggaran. Hal ini dapat saja terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.

Menurut sumber lainnya, dasar - dasar perlindungan hak cipta diantaranya adalah :³³

1. *Asas orisinalitas (original)*. Keaslian dari suatu ciptaan harus benar-benar terpenuhi, dalam arti bahwa suatu ciptaan orisinalitas menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara faktual bahwa karyanya benar-benar asli.
2. *Bentuk Fisik (physical form)*. Hak cipta yang mendapat perlindungan adalah bentuk fisik yang jelas artinya bahwa ciptaan tersebut tidak berupa ide atau informasi, akan tetapi berupa ide yang telah ada wujudnya atau ada wujud konkret sebagai hasil ciptaan tertentu.
3. *Media Tertentu (tangible media)*. Ciptaan tersebut dianggap sah mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan pada suatu media yang dapat disimpan dan dibaca, didengar, atau dilihat serta dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Suatu ciptaan secara otomatis

³³ Etty Susilowati Suhardo, *Penegakan Hukum Pada Hak Cipta*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun, Hal. 5.

mempunyai hak atas ciptaan yang diwujudkan pada suatu ciptaan tertentu.

4. *Jangka Waktu (term duration)*. Bentuk fisik dari karya cipta dapat disimpan dalam jangka waktu lama, sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut L.J. Taylor, yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri.³⁴ Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan.

Dari prinsip dasar suatu ciptaan senantiasa memberikan kewenangan bagi penciptanya. Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Menurut Volmar penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.³⁵

A.3. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik

³⁴ L. J. Taylor, *Copyright for Librarians*, Cetakan Pertama, East Sussex: Tamarisk Books Hastings, 1980 dikutip oleh M. Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 57.

³⁵ Etty Susilowati Suharto, *Hak Cipta*, Bahan Kuliah, Sentra Pendidikan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun, Hal. 4.

Hak cipta itu merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan merupakan hak kebendaan.³⁶ Undang-undang memberikan perlindungan terhadap si pemilik atau si pemegang hak. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah asas lain *droit de suite*³⁷, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus-menerus di tangan siapapun benda itu berada.

Perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan³⁸ immateriil sebagai hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Obyek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateriil. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat

³⁶ Ciri-ciri pokok hak kebendaan, diantaranya : *pertama*, merupakan hak mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun; *kedua*, mempunyai karakter yang bersifat mengikuti bendanya dimanapun juga benda itu berada dan terus mengikuti orang yang mempunyai; *ketiga*, sistem yang dianut, terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan atau tingkatan yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian; *keempat*, mempunyai sifat *droit de preference*, yakni hak yang didahulukan; *kelima*, adanya apa yang dinamakan dengan gugat kebendaan dan *keenam*, adanya kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara penuh dilakukan. Hak Cipta disamping termasuk hak kebendaan juga mempunyai sifat *droit de suite* yang senantiasa melekat dan tidak akan hilang sekalipun dibajak oleh pihak lain. *Ibid.*, Hal. 25-27. Lihat juga Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985, Hal. 75.

³⁷ Karena hak cipta merupakan hak atas benda tidak berwujud, maka padanya melekat suatu ciri pokok hak atas benda, yaitu *droit de suite/zaaksgesvolg* (hak untuk mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga atau dalam tangan siapapun benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti ciptaan walaupun telah berpindah tangan dari penciptanya. Baca : Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1997, Hal. 31 dan Masjhoem Sofwan Sri Soedewi, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, 1981, Hal. 24.

³⁸ Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, Hal. 79, dikemukakan bahwa sistem hukum benda mengandung sejumlah azas, antara lain yaitu : Hak Kebendaan memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya, hak itu dapat dinikmati, dialihkan, dijaminakan, dan disewakan.

atau dengan cara lain (Pasal 3 UUHC 2002). Hal ini dapat membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi obyek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu Undang-Undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

Hak cipta sebagai bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*) merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran. Perlindungan hak cipta mempunyai suatu batasan waktu tertentu, hak cipta akan menjadi milik umum setelah habis masa perlindungannya.³⁹

B. Perlindungan Hak Cipta Menurut UUHC 2002

B.1. Pengertian Hak Cipta

Sebelum pembahasan sampai pada pengertian hak cipta, maka pada bagian ini terlebih dahulu dijelaskan sedikit latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2002, yang semula berawal dari UU No. 6 Tahun 1982 dengan beberapa kali revisi. Merujuk konsiderans Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dapat

³⁹ M. Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Hal. 56.

dicermati bahwa ;⁴⁰ Undang-Undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (Tahun 1978) khususnya pembangunan dibidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian diharapkan penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra dapat dilindungi secara yuridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya yang besar. Dengan begitu pantaslah hak yang muncul karenanya dirumuskan sebagai "*property rights*" yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam wujud perlindungan hukum.

Istilah hak cipta menurut Saidin pertama kali dikemukakan oleh Moh. Syah pada kongres Kebudayaan di Bandung Tahun 1951 yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu

⁴⁰ OK. Saidin, *Op.cit*, Hal. 56.

sendiri merupakan terjemahan dari istilah Auteurs Rechts.⁴¹ Dikatakan kurang luas karena istilah hak mengarang memberikan kesan ada penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang. Sedang istilah hak cipta itu lebih luas dan di dalamnya mencakup juga tentang karang-mengarang. Sehingga pada akhirnya istilah hak cipta yang dipakai dalam UU Hak Cipta Indonesia.

Hak cipta menurut kodratnya bersifat absolut sehingga pada dasarnya hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun dan pemegang hak dapat menuntut apabila pelanggaran yang dilakukan atas haknya itu. Pengertian hak cipta menurut Auteurswet 1912 dalam pasal 1-nya adalah hak cipta merupakan hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian menurut Universal Copyright Convention dalam pasal V, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 Butir 1 UU Hak Cipta 2002 merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

⁴¹ Lihat OK. Saidin, *Op.cit.*, Hal 58-59.

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak eksklusif menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 tersebut adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang hampir sama. Dalam Auteurswet 1912 maupun Universal Copyright Convention menggunakan istilah "hak tunggal" sedangkan UUHC Indonesia menggunakan istilah "hak eksklusif" bagi pencipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Perkataan "tidak ada pihak lain" mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si

penerima hak. Kepada yang bersangkutan boleh menggunakan hak cipta tersebut dan akan memperoleh perlindungan hukum terhadap siapapun yang mengganggu atau menggunakannya dengan cara melawan hukum.

Michael B. Smith dan Merrit R.B. Lakeslee mengemukakan hak cipta dapat pula diartikan "Hak eksklusif yang diberikan pemerintah untuk jangka waktu tertentu kepada pencipta karya sastra atau seni seperti buku, peta, artikel, gambar, foto, komposisi musik, gambar hidup, rekaman atau program komputer. Program komputer dilindungi sebagai karya sastra dan kompilasi pangkalan data sebagai hasil ciptaan intelektual."⁴² Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:⁴³

- a. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- b. [mengimpor](#) dan [mengekspor](#) ciptaan,
- c. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- d. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
- e. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara

⁴² Michael B. Smith & Merrit R. Blakeler, *Bahasa Perdagangan*, Penerbit ITB Bandung, Bandung, 1995, Hal. 47.

⁴³ *Hak-hak yang Tercakup Dalam Hak Cipta, Hak Eksklusif*, Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diakses tanggal 02-05-2008.

orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut juga berlaku di [Indonesia](#). Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, [mengaransemen](#), mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, [menyiarkan](#), merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun"

B.2. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :⁴⁴ (a) meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan; (b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; (c) mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan (d) mengubah isi ciptaan. Dua hak moral utama yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah :⁴⁵

1. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;

⁴⁴ Walter Simanjutak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri.

⁴⁵ Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual : Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, 2002, Hal. 66.

2. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

1. dicantumkan nama atau nama samaraninya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
2. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Juga tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.

Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :⁴⁶ Hak Reproduksi atau Penggandaan (*Reproduction Right*); Hak Adaptasi (*Adaptation Right*); Hak Distribusi (*Distribution Right*); Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*); Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*); Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*); *Droite de suite*; Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*).

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman

⁴⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal. 52.

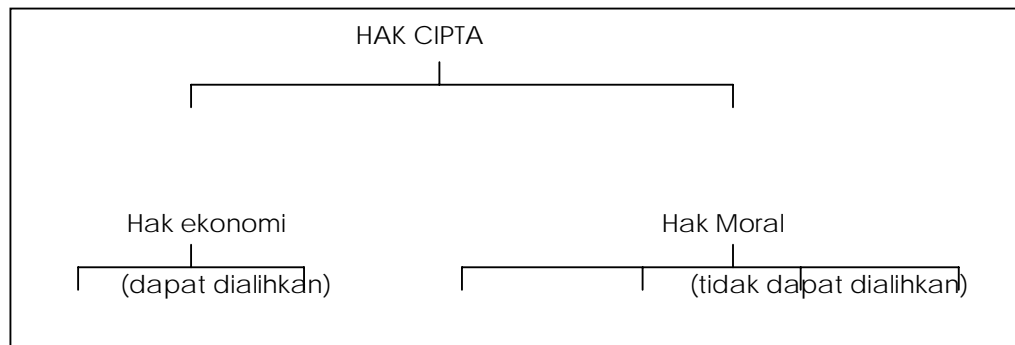
adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works 1886 ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya [Seni](#) dan [Sastra](#)" atau "[Konvensi Bern](#)") juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*). Yang dimaksud dengan hak ini adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputations*).

Hak-hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang

sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*)⁴⁷ yang dimiliki pencipta atas ciptaannya. Kedua hak ini kalau dijabarkan dalam suatu diagram seperti berikut :⁴⁸

Bagan 1. Dua Macam Hak Cipta : Hak Ekonomi dan Hak Moral



Sumber : Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, Hal.62.

Tentang pengertian hak moral yang termuat dalam diagram di atas, ada sedikit perbedaan dalam soal arti hak moral dengan yang dikemukakan oleh seorang penulis lain dari Perancis : *Desbois* dalam bukunya *Le Droit d'auteur* (1966)⁴⁹ berpendapat bahwa suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :

⁴⁷ Hak-hak ekonomi juga disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Lihat Eddy Damian, *Op.cit.*, Hal. 62.

⁴⁸ Lihat A. Komen et.al., *Compendium van het Auterrsrecht*, Kluwer Deventer, 1970, Hal. 7.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 76-78.

- 1) *Droit de publication*: hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- 2) *Droit de repentier*: hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan;
- 3) *Droit au respect*: hak untuk menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- 4) *Droit a la paternite*: hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Hak moral yang dianut oleh Eropa dalam hak atas kekayaan intelektual bertujuan memberikan perlindungan moral terhadap suatu karya seni atau teknologi dan penciptanya termasuk larangan terhadap pengubahan dan fragmentasi suatu karya. Hak moral ini menekankan nilai pentingnya keaslian suatu karya cipta. Sedang hak ekonomi (dianut oleh Amerika Serikat), sama halnya dengan hak moral, hak ekonomi dalam hak atas kekayaan intelektual bertujuan memberikan perlindungan terhadap suatu karya seni atau teknologi dan penciptanya. Akan tetapi di sini, yang lebih ditekankan adalah perlindungan terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh penciptanya.⁵⁰

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, secara *inter alia* mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan

⁵⁰ Danrivanto Budhijanto, "Hak Atas Kekayaan Intelektual" dalam Kuliah Umum Konsep Teknologi E10T1, Aula Timur ITB, 18 September 2007.

[Konvensi Bern](#).⁵¹ Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.

B.3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Di sinilah yang membedakan hak cipta dengan hak lainnya. Hak paten dan hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen HaKI, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis. Pencipta di sini merupakan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

⁵¹ *Hak-hak yang Tercakup Dalam Hak Cipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi*, Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diakses tanggal 02-05-2008.

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.⁵² Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak cipta dalam ilmu hukum dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tak berwujud (immateriil) yang dikelompokkan dalam

⁵² Menurut *Volmar*, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subyek haknya sebagai pendukung hak tersebut. Setiap ada hak tentu ada kewajiban. setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subyek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut *Prof Mahadi* bahwa setiap ada subyek tentu ada obyek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa hubungan itu dinamakan *eigendom recht* atau hak milik. Selanjutnya menurut *Pitlo*, sebagaimana dikutip oleh Prof Mahadi mengatakan bahwa kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, obyek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula ada orang subyek yang mempunyai hak itu. Jadi jika dikaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subyeknya ialah pemegang hak cipta yaitu pencipta atau prang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 UUHC 2002. Sedangkan yang menjadi obyeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateriil. Lihat OK. Saidin, *Op.cit.*, Hal. 70.

rumpun hak atas kekayaan intelektual (HKI). Sesuai dengan sifatnya sebagai hak kebendaan menurut Soedewi Masjchoen Sofwan hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk dipertahankan terhadap siapapun.⁵³ Hak Kebendaan merupakan hak mutlak yang berarti absolut yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu. Karena hak cipta termasuk sebagai hak kebendaan maka sifatnya mirip dengan hak milik, sehingga jaminan perlindungan hukumnya pun hampir sama dengan hak milik. Sifat hak cipta ini ditegaskan dalam Pasal 3 UUHC 2002, yaitu hak cipta dianggap sebagai "benda bergerak". Dalam hal ini termasuk juga jaminan untuk menikmati dengan bebas dan mempertahankannya kepada siapapun, serta mengalihkan baik untuk seluruhnya atau sebagian kepada orang lain dengan jalan apapun karena perjanjian, diserahkan kepada negara, pewarisan, hibah dan wasiat atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia.

B.4. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada dasarnya yang dilindungi oleh UUHC 2002 adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang

⁵³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata; Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 24.

khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (*alter-ego*) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter-egonya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.⁵⁴ Hak cipta meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup semua karya tulis (*literary works*), seperti buku, program komputer, *data base*, laporan teknis, manuskrip, karya arsitektur contohnya ciptaan bangunan, peta, hasil terjemahan, atau dari hasil pengalihwujudan, karya yang diucapkan atau dinyanyikan, karya drama termasuk yang tidak diucapkan, seni film, dan karya musikal termasuk seni dalam segala bentuknya. Beberapa ketentuan baru dari Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 adalah :⁵⁵

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual, dan atau sarana telekomunikasi;

⁵⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2005, Hal. 131-132.

⁵⁵ Syarifin, Pipin & Jubaedah, Dedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, Hal. 214-215.

3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

B.4.a. Ciptaan Yang Dilindungi

Ciptaan di sini merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Keaslian di sini maksudnya adalah bagaimana pencipta itu mampu untuk menunjukkan kekuatan *original expression of ideas* yang hanya dimilikinya dan dilaksanakan dalam bentuk yang riil dan nyata, dalam arti kata, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau

gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Ciptaan-ciaptan yang dilindungi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;

I. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan;

Pada ciptaan yang berhubungan dengan terjemahan, tafsir dan seterusnya seperti yang dimaksud pada huruf I di atas, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atau ciptaan aslinya. Selain itu walaupun tidak atau belum diumumkan (*unpublished works*) akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan hasil karya tersebut tetap mendapatkan perlindungan.

B.4.b. Ciptaan Yang Tidak Dilindungi

Yang tidak mendapatkan perlindungan hak cipta terdapat pada Pasal 13 yaitu :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan Pengadilan dan penetapan hakim
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya

Yang terdapat pada Pasal 13 UUHC 2002 ini setiap orang boleh memperbanyak, mengumumkan, atau menyiarkan tanpa perlu memerlukan izin, karena semua ini bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pada hasil rapat terbuka tidak ada hak cipta, berbeda dengan

rapat tertutup tentu saja tidak dapat diumumkan atau diperbanyak tanpa izin.

B.4.c. Pembatasan Hak Cipta

Adapun pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tanpa syarat tertentu diatur dalam Pasal 14 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang meliputi:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Menurut Pasal 15 sampai Pasal 18 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap melanggar hak cipta dengan syarat tertentu dapat dikelompokkan ke dalam:

1). Sumbernya harus disebut atau dicantumkan, seperti:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
- d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

2). Pemberian imbalan atau ganti rugi yang layak

- h. Penerjemahan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, yaitu apabila selama 3 tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di Wilayah Negara Republik Indonesia dan (hanya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan) dan

hanya dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Hak Cipta;

- i. Untuk kepentingan nasional, pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan pemegang hak cipta tersebut mendapat ganti rugi yang layak.

B.4.d. Kepemilikan Hak Cipta Oleh Negara

Mengenai negara sebagai pemegang hak cipta, dalam hal ini ketentuan Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 UUHC 2002 Indonesia menyebutkan lagi satu sebab hak cipta itu dipegang oleh negara sebagai subyeknya yakni apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum dipublikasikan. Namun negara dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai "pelindung" terhadap hak yang dimiliki oleh penciptanya. Manakala penciptanya diketahui di kemudian hari negara akan menyerahkannya kembali. Jadi negara berperan sebagai pelindung kepentingan hukum pencipta yang tidak diketahui itu.

Ketentuan ini adalah merupakan penyesuaian dengan article 15 (4) Konvensi Bern.

Dalam ketentuan sebelumnya, terhadap hak cipta yang tidak diketahui siapa penciptanya, hak itu diambil alih oleh negara. Ternyata kemudian redaksi seperti itu tidak lagi ditemukan dalam UU No. 7 Tahun 1987 dan diteruskan dalam UU No. 12 Tahun 1997 dan UU sekarang (UU No. 19 Tahun 2002). Alasan penghapusannya adalah :

1. Sesuai dengan sifat hak cipta sebagai hak perorangan yang lebih bersifat pribadi dan tidak berwujud seyogyanya memang tidak perlu ada ketentuan serupa itu.
2. Sekiranya negara memang memerlukan, cukup ditempuh dengan cara mekanisme yang lazim dikenal dengan "*Compulsory Lisensing*" yang sekarang dianut dan diatur dalam undang-undang hak cipta Indonesia.
3. Apabila sesuatu ciptaan memang memiliki arti penting antara lain bagi atau dari segi kebijaksanaan di bidang pertahanan dan keamanan negara, untuk itu dapat ditentukan pelarangan untuk mengumumkan ciptaan tersebut.

Hak cipta sebagai hak milik, dalam penggunaannya harus pula dilandaskan atas fungsi sosial.⁵⁶ Hal ini tegas dinyatakan dalam penjelasan umum UUHC Indonesia pada butir 2 menyebutkan bahwa, "Undang-Undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan

⁵⁶ Kalau melihat sejenak ke belakang bahwa dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada pasal 26 menyebutkan hak milik itu berfungsi sosial, lebih dari itu A.P. Parlindungan menulis bahwa dalam UUPA menyebutkan tidak saja hak milik yang berfungsi sosial tapi semua hak (atas tanah). Lihat A.P. Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1982, Hal. 20. Lihat OK. Saidin, *Op.cit.*, Hal. 73-76.

termaksud." Atas pertimbangan inilah negara dapat sewaktu-waktu menjadi pemegang hak cipta, namun tidak dengan jalan mengambil alih secara paksa.

- a. Tidak semua jenis ciptaan yang dapat dijadikan milik negara, hal ini tergantung pada fungsi dan kegunaanya bagi negara. Menurut Ali Said dalam sidang paripurna DPR dalam pembahasan RUU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 bahwa, "pelaksanaan pengambilalihan hak cipta oleh negara tidaklah semudah yang diduga orang karena yang dapat diambil oleh negara hanyalah apabila dianggap perlu atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.⁵⁷ Dengan demikian berarti hanya dengan pertimbangan nasional semata-mata."

Sebagai bahan perbandingan disini juga dapat dikemukakan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya. Di sana disebutkan bahwa, "Untuk kepentingan umum, termasuk

⁵⁷ Sudargo Gautama mengatakan, "Adalah lebih tepat jika negara kita pandang sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa)." Berdasarkan kualitas itu negara bertindak sebagai penguasa.⁵⁷ Namun perlu juga sikap kehati-hatian, atas nama negara sering terjadi "perampasan" yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum. Seringkali dalam praktek negara kekuasaan, kekuasaan dijemakan terlebih dahulu kedalam produk hukum unsur keadilan dan kehendak rakyat itulah lebih dahulu diprioritaskan untuk kemudian dijadikan sebagai instrumen hukum. Dengan mempercayakan produk hukum semata-mata pada kekuasaan negara, apalagi kepada penguasa eksekutif, dikhawatirkan unsur kekuasaan itu lebih dominan, sehingga hak-hak rakyat terabaikan dan pada tingkat yang paling buruk adalah "perampokan hak oleh negara" namun tetap benar menurut hukum. Lihat Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 56.

kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan pembangunan, maka presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar dari Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.⁵⁸ Demikianlah demi kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara, misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, perkantoran, atau rumah sakit, negara dapat mencabut hak atas tanah.⁵⁹

Pada UUHC Indonesia, hanya disebutkan, "dapat dijadikan milik negara" sedangkan Ali Said menggunakan istilah "diambil alih oleh negara". Menurut JCT. Simorangkir istilah "dapat dijadikan milik negara" yang dipakai UUHC 1982, memberikan arti bahwa peralihan hak kepada

⁵⁸ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1982, Hal. 600.

⁵⁹ Kemudian ada yang dikenal dengan istilah pembebasan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 1 PMDN No. 15 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa, "Pelepasan ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak-hak/penguasa atas tanahnya dengan cara mengganti rugi.⁵⁹ Perbedaan antara pencabutan hak dengan pembebasan hak adalah dalam hal ganti rugi, dimana pencabutan hak ganti rugi ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan dalam pembebasan hak ganti rugi dimusyawarahkan dengan pihak pemilik tanah. Perbedaan lain adalah dalam pencabutan hak itu hanya dibenarkan untuk kepentingan pemerintah, sedangkan pada pembebasan hak disamping untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan swasta juga dibenarkan. Lihat A.P. Parlindungan, *Op.cit.*, Hal. 58. Demikianlah sebagai perbandingan, bilamana hendak mengeluarkan peraturan pelaksana UUHC Indonesia nanti ada baiknya ketentuan seperti diatas dapat dimasukkan sebagai pertimbangan, setidaknya mengenai hal ganti rugi. Jika UUHC Indonesia ternyata telah memilih sistem "*Compulsory Lising*", maka pertimbangan dalam hal menentukan besarnya jumlah ganti rugi benar-benar dilakukan dengan bijaksana.

negara itu hanya merupakan suatu kemungkinan saja, bukan suatu kekhususan dan untuk itu harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu :⁶⁰

- a. Demi kepentingan negara
- b. Dengan sepengetahuan pemegangnya
- c. Dengan keputusan presiden
- d. Atas dasar pertimbangan dewan hak cipta
- e. Kepada pemegang hak cipta diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh presiden.

Selanjutnya menurut JCT. Simorangkir, dengan dijadikannya hak cipta suatu karya menjadi hak milik negara setelah memenuhi segala macam persyaratan itu, maka negara bukan hanya sebagai sekedar "pemegang hak cipta" tetapi negara itu sudah menjadi "pemilik" hak cipta suatu karya.⁶¹

Jadi jika dilihat persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat hak cipta itu dijadikan milik negara, maka dapat dikatakan persyaratannya hampir sama dengan tata cara pencabutan hak atas tanah. Karena adakalanya tidak semua si pemilik dapat menyetujui dan jika persetujuan itu ditunggu mungkin tidak akan diperoleh, yang pada akhirnya "kekuasaan" akan turut dalam penyelesaian peristiwa itu, apalagi kepentingan umum menghendaki. Oleh karena itu dengan dalih atau alasan apapun jika kepentingan negara menghendaki dengan

⁶⁰ JCT. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, 1982, Hal. 139.

⁶¹ *Ibid*, Hal. 137. Tetapi perlu dicatat, moral rights tidak ikut beralih.

"terpaksa" itu harus dilaksanakan. Demikian halnya dengan hak cipta, jika digunakan kata "persetujuan si pencipta" itu akan mempersulit persoalan bila ternyata si pencipta tidak memberikan persetujuan. Oleh karena itu undang-undang telah menetapkan syarat-syarat tertentu, misalnya atas dasar pertimbangan dewan hak cipta nasional sebagai wakil si pencipta. Dan kepadanya diberikan pula ganti rugi sebagai imbalan atas usahanya sebagai pencipta. Namun dalam UUHC Indonesia sekarang tidak lagi disebutkan tentang pengambilalihan hak cipta oleh negara.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), negara ditetapkan juga sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Ketentuan ini lebih diarahkan pada perlindungan terhadap obyek hak cipta yang dimaksudkan dari ancaman kepunahan, terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain. Nilai historislah yang menjadi tolak ukur utama dalam penentuan kaedah ini, meskipun secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk barang (benda) berwujud mempunyai harga jual yang tinggi sebagai aset daerah atau wisata. Khusus untuk ciptaan dalam bentuk hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama

seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara. Wujud perlindungan itu teristimewa dalam hal mewakili kepentingan pencipta terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak yang bersifat komersil atau non komersil.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan cerita tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk sebagai berikut: Cerita rakyat, puisi rakyat; Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; Tari-tarian rakyat, permainan tradisional; Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara tersebut berlaku tanpa batas waktu. Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lainnya, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta.

B.5. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem negatif deklaratif. Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari

ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan hukum. Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal HKI.

B.6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Terhadap jenis-jenis ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, yaitu :

1. Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan ini meliputi : Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; Drama atau musikal, tari, koreografi; Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung; Seni batik; Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Arsitektur; Ceramah, kuliah,

pidato, dan ciptaan sejenis lain; Alat peraga; Peta; Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

2. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi : Program komputer; Sinematografi; Fotografi; Database; Karya hasil pengalihwujudan;
3. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
4. Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
5. Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan;
6. Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
7. Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
8. Jangka waktu perlindungan bagi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

B.7. Pelanggaran Hak Cipta

Selain mengenal pelanggaran atas hak moral pencipta, UUHC menetapkan bentuk-bentuk pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana, baik penjara maupun denda. Bentuk pelanggaran pada pokoknya berkisar pada pelaksanaan *economic rights* tanpa izin atau

tanpa persetujuan pencipta. Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu; Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau Mengubah isi ciptaan.

Hak untuk mengajukan gugatan itu tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (Pasal 66) dalam hal penyidikan di bidang hak cipta bahwa selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta yaitu pidana penjara dan/atau denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1. Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 72 ayat (3) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 72 ayat (4) : Barangsiapa melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
5. Pasal 72 ayat (5) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Pasal 72 ayat (6) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Pasal 72 ayat (7) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Pasal 72 ayat (8) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

10. Pasal 73 ayat (1) : Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

11. Pasal 73 ayat (2) : Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Jelasnya yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Ketentuan pidana tersebut di atas, menunjukkan kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait lainnya untuk memantau perkara pelanggaran hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi perdata berupa ganti kerugian dan tidak menutup hak negara untuk menuntut perkara tindak pidana hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi pidana penjara bagi yang melanggar hak cipta tersebut. Ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana denda yang paling berat, paling banyak, sebagai salah satu upaya menangkai pelanggaran hak cipta, serta untuk melindungi pemegang hak cipta. Delik pidana yang semula diklasifikasi sebagai delik aduan diubah

menjadi delik biasa bertujuan agar penegakan hukum di bidang hak cipta tidak semata-mata mengandalkan pada pengaduan. Dengan klasifikasi sebagai delik biasa diharapkan masyarakat dapat membantu melaporkan atau menyampaikan pengaduan atas terjadinya pelanggaran dan aparat penegak hukum dapat secara aktif mengambil langkah-langkah dalam menangani pelanggaran hak cipta ini. Juga dengan adanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertujuan untuk membantu penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran hak cipta. Kehadiran PPNS dipandang perlu mengingat pelanggaran hak cipta banyak menyangkut masalah teknis yang cara pembuktiannya memerlukan pengetahuan teknis pula. UUHC lebih memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, negara atas penguasaannya terhadap bangunan kuno/ bersejarah karena menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik. Dengan kata lain lewat delik biasa si pemegang hak cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang hak cipta, pihak kepolisian atau penyidik lainnya yang berwenang dapat menindak. Dengan kualifikasi sebagai delik biasa diharapkan masyarakat dapat membantu melaporkan atau menyampaikan pengaduan atas terjadinya pelanggaran dan aparat penegak hukum dapat secara aktif mengambil langkah-langkah dalam menangani pelanggaran hak cipta ini.

C. Tinjauan Tentang Karya Ciptaan Bangunan Kuno/ Bersejarah

C.1. Ciptaan Bangunan Merupakan Karya Seni Arsitektur

Berbicara mengenai ciptaan bangunan maka tidak terlepas dari sisi arsitektur. Apalagi terhadap bangunan kuno/ bersejarah yang memiliki sejarah ruang-arsitektur serta nilai historis-filosofis bangunan yang sangat besar. Karena adanya arsitektur inilah dapat memberikan bangunan kuno akan nilai seni yang sangat tinggi dan makna kultural masa lalu, yang tentu saja melekat pada bagian-bagian yang terdapat pada fisik bangunan kuno tersebut. Apakah sebenarnya arsitektur itu. Sampai saat ini masih banyak orang mempunyai berbagai macam ragam pandangan dan pengertian yang berbeda-beda tentang arsitektur. Batasan tentang arsitektur di antaranya yaitu : arsitektur adalah :1. Seni atau ilmu bangunan, termasuk perencanaan, konstruksi dan penyelesaian dekoratif; 2. Sifat karakter atau langgam bangunan; 3. Kegiatan atau proses membangun bangunan; 4. Bangunan-bangunan; dan 5. Sekelompok bangunan.⁶² Arsitektur yaitu suatu seni untuk mendesain bangunan sehingga mempunyai nilai keindahan/estetika.⁶³ Sedang menurut kamus umum Bahasa Indonesia, arsitektur diartikan sebagai gaya atau bentuk bangunan, seni dan ilmu merancang, serta

⁶² Antariksa, *Arsitektur dan Kebudayaanannya; Sebuah Telaah Filosofis*, 25 Agustus 2007 (sumber : <http://www.iai.com>, diakses tgl 1 Maret 2008).

⁶³ H.K Ishar, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1985, Hal. 75

membuat konstruksi bangunan, metode dan gaya suatu konstruksi bangunan. Menurut Prof. Eko Budihardjo, pada umumnya arsitektur didefinisikan sebagai seni penciptaan ruang dan bangunan untuk memberi wadah kepada kehidupan bersama.⁶⁴

C.1.a. Seni Untuk Arsitektur

Arsitektur merupakan hasil karya yang mempunyai seni dan keindahan dalam ungkapan fisiknya, sedangkan hubungan kita dengan objek arsitektural dirasakan sebagai komunikasi inderawi atas hasil karya tersebut. Arsitektur memberikan arti dan makna pada bentuk yang disandangnya, sedang keindahan terhimpun dalam keselarasan yang diungkapkan oleh lingkungan alam sekitarnya. Kalau kita kembali pada teori keindahan yang ada, berarti kembali pada teori "objektif" dan teori "subjektif".⁶⁵ Dalam teori objektif dikatakan bahwa keindahan atau ciri-ciri yang menciptakan nilai estetis adalah sifat (kualitas) yang memang telah melekat pada benda (hasil karya) indah yang bersangkutan, terlepas dari orang yang mengamatnya. Pada teori subjektif menyatakan bahwa ciri-ciri yang menciptakan keindahan pada suatu benda (hasil karya) sesungguhnya tidak ada, yang ada hanyalah tanggapan perasaan dalam diri seseorang yang mengamati benda tersebut. Dari kedua teori tadi dapat terlihat pula bagaimana keindahan suatu bangunan atau dengan kata lain keindahan arsitektur yang nyata. Pertama, nilai

⁶⁴ Eko Budihardjo, *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, Hal. 75.

⁶⁵ Antariksa, *Arsitektur Keindahan dan Seni*, 25 Agustus 2007 (sumber : <http://www.iai.com>, diakses tgl 1 Maret 2008).

keindahan itu dapat tercipta dengan terpenuhinya asas-asas tertentu mengenai bentuk pada karya arsitektur tersebut. Kedua, tergantung dari pencerapan pengamatan kita. Meskipun dinyatakan bahwa sesuatu karya arsitektur mempunyai nilai keindahan (*estetis*), hal ini dapat diartikan bahwa pengamatan kita memperoleh suatu pengalaman estetis sebagai tanggapan terhadap hasil karya (arsitektur).

Ada beberapa pengertian dan arti yang dapat kita jabarkan dalam membuat batasan keindahan ini, di antaranya adalah:

- a. Keindahan itu terdiri pada integrasi yang rasional dari proporsi semua bagian dari satu bangunan sedemikian, sehingga tiap bagian mempunyai empat ukuran dan bentuk yang absolut dan tidak ada kemungkinan untuk mengambil atau menambah dari bagian-bagian itu tanpa merusak dari keindahan tersebut.
- b. Keindahan adalah hasil daripada bentuk-bentuk yang indah yang berhubungan dan mendukung keseluruhan pada bagian komponen-komponen bangunan antara bagian komponennya, dan juga sebaliknya bagian akan mendukung bentuk satu keutuhan dari bangunan, dimana tiap bagian konstruksi akan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan tegaknya bangunan.

Demikian keindahan dalam arsitektur mempunyai hubungan erat dengan kemampuan manusia menilai karya arsitektur yang bersangkutan untuk menghargai keindahannya. Sebenarnya apa yang terkandung di dalam bentuk estetis terutama yang terkandung di dalam karya seni (arsitektur)

menurut DeWitt H. Parker dalam bukunya "The Principles of Aesthetics (1920)" memperinci *aesthetic form* menjadi enam asas adalah :⁶⁶

1. *The principle of organic unity* (asas kesatuan utuh). Asas ini diartikan bahwa setiap unsur dalam suatu karya seni adalah perlu bagi karya itu, dan karya tersebut tidak memuat unsur-unsur yang tidak perlu sebaliknya mengandung semua yang diperlukan.
2. *The principle of theme* (asas tema). Di dalam setiap karya seni terdapat satu atau beberapa ide induk atau peranan yang unggul berupa apa saja (bentuk, warna, pola irama, tokoh atau makna) yang menjadi titik pusat dari nilai keseluruhan karya tersebut.
3. *The principle of thematic variation* (asas variasi). Tema dari suatu karya seni haruslah mengumandangkannya. Agar tidak membosankan maka perlu adanya variasi.
4. *The principle of balance* (asas keseimbangan). Keseimbangan adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan atau bertentangan. Di dalam karya seni meskipun unsur-unsurnya nampak bertentangan tetapi sesungguhnya saling memerlukan karena bersama-sama menciptakan kebulatan.
5. *The principle of evolution* (asas perkembangan). Dengan asas ini dimaksudkan bahwa kesatuan dari proses pada bagian awal-awalnya menentukan bagian-bagian selanjutnya, dan bersama-sama menciptakan suatu makna yang menyeluruh.

⁶⁶ *Loc.cit.*

6. *The principle of hierarchy* (asas tata jenjang). Merupakan penyusunan khusus dari unsur-unsur dalam asas-asas tersebut.

Arsitektur selalu menampilkan aspek-aspek proporsi, keindahan, massa, ruang, warna, bidang, garis, kedalaman, kesatuan, tekstur, keamanan, kenyamanan dan sebagainya dalam pengembangannya. Kalau kita memahami seluruh aspek-aspeknya, pastilah arsitektur akan menyinggung seni bangunan karena menurut Hegel, "Arsitektur adalah *art* (seni) yang paling rendah karena arsitektur banyak menggunakan bahan, sedang yang paling tinggi adalah *poetry* karena *poetry immaterial*". Bahkan Schopenhauer mengatakan pula bahwa arsitektur adalah seni yang paling rendah, setingkat dengan seni mencangkul kebun, karena sangat dekat dengan hajat manusia. Seni lukis dan seni rupa datang berikutnya, kemudian lebih tinggi dari itu adalah seni sastra (puisi), dan menyusul seni drama, tragedi dan komedi. Demikianlah sebagian perumusan dari seni untuk seni, yang mencakup segala kegiatan manusia dalam menghasilkan sebuah karya. Meskipun arsitektur waktu itu masih dianggap sebagai seni, seorang arsitek dan teoritis dari Jerman Herman Sorgel mengatakan, bahwa arsitektur beda dengan seni yang lain, kemudian mencoba memberikan rumusan dan batasan sebagai berikut:

- a. Seni lukis adalah, seni bidang, berarti menggunakan dua dimensional.
- b. Seni patung (*sculpture*) adalah, seni ruang, tetapi hanya menggunakan tiga dimensi dan menekankan ruang (*conca*).

c. Arsitektur adalah, seni ruang tiga dimensi, tetapi menggunakan space dan menekankan ruang (*concafi*).

Arsitektur merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang berkaitan dengan bangunan dan penciptaan ruang untuk kegunaan manusia.⁶⁷

Sidharta mengutip teori paling kuno yang dikemukakan oleh Vitruvius, bahwa ada tiga aspek yang harus disintesiskan dalam arsitektur, yaitu *Firmitas* (kekuatan atau konstruksi), *Utilitas* (kegunaan atau fungsi), dan *Venustas* (keindahan atau estetika). A. Gordon kemudian menambahkan dengan kata-kata "*on time and at the right price*". Psikolog Frank Barron dan kawan-kawannya dari University of California, Berkeley, atas dasar hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa arsitektur mewakili domain profesi kreatif, praktisi yang berhasil adalah yang sekaligus juga seniman dan ilmuwan. Di sinilah letak uniknya arsitektur sebagai disiplin ilmu, yang harus merangkum tidak hanya teknologi tetapi juga seni. Manakala tugas ilmu adalah merumuskan hipotesis dan membuat teori baru, tugas teknologi memecahkan masalah teknis dan praktis secara elegan, efisien, dan ekonomis, maka tugas seni adalah menciptakan karya-karya yang kreatif dan orisinal. Sebagaimana halnya dengan karya sastra yang dituntut harus selalu kreatif dan inovatif, demikian pula arsitektur tidak boleh terpaku pada model tertentu saja karena dengan begitu maka kreativitas sudah langsung terpasung. Sedangkan karya arsitektur mesti memiliki keindahan dan sentuhan artistik

⁶⁷ Eko Budihardjo, *Jati Diri Arsitektur Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1991, Hal. 70.

yang kreatif yang diistilahkan Pugin dalam bukunya "*The True Principles of Architecture*", dengan *enrichment* dan *visual delight*.⁶⁸

C.1.b. Arsitektur Bukan Sekedar Bangunan

Mac Kinnon mengatakan dalam perancangan arsitektur yang kreatif, tersangkut di dalamnya pemecahan masalah yang spesifik, penyesuaian dengan situasi tertentu, evaluasi dan elaborasinya dengan pengamatan, penalaran dan penghayatan yang tuntas. Kalau kita membuat bentuk fisik, gaya bangunan atau model tanpa tahu apa fungsi bangunannya itu sama saja artinya dengan membuat sadel tanpa tahu kudanya, yang terwujud jadinya adalah hanya berpredikat bangunan saja bukan arsitektur. Dalam upaya menjabarkan wawasan identitas dalam wadah arsitektur yang harus ditemukan bukanlah model arsitektur baku melainkan panduan atau dasar perancangan (*basic design guides*) yang bisa dijadikan pegangan bagi segenap pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pembangunan lingkungan binaan. Beberapa patokannya antara lain :⁶⁹

- 1) perlu dicegah adanya instruksi yang terlalu tegar memaksakan suatu wadah/ bentuk fisik tertentu yang tunggal-rupa (monoton).
- 2) tempat, waktu, dan sikon yang berbeda mesti tercermin juga dalam penampilan arsitektonisnya.

⁶⁸ *Ibid.*, Hal. 71.

⁶⁹ *Ibid.*, Lihat Hal. 72-74.

- 3) perlu penelitian dan pengkajian ilmiah arsitektur lingkungan budaya setempat untuk bisa mencerap kaitan antara bentuk dengan fungsi, makna sosial, makna spiritual dan implikasi kulturalnya.
- 4) konservasi arsitektur tradisional dan lingkungan kuno bersejarah wajib mendapatkan porsi perhatian yang layak, sebagai sumber ilham dan khasanah warisan budaya yang memperkaya wajah lingkungan binaan.
- 5) perancangan rekayasa sedapat mungkin berwajah partisipatif, dalam arti mampu mengadopsi, mensublimasi, dan mengkreasi kembali wujud budaya fisik khas setempat termasuk hasil kerajinan hasil ukir, pahat, dengan bahan-bahan setempat berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja.

Suatu karya arsitektur sangat erat hubungannya dengan kebutuhan manusia, tidak hanya dari segi seni atau keindahan, tetapi juga yang terpenting adalah kebutuhan manusia atas keamanan dan kenyamanan, baik dari segi konstruksi, tata letak bangunan, efisiensi, maupun dari segi ekonomis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang arsitek diharapkan mampu untuk mewujudkannya karena seorang arsitek dianggap mempunyai kemampuan dan keahlian dalam seni merancang atau mendesain bangunan. Kemampuan merancang atau mendesain bangunan seorang arsitek didapat melalui suatu proses pendidikan, pelatihan, pengalaman, disiplin sehingga merupakan suatu kewajiban jika karya cipta seorang arsitek dihargai dan dilindungi karena untuk mewujudkan suatu bentuk desain yang mempunyai nilai seni perlu

adanya integrasi antara alam, manusia itu sendiri dan berpikir dalam lingkungan yang ideal sehingga dapat tercipta suatu komposisi yang harmonis. Dalam hal inilah penting suatu karya cipta arsitektur dihargai dan dilindungi secara yuridis.

C.1.c. Arsitektur Sebuah Bagan Kebudayaan

Koentjaraningrat memberikan batasan tentang wujud kebudayaan sebagai berikut:

1. Wujud kebudayaan sebagai satu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya;
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Maka arsitektur dapat diletakkan pada wujud kebudayaan sebagai benda fisik hasil karya manusia. Meskipun sebenarnya kalau kita urutkan arsitektur akan mencakup ketiga wujud kebudayaan tersebut di atas.

Pada bagian lain Herman Sorgel (1918), mengimplikasikan konsep pemikiran kebudayaan pada transformasi fisik perencanaan arsitektur, dan mencoba membedakan kebudayaan sebagai berikut:

1. Filosofi (filsafat), dihubungkan dengan jalan pikiran;
2. Kepercayaan, dihubungkan dengan jiwa; dan
3. Seni, dihubungkan dengan perasaan.

Arsitektur sebagai salah satu hasil karya budaya, dapat dijadikan petunjuk bagi perkembangan budaya suatu bangsa. Maka kebudayaan menyangkut sekelompok manusia yang memiliki susunan nilai-nilai dan kepercayaan tentang gambaran suatu dunia, yang mewujudkan sesuatu yang ideal.⁷⁰

Parmono Atmadi mengatakan, perkembangan arsitektur masa lampau yang tidak ditemukan keterangannya melalui tulisan yang otentik, hanya dapat ditelusuri melalui penelitian. Apakah itu berupa pengaruh kepercayaan, budaya ataupun politik, dan memang kalau kita lihat perkembangan arsitektur pada umumnya tercermin pada bangunan-bangunan peninggalan. Pada hakekatnya pembagian fungsi sudah dicanangkan waktu itu dan sudah digariskan sejak awal untuk dikagumi oleh pihak yang mengerti, karena arsitektur dan unsur-unsurnya selalu berkembang. Berkembang dalam perencanaan dan perancangan demikian juga pada fungsinya, dan akan mencakup bidang sosial-ekonomi, kebudayaan-seni dan kerekayasaan.

Pada dasarnya dalam ciptaan bangunan (arsitektur) mempunyai fungsi utama dan sekunder. Bukan berarti perbedaan ini mempunyai arti yang besar di dalam bangunan tersebut, tetapi kedua hal itu harus merupakan satu keseimbangan. Fungsi banyak memegang peran di dalam perkembangan arsitektur itu sendiri, oleh karena penilaian

⁷⁰ Lihat juga Eko Budihardho dalam "Identitas Budaya dan Arsitektur Tradisional", *Op.cit.*, Hal. 1-4.

arsitektural sering dan banyak dilakukan melalui fungsi arsitekturalnya. Di dalam perjalanan kedua fungsi ini dapat mengalami penambahan maupun pengurangan, dan hal itu memang biasa dalam perkembangan satu bentuk pada umumnya. Sebagai contoh suatu perubahan fungsi yang disebabkan pergantian generasi ke generasi berikutnya, maupun karena suatu perjalanan sejarahnya dapat dilihat sebagai berikut :⁷¹

1. a. Fungsi utama hilang, b. Fungsi sekunder tetap. Contohnya: peninggalan beberapa candi, fungsi utamanya sebagai tempat ibadah sudah hilang tetapi konotasi simbolik dari candi tersebut masih ada.
2. a. Fungsi utama tetap, b. Fungsi sekunder hilang. Contohnya: lampu antik, tidak lagi digunakan sebagai lampu minyak tetapi sebagai unsur estetik dalam ruang.
3. a. Fungsi utama hilang, b. Fungsi sekunder hilang. Contohnya: piramida, tidak lagi menjadi makam. Simbol astrologi dan geometrik sebagai konotasi efektifitas Mesir kuno sudah hilang tapi diganti dengan fungsi obyek turis.

C.2. Bangunan Kuno/ Bersejarah Sebagai Warisan Budaya Bangsa

Sebagaimana dalam dunia arsitektur kita memiliki berbagai macam bentuk rumah adat, bangunan kuno-bersejarah dan lain sebagainya dengan variasi budaya yang sangat menarik dan indah.

⁷¹ Antarksa, *Arsitektur dan Kebudayaanannya; Sebuah Telaah Filosofis*, 25 Agustus 2007 (sumber :<http://www.iai.com>, diakses tgl 1 Maret 2008).

Salah satunya adalah bangunan-bangunan kuno/bersejarah. Bangunan Kuno itu sendiri diartikan sebagai bangunan lama atau yang memiliki usia bangunan cukup tua. Menurut SK Walikota Daerah Tingkat II Semarang No. 646/50/1992, bangunan kuno/ bersejarah merupakan bangunan yang berumur lebih dari 50 tahun atau memiliki masa bangunan sedikit-sedikitnya berumur 50 tahun dan dikategorikan mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, atau *kesenian*. Tetapi sayangnya kita semua kurang dapat menghargai sehingga apa yang telah kita punya dan indah diasumsikan tidak indah dan tidak mau melindunginya. Pergeseran yang terus menerus terjadi ini mengakibatkan kita kehilangan identitas diri. Penghargaan terhadap peninggalan masa lalu tidak ada, akibatnya banyak kawasan ataupun bangunan lama atau kuno yang mempunyai nilai kesejarahan dibongkar dan didirikan bangunan baru dengan gaya yang sangat menakjubkan.

Saat ini bangunan-bangunan kuno di Indonesia menjadi sasaran utama dalam pengembangan fisik bangunannya. Cepat atau lambat, aset historis dan budaya yang dipunyai oleh bangunan-bangunan kuno yang ada di Indonesia akan tergeser oleh kepentingan ekonomi dan jasa konstruksi. Wajah fisik bangunan kuno akan berganti dengan bangunan baru dan megah, dengan struktur monumental sebagai lambang modernisasi yang dijadikan solusi dalam menghilangkan kenangan masa lalu. Di sini pembangunan kota dapat diartikan sebagai penghancuran brutal atas bangunan-bangunan kuno serta kawasan bersejarahnya.

Sebenarnya pada sisi yang lain kita dapat mempertahankan bentuk-bentuk bangunan kuno tanpa meninggalkan kaidah-kaidah arsitektur dan nilai seni atau keindahan yang ada. Tetapi kembali kepada bagaimana cara menjadikan kita semua bangga terhadap apa yang kita miliki sendiri sebagai sebuah warisan yang patut dilindungi.

Apabila ditelaah secara umum yang dimaksud dengan warisan adalah tinggalan yang sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kata pelestarian yang berarti *nguri-nguri* (dalam bahasa Jawa). Sehingga segala hal yang menuju kepada pelestarian adalah berupa warisan. Sementara warisan cagar budaya yang menyangkut kehidupan di kota, merupakan bidang yang sangat khas dan dikenal dengan istilah sebagai *heritage* atau *man built heritage*.⁷² Sebenarnya, warisan budaya merupakan bagian dari warisan manusia yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dilindungi. Karena adanya aspek kesejarahan dan nilai seni arsitektur yang tinggi inilah dapat memberikan bangunan dan kawasan akan nilai makna kultural masa lalu, yang tentu saja melekat pada bagian-bagian yang terdapat pada fisik bangunan dan kawasan itu sendiri. Hal ini menjadi penting untuk dipahami, karena hampir semua kota di Indonesia mempunyai peninggalan bangunan-kuno bersejarah atau kawasan yang mempunyai nilai sejarah arsitektur tinggi. Nilai seni dan identitas perlu dijadikan kriteria dalam mempertimbangkan objek

⁷² Naniek Widayati, *Strategi Pengembangan Warisan Budaya (Sebuah Pandangan Dari Sisi Arsitektur)*, Makalah dipresentasikan pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke V di BukitTinggi, tanggal 19-23 Oktober 2003, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Hal. 3.

peninggalan bangunan kuno yang akan dilindungi. Simbolisme identitas yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu di kawasan perkotaan dapat diproteksi sebagai bagian dari peninggalan sejarah masa lalunya. Perlu ada langkah kebijakan ke depan agar peninggalan kolonial yang masih ada dapat bertahan dengan bentuk dan karakter aslinya. Dengan membaca masa lalu dan memahami fungsi bangunan-kuno dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mempertahankan makna kultural-historis masyarakatnya. Bangunan-kuno bersejarah yang didirikan di pusat kota harus dilindungi dan dijadikan simbol atau lambang sejarah kehidupan masyarakat secara keseluruhan karena rentan terhadap perlakuan manusia.

Perubahan fungsi bangunan-bangunan kuno perlu tindakan untuk pencegahan dan pelestarian, agar bangunan-kuno tersebut dapat terjaga dengan baik karena bangunan-kuno merupakan ruang tempat aktivitas ekonomi yang dibangun didasarkan pada agenda perilaku dan budaya masyarakat. Dalam kerangka pelestarian warisan budaya dan sekaligus untuk mengembangkan potensi kewasannya perlu pendekatan yang mempertimbangkan beberapa faktor-faktor, di antaranya fungsional-ekonomis, diharapkan dapat memperoleh rekomendasi alih fungsi yang tepat dan mempunyai kelayakan ekonomis; dan konservasi-historis, diharapkan dapat memperoleh rekomendasi program alih fungsi dan pengembangan yang tetap bertumpu pada potensi historisnya.

Pada saat ini, usaha untuk mempertahankan bangunan-kuno di setiap kota di Indonesia diusik oleh rencana pembongkaran atau pengalihwujudan baik seluruhnya maupun sebagian dan pengalihfungsian bangunannya. Fenomena ini memberikan ancaman yang luas bagi sejarah ruang arsitektur serta nilai historis-filosofis bangunan dan kawasan tersebut dari kehancuran di masa mendatang. Kekhawatiran lain yang akan terjadi adalah adanya pergeseran pola ruang kawasan tempat bangunan-kuno berada ke kawasan urban modernis yang mematikan nuansa historis dan etnis-kultural sebagai ruang kehidupan bermasyarakat. Dinamika ini menjadikan banyak perdebatan, dimana akar sejarah bangunan-kuno sebagai entitas makna simbolik antara masyarakat dan sejarah kotanya dengan masa lalunya dan sekaligus cerminan bagi masa mendatang akan hilang. Sebagian besar masyarakat pun akhirnya merasakan bahwa membangun akan kecintaan pada negeri ini dengan mempertahankan budaya dan sejarah arsitektur masa lalu sudah tidak ada harganya.

Sehubungan dengan pelestarian ciptaan bangunan yang bernilai seni arsitektur sebagai warisan budaya berupa bangunan kuno/bersejarah, dalam kode etik arsitek, seorang arsitek juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dan harus turut berperan serta untuk melindungi baik menjaga maupun melestarikannya. Kewajiban dan tanggung jawab arsitek sebagai budayawan harus berupaya mengangkat nilai-nilai sosial budaya melalui karyanya dan tidak semata-

mata menggunakan pendekatan teknis. Arsitek berkewajiban berperan aktif dalam pelestarian bangunan dan atau kawasan bersejarah/ bernilai arsitektur tinggi. Arsitek berkewajiban meneliti secara cermat sebelum melakukan rencana peremajaan, pembongkaran bangunan maupun kawasan yang dinilai memiliki potensi yang perlu dilestarikan baik sebagian maupun seluruhnya. Arsitek berkewajiban memberikan saran-sarannya melalui Ikatan Arsitek Indonesia Cabang apabila mengetahui ada rencana perombakan, peremajaan, pembongkaran bangunan, atau kawasan yang perlu dilestarikan di daerahnya⁷³, sehingga dengan demikian diharapkan peremajaan, pembongkaran bangunan atau kawasan yang memiliki potensi untuk dilestarikan tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu pertimbangan yang benar dan tepat. Tentunya saja hal tersebut juga harus disertai dengan upaya perlindungan hukum (*legal protection*) termasuk bagaimana petunjuk operasional yang jelas, menyangkut jenis dan cara perlindungan kawasan dan lingkungan bangunan yang akan dijadikan objek pelestarian; sanksi hukum terhadap pelanggaran dan pemberian insentif bagi pelaku pelestarian (konservasi/preservasi) dalam hal ini pemilik bangunan; kompensasi bagi badan atau perorangan yang berniat melakukan pemugaran, konservasi maupun preservasi. Selain itu juga pengendalian desain mencakup pengendalian ketinggian bangunan, pengaturan pemunduran bangunan, pengaturan bahan bangunan baru, proporsi, ketinggian, dan

⁷³ Ikatan Arsitek Indonesia, *Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Keprofesian*, Majelis Arsitek IAI, Yogyakarta, 1992, Hal. 4.

pengaturan zoning yang akan dilestarikan. Dengan demikian, bangunan-kuno bersejarah sebagai salah satu warisan budaya secara jelas merumuskan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan dengan kalimat "*memayu hayuning bawana*". Artinya adalah, menjaga atau melindungi keselamatan dunia dalam melestarikan warisan budaya. Hal ini dipertegas lagi oleh para leluhur-leluhur kita, seperti diungkapkan, "*wewangan kang umure luwih saka paroning abad, haywa kongsi binabad, becik den mulyakna kadya wujud hawangun*", artinya bangunan dengan umur yang lebih dari 50 tahun merupakan bangunan sejarah dan budaya, dapat digunakan sebagai penelitian, menambah pengetahuan dan lain kebutuhan kemajuan serta bermanfaat sebagai tuntutan hidup.⁷⁴

D. Keterkaitan UU Hak Cipta dengan UU Benda Cagar Budaya Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Bangunan Kuno/Bersejarah

Untuk melihat suatu warisan budaya berupa bangunan kuno/bersejarah maka sangat penting diperhatikan bagaimana bangunan bersejarah tersebut mempunyai nilai seni arsitektur dan sejarah yang sangat tinggi. Apabila kita bertolak dari berbagai manfaat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat lampau yang terkandung dalam peninggalan sejarah bangunan maupun gedung kuno, maka suatu keharusan untuk

⁷⁴ Antariksa, *Bangunan Kuno Sebagai Warisan Budaya*, 2 Februari 2008 (sumber : [http : //www.iai.com](http://www.iai.com), diakses tgl 1 Maret 2008).

melindunginya baik terhadap pemilik bangunan sebagai pemegang hak cipta atas karya seni ciptaan bangunan kuno tersebut maupun obyek ciptaan bangunan kuno secara fisik yang mengandung nilai seni arsitektur yang sangat tinggi.

D.1. Rambu-Rambu Perlindungan Bangunan Kuno Melalui UUHC

Dalam UU Hak Cipta negara ditetapkan juga sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya termasuk di dalamnya bangunan-bangunan kuno/ bersejarah untuk mencegah obyek ciptaan dari ancaman kepunahan terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain. Ketentuan ini lebih diarahkan kepada jaminan secara yuridis untuk memberikan perlindungan hukum dari sisi seni (*art*) terhadap kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta maupun obyek ciptaan tersebut. Oleh karena itu negara memberikan batasan-batasan terhadap perlindungan karya ciptaan bangunan kuno sebagai seni arsitektur.

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 bangunan kuno/bersejarah merupakan karya arsitektur yang dilindungi oleh negara, baik dengan cara menguasai bangunan kuno/bersejarah, maupun sebagai pemegang hak cipta atas bangunan kuno/bersejarah tersebut karena ciptaan bangunan kuno/bersejarah mengandung seni gambar bangunan atau suatu nilai seni arsitektur yang khas dan unik dengan beragam gaya arsitektur yang

indah dan berkualitas seni tinggi. Oleh karena itu menurut Pasal 10 ayat (1) UUHC 2002, dalam hal negara ditetapkan sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya maka obyek ciptaan bangunan kuno yang tidak diketahui siapa penciptanya atau pemiliknya otomatis hak ciptanya dikuasai atau dipegang oleh negara sehingga tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, atau bahkan mengalihwujudkan sembarangan tanpa izin pemegang hak cipta yaitu negara. Ketentuan ini lebih diarahkan pada perlindungan terhadap objek hak cipta yang dimaksud yaitu karya ciptaan bangunan kuno/ bersejarah dari ancaman kepunahan, terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain. Selain itu menurut Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta 2002, hak cipta merupakan *hak eksklusif* bagi *pencipta* atau *pemegang hak cipta* untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala tindakan mengumumkan atau memperbanyak yaitu mengalihwujudkan, menjual, atau menyewakan ciptaan bangunan kuno/ bersejarah tanpa izin pemegang hak cipta yaitu negara atau pemilik bangunan kuno merupakan pelanggaran terhadap UUHC. Kemudian menurut Pasal 3 ayat (3) UUHC, hak cipta tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab lain sesuai dengan UU.

Pembatasan menurut Pasal 15 huruf f UU Hak Cipta 2002 juga ditentukan bahwa perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan bukan merupakan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta. Sehingga perubahan secara keseluruhan maupun bagian substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer terhadap karya seni arsitektur ciptaan bangunan kuno hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis. Kemudian dalam Pasal 72 UU Hak Cipta memberikan sanksi pidana untuk pelanggaran yang pada pokoknya berkisar pada pelaksanaan hak ekonomi (*economic rights*) tanpa izin atau tanpa persetujuan pencipta yaitu pelanggaran terhadap hak eksklusif.

D.2. Rambu-Rambu Perlindungan Bangunan Kuno Melalui UUBCB

Selain itu untuk perlindungan terhadap bangunan kuno/ bersejarah sebagai bagian warisan budaya bangsa juga tidak terlepas dari aspek pelestarian. Oleh karena itu tidak cukup apabila hanya diakomodir oleh ketentuan dari UU Hak Cipta saja. Apabila dilihat dalam kerangka pelestarian warisan budaya terhadap perlindungan bangunan kuno yang merupakan salah satu obyek benda cagar budaya maka di sinilah diperlukan suatu *legal protection* yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, selanjutnya disebut UUBCB yang mengatur perlindungan benda-benda cagar

budaya secara luas baik pengaturan bagi penguasaan pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya. Bangunan kuno/ bersejarah di sini merupakan salah satu obyek benda cagar budaya karena menurut Pasal 1 ayat (1) UUBCB pengertian benda cagar budaya adalah :

"benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan."

Oleh karena itu bangunan kuno menjadi obyek yang sama-sama dilindungi oleh UU Hak Cipta dan UUBenda Cagar Budaya.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang RI nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan bahwa benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional, serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa dan sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya, maka demi pelestarian budaya bangsa benda cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan, untuk keperluan ini benda cagar budaya perlu dikuasai oleh negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa upaya melestarikan benda cagar budaya dilaksanakan selain untuk memupuk rasa kebanggaan

nasional dan memperkuat jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional.

Dalam kerangka pelestarian benda cagar budaya khususnya karya ciptaan bangunan kuno/ bersejarah semata-mata bukan hanya keindahan dari seni atau nilai arsitektur bangunannya saja tetapi yang juga nilai historis atau informasi yang terkandung di dalamnya karena bangunan-bangunan tersebut merupakan kesinambungan atau penghubung masa lalu dan saat ini yang dapat memberikan informasi-informasi yang penting tentang masa lalu bagi masyarakat saat ini.

Sejalan dengan perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta pula maka penguasaan oleh negara terhadap bangunan-bangunan kuno sebagai benda cagar budaya termuat dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya No. 5 Tahun 1992, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa negara menguasai semua benda cagar budaya dan dalam Pasal 5 ayat (1) UUBCB bahwa dalam rangka penguasaan tersebut benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah, dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan, dinyatakan milik negara. Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 3 ayat (1), menetapkan bahwa benda cagar budaya yang harus

dimiliki oleh negara ditentukan tidak semata-mata dilihat dari wujud atau bentuk suatu bendanya, tetapi ditentukan oleh tingginya nilai budaya dan sejarah bangsa, kelangkaan dan/atau terbatasnya jumlah setiap jenisnya, dan mempunyai ciri khas yang mewakili zamannya.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan dalam rangka pelestarian terhadap benda-benda cagar budaya dan sejalan dengan ketentuan UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) juga menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta tersebut menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara itu berlaku tanpa batas waktu. Namun menurut Pasal 6 ayat (1) UUBCB, benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU Benda Cagar Budaya. Kemudian juga dalam Pasal 6 ayat (2) UUBCB, benda cagar budaya dapat dimiliki atau dikuasai orang karena dimiliki atau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan. Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 3 ayat (1), menetapkan bahwa benda cagar budaya yang harus dimiliki oleh negara ditentukan tidak semata-mata dilihat dari wujud atau bentuk suatu bendanya, tetapi ditentukan oleh tingginya nilai budaya

dan sejarah bangsa, kelangkaan dan/atau terbatasnya jumlah setiap jenisnya, dan mempunyai ciri khas yang mewakili zamannya.

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dijelaskan bahwa untuk pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak mengurangi kewajiban untuk tetap tunduk kepada ketentuan tentang Hak Cipta. Menurut UUHC, penggandaan termasuk perbanyakan merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Mengenai perubahan atas ciptaan bangunan dalam ketentuan UU Hak Cipta Pasal 15 huruf f hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis atas ciptaan bangunan. Dalam ketentuan UU Benda Cagar Budaya Pasal 13 ayat (2) perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 26 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1993 atas Pelaksanaan UU Benda Cagar Budaya, prinsip pelestarian benda cagar budaya meliputi aspek keaslian bentuk, bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak untuk mempertahankan nilai sejarah dan budayanya. Menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya juga, Pasal 15 ayat (2) huruf d dinyatakan bahwa mengubah bentuk dan/atau

warna serta memugar benda cagar budaya dilarang tanpa izin dari Pemerintah. Selain itu dijelaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (2) PP tersebut pemugaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat strukturnya bila diperlukan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Pemugaran meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Pembatasan mengenai rambu-rambu pengaturan perlindungan terhadap ciptaan bangunan kuno pada UUHC maupun UUBCB dapat dituangkan melalui matriks di bawah ini :

| UU Hak Cipta | UU Benda Cagar Budaya |
|---|--|
| <p>Siapa yang Berhak</p> <p>Pencipta atau pemegang hak sebagai pemilik hak eksklusif (Ps.2 ay.(1))</p> <p>Tidak diketahui penciptanya maka dialihkan pada negara (Ps. 10 ay. (1))</p> <p>Hak cipta dapat dialihkan karena waris, hibah, wasiat, perjanjian, sebab lain sesuai UU (Ps. 3 ay. (3))</p> | <p>Siapa yang Berhak</p> <p>Semua benda cagar budaya dikuasai oleh negara (Ps. 4 ay. (1))</p> <p>Tetapi dapat dimiliki atau dikuasai oleh orang dengan memperhatikan fungsi sosial & tidak bertentangan UU (Ps. 6 ay. (1))</p> <p>Dapat dimiliki atau dikuasai turun-temurun karena merupakan warisan (Ps. 6 ay. (2))</p> |
| <p>Obyek yang dilindungi</p> <p>Arsitektur yang meliputi seni</p> | <p>Obyek yang dilindungi</p> <p>Setiap orang yang memiliki atau</p> |

| | |
|--|---|
| <p><i>gambar bangunan</i>, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan (Ps. 12 ay (1) huruf g)</p> | <p>menguasai <i>benda cagar budaya</i> wajib melindungi dan memeliharanya (Ps. 13 ay. (1))</p> |
| <p>Pengalihwujudan/Perubahan</p> <p>Dapat dilakukan perubahan terhadap karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis (Ps. 15 huruf f)</p> | <p>Pengalihwujudan/Perubahan</p> <p>Dapat mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya harus seizin pemerintah (Ps. 15 ay. (1))</p> <p>Dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah & keaslian bentuk serta pengamanannya (Ps. 13 ay (2))</p> |
| <p>Sanksi Pidana</p> <p>Terhadap perubahan karya arsitektur bangunan kuno/bersejarah tidak ada penyebutan ancaman sanksi pidana secara langsung. Namun apabila sengaja tanpa hak melanggar hak eksklusif yang dipegang oleh negara dipidana penjara min 1 bl dan/atau denda min 1 juta rupiah atau pidana penjara max 7 th dan/atau denda max 5 miliar rupiah (Ps. 72 ayat (1))</p> | <p>Sanksi Pidana</p> <p>Mengubah bentuk dan/atau warna, memugar tanpa izin Pemerintah dipidana penjara max 10 th dan/atau denda max 100jt rupiah (Ps.26)</p> |

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

A.1. Ketentuan Substantif Mengenai Perlindungan Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang

A.1.1. Profil Kota Semarang

Sebelum Belanda (VOC) masuk ke Semarang tahun 1646 dan menguasai muara Kali Semarang, sudah banyak permukiman (kampung) yang didirikan oleh penduduk Jawa asli maupun orang-orang Melayu, Cina, India, Banjar, dan sebagainya, yang dipelopori oleh Ki Ageng Pandanaran sebagai pendiri Kota Semarang pada abad ke-15 (tahun 1400-an) di sekitar wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kampung Melayu. Pada tahun 1547, Ki Ageng Pandanaran II, memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Bubakan. Sejak saat itu kawasan sekitar Bubakan mengalami perkembangan yang pesat menjadi pusat kota Semarang. Arti dari kata *bubakan* itu sendiri adalah *pembukaan lahan yang dipergunakan untuk permukiman*. Permukiman itu sekarang tumbuh dan menjadi Pekojan yang merupakan awal terbentuknya permukiman kampung kota di Semarang. Semarang berasal dari bahasa *Jawa* yaitu *asem arang* yang artinya pohon asam yang tumbuh jarang-jarang. Kemudian Ki Ageng Pandanaran II dinobatkan menjadi Bupati Semarang

pada tanggal 12 Rabiulawal 954 H atau 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kota Semarang.

Dalam peta Semarang tahun 1695 dapat dilihat bahwa daratan di muara Kali Semarang telah dipergunakan untuk permukiman bangsa pribumi, Melayu, Cina, dan Belanda. Kemudian VOC masuk ke Semarang pada awal abad ke-18. VOC membangun Kota Benteng de Europeesche Buurt (1708-1824). Pada masa ini area disekelilingnya berkembang menjadi kelompok-kelompok permukiman. Benteng diposisikan sebagai pusat kota dan permukiman Belanda. Permukiman non Belanda menjadi hinterlandnya dilengkapi dengan fasilitas sosial dan ekonomi seperti jalan, pasar, dan tempat ibadah. Menurut Yohannes Widodo (1988) pertumbuhan morfologi Semarang dimulai dari tiga elemen kota yang meliputi : pos dagang VOC, kampung komunitas Tionghoa, dan kampung bumiputera.

Setelah VOC bubar, pengalihan kekuasaan oleh pemerintahan Kerajaan Belanda diwakili oleh Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Tahun 1811 Hindia Belanda sempat jatuh ke tangan Inggris meski tidak lama, namun pengaruhnya cukup besar terhadap perkembangan Kota Semarang. Inggris melakukan penjualan dan penyewaan tanah-tanah kepada swasta sehingga muncullah tanah swasta (*particuliere-landrijen*). Pada masa itulah kemudian muncul beberapa kampung milik bumiputera seperti Pederesan, bubutan, Jagalan, dan Kulitan.

Dalam buku Semarang dari Masa ke Masa (1989) diceritakan bahwa sampai pertengahan abad ke XVIII jumlah penduduk Semarang dan aktivitas perdagangan di kota Benteng makin bertambah sehingga dilakukan perluasan permukiman masyarakat Belanda keluar dari Benteng. Benteng dibongkar tahun 1824. Perluasan permukiman diantaranya ditujukan ke arah kawasan Bulu (dengan pendirian pusat kota baru di kawasan permukiman Bodjong-Randoesari) dan ke arah Jalan Raden Patah (Karangdoro/ Widosari) yang diberi nama *Nieuw Holland* (Belanda Baru) dengan memanfaatkan permukiman Cina untuk mendirikan villa-villa Belanda dan melengkapi fasilitas kota.

Pada pertengahan abad ke XIX Kota Semarang telah dipenuhi oleh bangunan berarsitektur Eropa. Sedangkan permukiman bumiputera, Cina, Arab, dan Melayu masih terdiri dari permukiman sederhana. Pertengahan tahun 1880 perkembangan kota terus berlanjut dengan banyaknya tumbuh jalur transportasi yang diikuti pertumbuhan permukiman seperti kawasan Kaligawe dan jalan Mataram. Jalan Mataram merupakan poros utama jalan yang menghubungkan Semarang dengan *Vorstenlanden* (daerah kerajaan) Mataram di Yogyakarta.

Pada masa Pemerintahan Kotapraja (Gementee van Semarang 1906 s.d 1942) Semarang makin berkembang dengan pola kota baru. Penyediaan fasilitas kota yang lebih modern mulai dari lalu lintas hingga perumahan dan sanitasi lingkungan mulai diperhatikan. Hingga akhirnya

masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pada tahun 1945), Semarang menjadi Kotamadya dipimpin oleh seorang Walikota dan dijadikan Ibukota Propinsi Jawa Tengah.

Secara geografis Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'-7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'-110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Letak Kota Semarang hampir berada di tengah bentangan panjang kepulauan Indonesia dari arah Barat dan Timur. Sedangkan ketinggian Kota Semarang terletak antara 1,75-348,00 meter di atas garis pantai dan secara umum kemiringan tanah berkisar antara 0% sampai 40% (curam).

Topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan yang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah, dan daerah pantai. Daerah pantai 65,22% di wilayahnya dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%.

Kota Semarang mempunyai ketinggian sekitar 0,75-384 meter diatas permukaan laut (MDPL), pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90348 meter di atas permukaan laut (MDPL) yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,753,5 MDPL. Bagian utara Kota Semarang merupakan daerah pantai dan dataran rendah yang dikenal dengan Kota Bawah, sedangkan bagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dan

daerah perbukitan yang biasa dikenal dengan Semarang Atas atau Kota Atas.

Keadaan ini membuat Kota Semarang memiliki daya tarik tersendiri, jika kita berada di Kota Atas pada malam hari maka kita akan menyaksikan keindahan panorama kota bawah yang pada malam hari akan terlihat gemerlap oleh lampu-lampu di pusat kota, demikian juga sebaliknya, jika kita berada di Kota Bawah kita dapat menyaksikan indahnya panorama Kota Atas dengan tebaran rumah di kaki gunung dan gemerlap lampu yang menerangi kaki gunung di malam hari.

Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II Stasiun Klimatologi Semarang, Kota Semarang seperti kota lainnya di Jawa Tengah memiliki suhu udara sekitar rata-rata 27,5°C dan tertinggi berkisar 31,8°C, dengan kelembaban udara rata-rata 79% dan beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun.

Sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administratif yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, dengan garis pantai 13,5 Km, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal. Selain itu, Kota Semarang sebagai ibukota provinsi memiliki letak yang sangat strategis karena diapit oleh beberapa kota besar seperti Jakarta

dan Bandung di sebelah Barat, Surabaya dan Malang di sebelah Timur, serta Jogjakarta dan Solo di sebelah Selatan.

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950 Kota Semarang menjadi Kotapraja di Propinsi Jawa Tengah, kemudian pada tahun 1992 wilayah Kota Semarang mengalami penataan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan. Kota Semarang mempunyai luas wilayah 373,70 Km² yang secara administratif terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen (57,55 Km²) diikuti oleh Kecamatan Gunungpati (52,63 Km²) dan Kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Tengah (5,14 Km²).

Bergulirnya era reformasi sejak tahun 1998 yang menandai berakhirnya orde baru melahirkan penataan-penataan baru seperti ditetapkan Otonomi Daerah pada tahun 2000. Otonomi Daerah tersebut dapat mengoptimalkan semua aset yang dimiliki untuk kesejahteraan seluruh warga kota karena daerah atau kota diberi wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sehingga daerah mempunyai hak untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna kepentingan pembangunan daerahnya.

Kota Semarang dalam pembangunannya memiliki visi yaitu Semarang Kota Metropolitan yang Religius Berbasis Perdagangan dan Jasa, yang mengandung makna bahwa selama lima tahun kedepan

merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki tiga kunci pokok yakni, Kota Metropolitan yang mengandung arti bahwa Kota Semarang mempunyai sarana dan prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota, Religius mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini akan kebenaran ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya. Sedangkan Perdagangan dan Jasa merupakan basis aktivitas ekonomi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam jangka waktu lima tahun kedepan dapat terwujud Kota Semarang yang memiliki sarana dan prasarana kota berskala metropolitan, dengan ekonomi utama yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, serta tepat memperhatikan keberadaan potensi ekonomi lokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius serta guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Kota Semarang periode 2005-2010 tersebut, maka dijabarkan dalam 6 misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Semarang, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi

masyarakat miskin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang berbasis teknologi;
3. Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif, melalui upaya penegakan hukum dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin serta menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan berinvestasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional, dan internasional;
5. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran pemuda;
6. Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang

serasi, lestari, dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

A.1.2. Inventarisasi Peraturan Hukum Mengenai Perlindungan Bangunan Kuno/Bersejarah

Dalam rangka perlindungan ciptaan bangunan kuno/ bersejarah yang tersebar di wilayah Kota Semarang, pada dasarnya telah ditetapkan inventarisasi perangkat peraturan mengenai perlindungan bangunan kuno/bersejarah, yaitu :

- a. UU No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan kemudian juga ditetapkan PP No.10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam ketentuan UU BCB Pasal 13 ayat (2) perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 26 ayat (2) PP No. 10 /1993, prinsip pelestarian benda cagar budaya meliputi aspek keaslian bentuk, bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak untuk mempertahankan nilai sejarah dan budayanya. Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf d UU BCB, dinyatakan bahwa mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya dilarang tanpa izin dari Pemerintah. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) PP 10/1993 bahwa :

Pemugaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat strukturnya bila diperlukan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya.

Pemugaran meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi. Kemudian bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas diancam dengan pidana penjara dan/ atau denda yang diatur dalam Pasal 26 UUBCB. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1) PP 10 Tahun 1993 dijelaskan bahwa untuk pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak mengurangi kewajiban untuk tetap tunduk kepada ketentuan tentang Hak Cipta yaitu UU No. 19 Tahun 2002.

- b. Menurut UUHC, penggandaan tanpa seizin pemegang hak cipta, termasuk perbanyakannya merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Mengenai perubahan atas ciptaan bangunan dalam ketentuan Pasal 15 huruf f UUHC 2002 hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis atas ciptaan bangunan.

Kemudian menurut Pasal 10 ayat (1) UUHC 2002, negara memegang hak cipta terhadap benda-benda peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam rangka menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi baik informasi maupun arsitektur dan rekayasa sehingga diperlukan adanya penerapan yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang telah ada, khususnya nilai-nilai kontekstual, tradisional, spesifik, dan bersejarah. Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan, penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dan pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/ atau karakter cagar budaya yang dikandungnya, serta perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar

budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/ atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (29) dan (30) PP No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa,

Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya dan pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan gedung tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

- d. Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 646/50/Tahun 1992 tentang Konservasi Bangunan-bangunan Kuno/ Bersejarah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang meliputi kategori bangunan yang dilindungi sebagai bangunan kuno/bersejarah dan prinsip konservasinya. Pemerintah Kota Semarang sebenarnya telah lebih dahulu membuat perangkat peraturan sebagai wadah untuk memberikan perlindungan terhadap bangunan-bangunan kuno/ bersejarah yang ada di Kota Semarang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 646/50/Tahun 1992 tentang Konservasi Bangunan-bangunan Kuno/ Bersejarah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 4 Februari 1992. Namun

penerbitan SK Wali Kota No 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-bangunan Kuno dan Bersejarah di Kota Semarang tersebut masih prematur karena SK Wali Kota itu dibuat sebelum Undang-undang Benda Cagar Budaya No 5/1992 diterbitkan tanggal 21 Maret 1992. Jadi selangkah lebih maju, karena pada saat itu belum ada payung hukum yang dapat melindungi bangunan kuno bersejarah.

- e. Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama sehubungan dengan perlindungan bangunan kuno/bersejarah yang terfokus di kawasan Kota Lama Semarang karena merupakan warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan, dan budaya yang tinggi. Menurut Pasal 4 huruf a Perda RTBL Kawasan Kota Lama No. 16 Tahun 2003 bertujuan untuk melindungi kekayaan historik dan budaya di kawasan Kota Lama baik yang berupa bangunan kuno bersejarah maupun bentuk kota yang ada. Adapun prinsip konservasi bangunan berdasarkan Pasal 38 Perda RTBL Kawasan Kota Lama tersebut dilaksanakan dengan cara preservasi, restorasi, rehabilitasi, adaptasi, atau rekonstruksi.⁷⁵ Selain itu rambu-

⁷⁵ Yang dimaksud dengan preservasi adalah bagian dari konservasi yang berupa pemeliharaan dan pencegahan suatu tempat atau bangunan dari perubahan atau kehancuran agar tetap sesuai dengan keadaan aslinya. Restorasi adalah bagian dari konservasi yang berupa pengembalian kondisi fisik bangunan keaslinya dengan cara memasang kembali unsur-unsur yang hilang tanpa menggunakan bahan baru atau dengan membuang unsur-unsur baru. Rehabilitasi adalah bagian dari konservasi yang berupa perbaikan dan pengembalian kondisi bangunan yang rusak atau menurun dengan menjaga nilai historisnya sehingga dapat berfungsi kembali. Adaptasi adalah bagian dari konservasi yang berupa perubahan sebagian kecil bangunan atau tempat-tempat agar

rambu perlindungan terhadap bangunan kuno bersejarah tersebut meliputi :
Tata letak bangunan harus dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya (Pasal 41); Dinding muka dan atau fasade bangunan kuno harus dipertahankan sesuai kondisi aslinya (Pasal 42); (1) Elemen dan ornamen asli bangunan harus dipertahankan, (2) Elemen dan ornamen tambahan yang tidak memperhatikan makna bangunan bersejarah harus dilepas / dihilangkan (Pasal 43); (1) Warna asli yang digunakan pada bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah harus dipertahankan, (2) Warna pada bangunan kuno yang tidak memiliki nilai sejarah dapat disesuaikan dengan fungsi dan harus kontekstual (Pasal 44).

A.2. Pengalihfungsian Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang

A.2.1. Dokumentasi Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang

Pada masa kolonialisme Belanda, Kota Semarang mengalami perkembangan cukup pesat. Belanda membangun berbagai fasilitas guna kepentingannya berupa sarana dan prasarana diantaranya yaitu jalan, transportasi kereta api, bangunan-bangunan peribadatan, pasar dan lain sebagainya. Berbagai bangunan kuno peninggalan sejarah perkembangan Kota Semarang sampai saat ini masih banyak dapat dijumpai melalui bangunan-bangunan berarsitektur Eropa maupun permukiman-permukiman yang tersebar di berbagai penjuru kota yang

dapat digunakan untuk fungsi baru yang lebih diperlukan. Rekonstruksi adalah bagian dari konservasi yang berupa pengembalian suatu tempat atau bangunan semirip mungkin dengan aslinya dengan menggunakan bahan baru yang telah diteliti. Lihat Pasal 1 Perda RTBL Kawasan Kota Lama No. 16 Tahun 2003.

merupakan warisan budaya sebagai aset bagi bangsa Indonesia, yang harus dilestarikan sebagai hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang istimewa. Sejarah kota ini seyogyanya dapat ditunjukkan terus secara fisik dan visual melalui peninggalan-peninggalan bangunan kuno bersejarah yang masih terdapat di Semarang. Dalam SK Walikota Semarang No.646/50/Tahun 1992 terdapat 101 buah bangunan yang dilindungi, diantaranya adalah : Lawang Sewu, Stasiun Tawang, Stasiun Poncol, Gereja Blenduk, Pasar Johar, Gedung Marba, Gerbang Jawatan Kodam VII (sudah dibongkar), Gedung Marabunta (sudah dirubah), Pol.Wil.Jl. Pemuda (sudah dibongkar), Gedung GRIS di Jl. Bodjong (sudah dibongkar), Hotel Jansen Jl. Letjen Soeprapto (sudah dibongkar), dan masih banyak lagi bangunan-bangunan kuno lainnya sebagaimana terlampir dalam SK tersebut.⁷⁶ Kemudian berdasarkan inventarisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang pada tahun 2006 terdapat 290 bangunan yang termasuk bangunan kuno/bersejarah, contohnya Toko Cendrawasih (eks Sasana Suka) di Jl. Pemuda yang terancam dibongkar. Gedung Marabunta, Kantor Mega Eltra, Kantor Maskapai Asuransi Indonesia, Rumah Tinggal (ex Taslamet) di Kp. Kulitan No. 318 dan Rumah Tinggal di Jl. Soegijapranata 49 yang sudah mulai rusak dan tidak dihuni.

⁷⁶ Endang Riwayati, Kasie Muskala (Museum dan Purbakala), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, *Hasil Wawancara*, Tanggal 02 Mei 2008.

Jumlah bangunan kuno/bersejarah yang ada di Kota Semarang dengan kondisi bangunan sebagai berikut adalah :⁷⁷

Tabel 1. Kondisi dan Jumlah Bangunan Kuno Di Kota Semarang

| Kondisi Bangunan Kuno/bersejarah | Jumlah | Persentase |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Sangat Baik | 27 | 9,3 % |
| Baik | 199 | 68,6 % |
| Cukup Baik | 30 | 10,4 % |
| Kurang Baik | 1 | 0,3 % |
| Kurang Terawat | 12 | 4,2 % |
| Tidak Terawat | 15 | 5,2 % |
| Rusak | 5 | 1,7 % |
| Terancam dibongkar | 1 | 0,3 % |
| Total | 290 | 100 % |

**Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Tahun 2006**

A.2.2. Profil Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang

a. Stasiun Tawang

⁷⁷ Nik Sutiyan, Kasudin Energi dan Pertambangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang, *Hasil Wawancara* , Tanggal 06 Mei 2008.

Gambar 1. Stasiun Tawang



Sumber : www.semarang.go.id

Pemilik : Perumka sekarang PT. KAI (Kereta Api Indonesia)

Tanggal Pembangunan : Selesai Mei 1914

Penggunaan: Semula Stasiun Kereta Api N.I.S. (Nederlandsche Indische Spoorweg Maatschappij), sekarang Stasiun Kereta Api Perumka

Kedadaan : Baik

Deskripsi : Bangunan tunggal setangkup dengan bentuk memanjang dari timur ke barat. Orientasi bangunan ke selatan. Jumlah trafe 21 buah. Bangunan ini terdiri dari 1 bangunan utama setinggi bangunan lantai dan kiri-kanannya terdapat bangunan sayap tidak bertingkat. Pondasi bangunan dari batu dan struktur dari batu bata. Dinding dari batu bata yang

diselesaikan dengan plester dan dicat. Bagian kaki bangunan diselesaikan dengan batu kali. Atap bangunan utama berbentuk limasan dengan cupola di atasnya yang ditutup dengan atap limasan dengan kuda-kuda mansard. Selebihnya bangunan ditutup dengan atap pelana dengan atap loteng sebagai lubang ventilasi di beberapa tempat. Bahan penutup atap genting. Listplank terdedah sehingga memberikan efek bayangan yang indah. Serambi bangunan utama terbentuk dari penonjolan keluar dan dibatasi oleh kolom-kolom kokoh yang dihubungkan di atasnya dengan lengkung latei. Serambi bangunan sayap kiri dan kanan bangunan terjadi karena bangunan yang menjorok ke dalam. Atap menyatu dengan atap bangunan dan didukung oleh tiang-tiang besi. Bangunan utama kelihatan sebagai bangunan bertingkat, meskipun sebenarnya tidak demikian. Pada bagian atas terdapat jendela dengan pediment lengkung, jendela terbagi atas empat persegipanjang yang lebih kecil, khas Belanda. Tingkap peranganin terdapat di atas deretan jendela dan dipertegas dengan garis mendatar berwarna merah bata (tile). Tingkap oni mengelilingi bangunan utama. Pintu

mempunyai ambang atas melengkung, dihiasi dengan susunan bata rollag. Pada bangunan sayap kiri dan kanan terdapat pintu yang berjajar. Stasiun Tawang ini mempunyai halaman yang sangat luas di bagian depan yang berfungsi sebagai tempat parkir.

Sejarah : Stasiun Tawang merupakan pengganti stasiun Tambak Sari milik N.I.S. yang pertama. Adapun pembangunan stasiun pertama tersebut ditandai dengan upacara pencangkulan tanah oleh Gubernur Jenderal Mr. Baron Sloet van de Beele, bersamaan dengan pembukaan sistem perangkutan kereta api milik N.I.S. pada tanggal 16 Juni 1864. N.I.S. melayani jalur Semarang-Yogyakarta-Solo. Setelah mengalami proses pembangunan yang tersendat-sendat akhirnya jalur pelayanan kereta api ini terselesaikan pada 10 Februari 1870. Berkembangnya kegiatan perdagangan yang menyebabkan stasiun Tambak Sari tidak memenuhi syarat lagi, maka direncanakanlah stasiun yang baru dengan arsitek *J.P. de Bordes*. Setelah kemerdekaan RI, stasiun ini diambil alih oleh Pemda Kotamadya Semarang dan diganti dengan nama Perusahaan Jawatan Stasiun Kereta Api Tawang (PJKA). Tidak banyak perubahan

yang dilakukan pada stasiun ini terutama pada bagian facade dan sampai sekarang masih terawat dengan baik. Lapangan di depan stasiun Tawang juga mempunyai nilai historis yang tinggi yaitu sebagai ruang terbuka dari Kota Lama yang difungsikan sebagai tempat upacara, olahraga, pertandingan dan sebagainya.

Arti Penting : Stasiun Tawang merupakan tetenger yang penting bagi Kawasan Kota Lama. Pada jaman masa lalu terdapat sumbu visual yang menghubungkan stasiun ini dengan Gereja Protestan (Blenduk). Sehingga peran stasiun ini dalam pembentukan citra kawasan sangat penting dan mampu menambah nilai kawasan. Integritas langgam arsitektur Indische sangat kuat dan banyak terpengaruh unsur lokal. Integritas kekriyaan ditampilkan dalam detail bermotif dan berwarna. Integritas setting masih tetap seperti semula. Sedangkan integritas bangunan merupakan ruang kantor. Integritas kesinambungan fungsi yaitu sebagai bangunan perangkutan masih terjaga dengan baik. Kaitan bangunan dengan sejarah yaitu pembangunannya ditujukan untuk menggantikan stasiun Tambak Sari di Pengapon, dengan perancang

adalah J.P. Bordes. Selain itu kaitan bangunan dengan sejarah perangkutan milik N.I.S. tidak kecil. Arsitekturnya unik, dengan ciri arsitektur Indische yang tanggap terhadap kondisi iklim setempat. Keunikan lain yang menonjol adalah pemakaian bahan untuk elemen dinding yang bermotif dan berwarna menjadikan bangunan ini sangat estetis. Dilihat dari segi lansekap kota, Stasiun Tawang menambah kualitas dan potensi dari ruang terbuka di kawasan tersebut. Bangunan stasiun ini merupakan satu-satunya yang dibangun di Semarang.

b. Gereja Blenduk

Gambar 2. Gereja Immanuel (Gereja Blenduk)



Sumber : Dokumentasi Penulis, 23 Juli 2008

Lokasi : Jl. Letjen Soeprapto 32 Semarang

Pemilik : Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB)

Tanggal Pembangunan : 1753 perbaikan 1894

Penggunaan : Semula Gereja, sekarang Gereja

Keadaan : Baik

Deskripsi : Denah gereja delapan dengan teras entrance di bagian Selatan. Teras (portico) Blenduk terdiri dari empat kolom bulat bergaya dorik, sebagai peneduh bagi penumpang saat turun dari mobil atau kereta kuda. Gereja ini tidak terpisahkan dengan lapangan Paradeplein di hadapannya yang dahulu digunakan untuk parade militer. Di dalam gereja terdapat orgel yang sangat besar tetapi saat ini sudah tidak dapat difungsikan. Atap gereja berbentuk dome (kubah) dengan mahkota yang memiliki lubang krepak. Sementara kedua menaranya juga memiliki mahkota yang sama. Bouvenlicht berupa kaca patri yang bermotif dan berwarna. Sementara pintu ada di entrance utama menghadap Timur dan yang menghadap ke Paradeplein (taman sri gunting). Rumah pendeta terletak di belakangnya.

Sejarah : Terletak di jantung Kota Lama pada jalan utama Heeren straat jalur pos Daendels. Gereja Blenduk merupakan karya arsitek Belanda, *W. Westmass* dan *HPA de Wilde* dirancang sesuai trend abad XIX saat itu. Gereja ini mirip dengan Gereja Immanuel di Jl.

Merdeka Timur dengan kubah yang mirip dan orgel yang sama. Gereja Blenduk yang ada sekarang bukan bangunan yang pertama didirikan pada tapak tersebut. Bangunan gereja pertama yang didirikan pada tahun 1753 belum banyak yang terungkap. Peta bertahun 1756 menunjukkan konfigurasi massa yang berbeda dari Blenduk. Konon gereja pertama yang berdiri berbentuk rumah panggung yang pada tahun 1787 dirombak total. Kira-kira pada masa itu dapat dipercaya bahwa rumah pendeta masih menempati ex-Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di seberang jalan, lebih ke barat. Sekarang bangunan pendeta ada di belakang bangunan gereja dan nampak lebih muda daripada rumah yang pertama. Gereja Blenduk pernah dipakai bersama oleh umat Katolik dan Protestan Semarang ketika Gereja Gedangan Santo Yusuf belum didirikan. Penggunaan bersama ini termasuk istimewa untuk ukuran masa abad ke-19 dan barangkali hanya di Semaranglah dua kelompok umat yang berbeda tersebut berbagi tempat ibadah. Bangunan Gereja Blenduk baru selesai diperbaiki dan dicat kembali pada Agustus 2004.

Arti Penting : Bangunan ini menunjukkan bentuk arsitektur yang berbeda dan menonjol untuk kawasan Kota Lama sehingga dijadikan landmark (tetenger). Keberadaannya mempengaruhi bentukan arsitektur bangunan di sekitarnya juga merupakan inspirasi beberapa bangunan baru. Gereja Blenduk sudah sangat dikenal bukan hanya di Semarang tetapi landmark yang telah terkenal di Indonesia.

c. Lawang Sewu

Gambar 3. Gedung Lawang Sewu



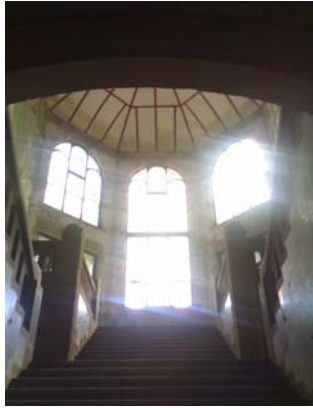
Sumber : www.semarang.go.id

Gambar 4. Jendela Gedung Lawang Sewu



Sumber : www.semarang.go.id

Gambar 5. Ruang Utama Gedung Lawang Sewu



Sumber : Dokumentasi Penulis, Juli 2008

Gambar 6. Serambi Lantai Dua Gedung Lawang Sewu



Sumber : Dokumentasi Penulis, Juli 2008

Gambar 7. Gedung Lawang Sewu Tampak Samping



Sumber : Dokumentasi Penulis, Juli 2008

Lokasi : Jl. Pemuda, bundaran Tugu Muda Semarang

Pemilik : PT. KAI (Kereta Api Indonesia)

Tanggal Pembangunan : 1902-1914

Penggunaan: Semula Kantor NIS (Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij), sekarang kosong (temporary sebagai tempat pameran)

Keadaan : Cukup

Deskripsi : Bangunan ini terletak pada bundaran Tugu Muda. Tugu Muda terletak di depannya dan sebelah selatan terdapat Gereja Katedral dan sebelah baratnya terdapat bangunan BDNI. Bangunan ini dijuluki Lawang Sewu (Pintu Seribu) karena memiliki banyaknya pintu samping dan busur-busur yang menyerupai rongga memenuhi bangunan ini. Kompleks Lawang Sewu terdiri atas dua massa

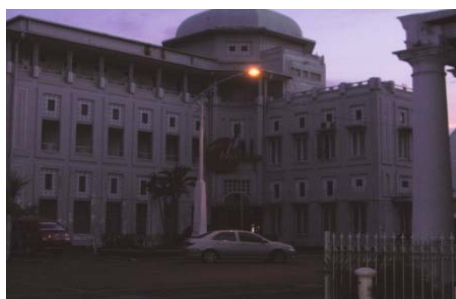
bangunan utama. Yang sebelah barat berbentuk 'L' dengan pertemuan kedua kakinya menghadap Tugu Muda, arah barat daya dan disitulah sudut pertemuan kedua bangunan utama sebagai pintu masuk. Sebelah timur merupakan massa linier membujur dari barat ke timur. Semua bangunan berlantai dua. Pada lantai 2 sengaja dibangun sayap kanan-kirinya dengan maksud agar orang yang berada di dalamnya bisa menikmati indahnya perbukitan Simongan dan birunya Laut Jawa tapi sayangnya pemandangan ini kini tertutup oleh bangunan modern di kanan-kiri berupa gedung menjulang. Sudut pertemuan kaki 'L' merupakan daerah pintu masuk yang diapit oleh dua menara yang pada bagian atasnya membentuk copula bersegi delapan dan bertudung kubah. Kemegahan Lawang Sewu diperindah oleh adanya dua menara tersebut. Sepintas, kubah tersebut seperti menara pengintai tapi sejatinya sebagai tandon penyimpan air. Bangunan bergaya Romanerque revival ini dirancang dengan pendekatan iklim setempat dan keseluruhannya merupakan karya yang sangat indah sehingga dijuluki Mutiara dari Semarang. Dinding berupa batu bata yang pada bagian bawah dilapisi

tile berwarna. Atap berupa limasan majemuk ditutup dengan genteng. Terdapat jendela loteng pada samping depan dan bangunan, dengan bentuk sosoran. Pintu yang ada merupakan pintu berdaun ganda dengan panel yang tebal dan kedap yang terbuat dari kayu. Di atas pintu terdapat bukaan untuk bouvenlicht. Jendela dengan ambang atas berbentuk lengkung dan ambang bawahnya tidak disangga. Petak lawang sewu dibatasi oleh pagar besi dengan perkuatan kolom bata. Bangunan berarsitektur Romance revival ini kaya akan detail yang sewarna. Pada tahun 1916 seiring dengan majunya perkeretaapian saat itu, dibangunlah satu bangunan di belakang, bagian utara. Bangunan dua lantai inilah yang dibawahnya dilengkapi belasan ruang penjara, masing-masing 1x1 meter. Menelusuri bagian dalam gedung, seluruh ruangan masih terlihat kukuh. Sayangnya, minimnya penerangan dan kurangnya tenaga kebersihan membuat ruangan di gedung ini sepi dan kusam. Bagian luar terlihat kesan kurang terawat. Atap kayu jati dan beberapa pintu terlihat lapuk oleh bocoran hujan. Beberapa ornamen kaca banyak yang hilang dan warna putih yang membalut gedung berganti lumut.

Sejarah : Bangunan Lawang Sewu dirancang oleh arsitek C. Citroen dari Firma *J.F. Klink Hamer* dan *B.J. Quandag*. Pada awal abad ini untuk NIS (*Nederlandsche Indische Spoorweg Maatschappij*) merupakan perusahaan kereta api pertama di Jawa. Sebelum kemerdekaan, bangunan ini menghadap Taman Wilhelmina yang mempunyai tempat bermain musik. Di depannya dahulu melintas trem kota Semarang, jurusan Bulu-Jomblang. Pada saat berlangsungnya Pertempuran Lima Hari di Semarang pada bulan Oktober 1945, halaman depan Lawang Sewu menjadi ajang pertempuran dan banyak pejuang kita yang dibantai di sana.

d. Gedung Jiwasraya

Gambar 8. Gedung Jiwasraya



Sumber : Dokumentasi Penulis, 23 Juli 2008

Lokasi : Jl. Letjen Soeprapto 23-25 Semarang

Pemilik : PT Jiwasraya

Tanggal Pembangunan : Perempat pertama abad XX

Penggunaan: Semula kantor, sekarang Kantor Pusat Jiwasraya
Semarang

Kedadaan : Baik

Deskripsi : Gedung Jiwasraya ini merupakan bangunan nirsetangkup dengan facade tunggal. Jumlah trafe sebelas. Bangunan terdiri dari tiga lantai dengan orientasi menghadap ke Utara. Pondasi dari batu dengan struktur kerangka beton. Denah berbentuk huruf 'L'. Atap datar dari beton dan pada sudut pertemuan sayapnya diberi atap kubah beton. Bentuk ornamen vertikal dan horisontal dengan batu kerawang sebagai lubang angin yang motifnya sangat khas bercirikan *Thomas Karsten*. Pada atap terdapat kubah yang menyerupai menara yang merupakan void 3 lantai berbentuk segi 12, dengan jendela dari panel stained glass. Terdapat serambi pada sekeliling bangunan dan di depan pintu masuk. Atap serambi menyatu dengan atap bangunan utama yang disangga oleh sederetan kolom dan juga setengah dinding. Pintu terdiri dari daun ganda

dan memiliki bukaan yang terletak di atas ambangnya atasnya kemudian dihiasi dengan sederetan rooster. Pada bagian depan bangunan terdapat taman.

Sejarah : Bangunan ini merupakan karya arsitek *Henry Thomas Karsten*. Dibangun sebagai bangunan kantor yang sekarang juga tetap berfungsi sebagai kantor. Dalam buku Semarang, Beeld van een stad yang diterbitkan Asia Maier (1955) bangunan ini didirikan oleh perusahaan pelaksana bangunan gedung bernama Hollandsche Beton Maatschappij (HBM). Tidak banyak penambahan bangunan kecuali penambahan awning untuk melindungi jendela dari hujan.

Arti Penting : Bangunan ini terletak di lahan sudut dan merespon bangunan Gereja Blenduk yang telah ada sebelumnya. Bentuk atap kubah tampaknya juga menyesuaikan dengan atap gereja. Kerapian pekerjaan konstruksi dan penyelesaian detail-detail ornamen berupa garis-garis penebalan dan batu kerawang yang sangat rapi sehingga menampilkan nilai estetika yang tinggi.

e. Marba (De Ziek)

Gambar 9. Gedung Marba



Sumber : www.semarang.go.id

Lokasi : Jl. Letjen Soeprapto 33 Semarang

Tanggal pembangunan : Pertengahan abad XIX

**Penggunaan : Semula Toko "de Ziekel", sekarang Kantor Sekretariat
PKP**

Keadaan : Kurang Terawat

Deskripsi : Bangunan setangkup dengan facade tunggal memiliki dua lantai. Pondasi dari batu dengan struktur penopang lantai dua dari kayu jati kelas satu. Dinding satu bata di plester. Struktur atapnya baja. Modul kolom 4 meteran. Penutup lantai satu terbuat dari marmer 75x75 sedangkan lantai dua dari papan kayu sekaligus sebagai plafon lantai satu. Langgam bangunan adalah Spanyol dengan atap tritisan

lantai satu yang ditarik dengan besi. Pintu masuk tepat di sudut dengan ornamen dinding pada sudut-sudut pertemuan. Bata klinker juga mendominasi bangunan ini. Pada puncak bangunan diberi ornamen berbentuk piala-piala.

Sejarah : Bangunan ini dibangun oleh Marta Bajunet (Marba) seorang Yunan yang sangat kaya. Pertama digunakan sebagai kantor ekspedisi pelayaran kemudian diwariskan pada Tuan Marzuki Bawazir anaknya dan membuat toko. Setelah Tuan Marzuki pulang ke Yaman, diserahkan kepada Bapak Utoyo Yunus seorang perwira TNI AL. Dalam pengelolaan keluarga Yunus, bangunan ini disewakan menjadi beberapa kantor diantaranya Delima Group, Pan Indonesia Bank, CV.Tri Prasetya Tama, dan CV. Duta Mitra Utama. Saat ini bangunan tidak digunakan setelah digunakan sebagai kantor salah satu partai.

Arti Penting : Bangunan Marba ini terletak pada Jl. Letjen Soeprapto (Heeren Straat), yang merupakan satu-satunya toko modern pertama di Kota Lama. Mengikuti langgam arsitektur Renaissance dengan berbagai ornamen yang melekat pada bangunan

ini, memberikan warna bagi kekayaan arsitektur di dalam kawasan Kota Lama.

f. Ex Pengadilan Negeri

Gambar 10. Gedung Ex Pengadilan Negeri Semarang



Sumber : www.semarang.go.id

Lokasi : Jl. Letjen Soeprapto 19 Semarang

Pemilik : Kantor Wilayah Departemen Kahakiman Jawa Tengah

Tanggal Pembangunan : 1931

Penggunaan : Semula Pengadilan Rakyat Non Eropa, sekarang Restoran 'Ikan Bakar Cianjur'

Keadaan : Baik

Deskripsi : Bangunan utama setangkup dengan facade terbagi atas 3 trafe. Di samping kiri dan kanan

tembok setinggi 3 meter dengan pintu masing-masing bagian. Bangunan tidak bertingkat dan menghadap ke utara. Sampai dengan ruang dalamnya, bangunan ini betul-betul setangkup. Bagian tengah merupakan hall dengan ruang di kiri kanannya. Pada bagian belakang tata ruang sama dengan bagian depan jadi seluruhnya, terdapat enam bilik. Pada bagian belakang terdapat bangunan tambahan untuk pelayanan. Bangunan yang termasuk tua ialah sel tahanan yang menempel pada dinding sebelah barat. Pada bagian bawah dinding setinggi satu meter dilapis dengan batu alam, akan tetapi penempelan ini dapat dipastikan pada tahun 70an, pada saat gedung ini masih dipakai oleh pengadilan negeri. Atap bangunan berbentuk pelana dengan sudut lebih dari 45° , bahan penutup atap ialah genteng, yang kemungkinan besar didatangkan dari Negeri Belanda. Lebar Tritisan 2 meter dengan usuk terekspose. Hubungan diselesaikan tanpa hiasan. Pintu dibuat dari kayu jati berukir yang dicat kuning, pada bagian atas pintu terdapat lubang cahaya dan angin. Pintu samping terbuat dari panel kayu jati tebal dengan ambang berbentuk busur. Pada ruang

dalam lubang cahaya diganti dengan panel berukir bermotif bunga-bunga krawang.

Sejarah : Bangunan ini di pengaruhi oleh renaissance revival di tepi jalan utama di Kota Lama yang dulu bernama Heerenstraat. Menilik ciri struktur utamanya, yaitu kemiringan atap yang tajam dan ketidakhadiran serambi di sekelilingnya bangunan ini termasuk bangunan Belanda yang berasal dari abad 19. Ukiran kerawang di atas ambang pintu pada Hall utama bermotif bunga-bunga bergaya Eropa, tetapi sangat mungkin dikerjakan oleh karyawan dari China.

g. Pasar Johar

Gambar 11. Gedung Pasar Johar



Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Tahun 2007

Gambar 12. Kolom Penyangga Gedung Pasar Johar



Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Tahun 2007

Lokasi : H. Agus Salim Semarang

Pemilik : Pemerintah Daerah Kota Semarang

Tanggal Pembangunan : 1938 (mulai dirancang pada tahun 1933)

Penggunaan: Semula Pasar Pusat Semarang (Centrale Pasar),
sekarang lebih dikenal sebagai Pasar Johar

Keadaan : Cukup

Deskripsi : Bangunan pasar ini menghadap ke arah timur. Di sebelah utara pasar ini terdapat Yaik Permai yang dibangun kemudian, sebelah timur terdapat SCJ (Semarang Centre Johar) yang selesai dibangun tahun 1994 dan karena tidak menghasilkan kemudian

toko-toko tersebut telah tutup dan menjadi lingkungan yang mati sekitar tahun 1999 dan sebelah selatan terdapat kali Semarang. Pasar ini terdiri dari 4 blok bangunan yang disatukan dengan gang selebar 8 meter. Memiliki kolom-kolom menyangga atap dengan struktur cendawannya. Pasar Johar memiliki 2 lantai hanya pada bagian tepi, sedangkan pada bagian tengah berupa void. Sisi melintang bangunan ini terdiri dari enam buah trafe, dari sisi membujur memiliki empat buah trafe. Struktur beton bertulang dengan sistem cendawan pada kolom-kolomnya. Kolom memiliki modul 6 meter dengan penampang kolom persegi delapan. Kolom seperti ini dinamakan konstruksi jamur (mushroom). Atap yang terbentuk merupakan atap datar dan terbuat dari plat beton dengan pertinggian untuk lubang ventilasi udara. Lubang ini berbentuk segi enam dan terdapat kaca untuk mengantisipasi masuknya air ke dalam bangunan pasar, tetapi tetap mengupayakan masuknya sinar matahari supaya tetap masuk ke dalam pasar. Dari sisi ini terlihat efisiensi dari segi hemat energi dengan adanya ventilasi yang memadai dan penerangan yang cukup. Pasar ini berdiri dengan tanpa adanya penerangan listrik yang

terlampau besar. Sesuai dengan prinsip Thomas Karsten mengenai efisiensi ruang bangunan ini terbentuk memenuhi tapak yang tersedia, sehingga tidak terdapat halaman ataupun ruang yang terbuka.

Sejarah : Sejarah pasar Johar dimulai lebih dari seabad yang lalu. Pada tahun 1860 terdapat pasar yang menempati bagian timur alun-alun yang pada tepi jalannya dipagari oleh deretan pohon johar maka dimungkinkan dari sinilah nama Pasar Johar itu lahir. Lokasi pasar ada di sebelah barat Pasar Semarang yang disebut pula pasar Pedamaran, dan berdekatan pula dengan penjara sehingga menjadi tempat menampung orang yang akan menilik kenalan atau kerabat yang ada di penjara. Pasar johar menjadi semakin padat dan membutuhkan perluasan ruang. Setelah melalui proses pengkajian akhirnya diadakan perluasan pasar johar dengan menebang pepohonan johar dan membangun los baru. Pada tahun 1931 gedung penjara tua yang terletak di dekat Pasar johar dibongkar sehubungan dengan rencana pemerintah kotapraja mendirikan Central modern. Pasar kemudian didirikan dengan

tujuan mempersatukan fungsi lima pasar yang telah ada, yaitu Johar, Pedamaran, Beteng, Jurnatan, dan Pekojan. Adapun tapak pasar yang akan direncanakan meliputi tapak pasar Pedamaran, Pasar Johar, ditambah tapak rumah penjara, beberapa toko, sebagian halaman Kanjengan dan sebagian lagi alun-alun. Pada tahun 1933 dibuatlah usulan rancangan pertama oleh Ir. Tomas Karsten yang bentuk dasar menyerupai pasar Jatingaleh dengan ukuran yang lebih besar. Pada tahap ini terdapat susunan atap beton dengan bagian tertinggi berada di pusat. Bagian kulit dibuat bertingkat mengingat harga tanah yang sudah tinggi di kawasan tersebut. Namun demikian rancangan tersebut diubah pada tiga tahun berikutnya dengan tujuan untuk mengadakan efisiensi. Karena belum memenuhi keinginan, maka rancangan ini pun diubah kembali dan gagasan konstruksi cendawan kembali dimunculkan. Rancangan yang terakhir inilah yang kemudian dibangun. Konon kabarnya Pasar Johar pernah tersohor sebagai pasar yang terbesar dan tercantik di Asia Tenggara. Pada tahun 1960-an pernah diadakan perubahan berupa penempelan dinding tambahan pada sekeliling pasar. Hal ini

menyebabkan tampilan arsitektur tidak serasi serta sistem penghawaan yang kurang lancar.

Arti Penting : Pasar Johar merupakan karya akbar arsitek *Ir. Thomas Karsten* yang telah banyak jasanya di Kota Semarang dan kota-kota lain di Nusantara. Pasar ini pun pernah terkenal di sebagai pasar yang terindah di Asia Tenggara. Dengan konstruksi cendawannya pasar ini merupakan bukti pengkajian yang cermat dengan menyesuaikan dengan iklim tropis di negara ini. Pasar ini juga telah menjadi tetenger yang sangat penting karena kemegahan dan besarnya. Pasar ini memiliki integritas arsitektur, langgam, bahan , kesinambungan yang sangat erat. Dan memiliki keterkaitan erat dengan tokoh arsitektur yaitu Thomas Karsten.

h. Kantor Perusahaan Sirop Fresh

Gambar 13. Pabrik Limun Fresh



Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Tahun 2007

Lokasi : Jl. Sri Gunting 5-6 Semarang

Pemilik : Perusahaan Limun Fresh (Tasripin)

Penggunaan : Semula Pabrik Limun Fresh, sekarang dijadikan galeri seni

Keadaan : Baik

Deskripsi : Bangunan setangkup dengan facade tunggal dan orientasi ke Barat. Atap berbentuk dengan penutup dari genteng. Bangunan dua lantai ini terdapat serambi dengan pagar dari kayu. Pada lantai dasar kolom berupa betonan dan untuk lantai di atasnya terdapat kolom yang terbuat dari kayu. Pintu terbuat dari kayu, ambang atas pintu lurus. Tampak depan terdiri dari 3 buah. Pintu pernah terjadi perombakan pada lantai dan jenis tile.

Sejarah : Dilihat dari penampilan bangunan sekarang, kemungkinan bangunan ini pernah mengalami perubahan antara lain ditampakkan pada jenis tile pada dinding dan lantai yang baru.

Arti Penting : Jalan Sri Gunting merupakan pengembangan dari Jalan Letjen Soeprapto. Langgam arsitektur yang

tercermin dari bangunan ini merupakan perpaduan bangunan kolonial Belanda dengan bangunan tradisional. Kantor ini merupakan bangunan yang berusia cukup tua di Kota Lama.

i. Restoran Oen

Lokasi : Jl. Pemuda 77 Semarang

Pemilik : Keluarga Megaradjasa

Penggunaan : Semula Restoran, sekarang restoran

Keadaan : Baik

Gambar 14. Restoran OEN



Sumber : Dokumentasi Penulis, 19 Juli 2008

Deskripsi : Restoran Oen adalah bangunan nirsetangkup dengan facade tunggal. Bentuk denah mengikuti menyudut mengikuti lahan pertemuan antara Jalan Pemuda dengan jalan gang disebelahnya. Pintu

masuk restoran ditempatkan pada sudut tersebut dengan dinding yang membentuk setengah lingkaran. Entrance bangunan diperkuat dengan dinding yang menerus keatas sekaligus sebagai tempat menempatkan tulisan "TOKO OEN". Bangunan berlantai satu dengan bentuk atap limasan dengan penutup atap plat logam yang dibuat menyerupai genting. Jendela-jendela pada bangunan ini berukuran besar yang pelubangannya mengikuti bentang kolom-kolomnya, sehingga dari dalam pengunjung dapat leluasa memandang keluar. Atap tritisan pendek diatas ambang atas pintu dengan penutup dari logam dibuat melengkung dan selalu berwarna hijau. Konsol menempel pada dinding dan diberi plafond. Bouvenlight diatas tritisan berbentuk geometris. Interior dalam dari kayu. Plafond eternit dengan list kayu pada bagian tepi yang dicat dengan warna gelap. Bangunan rumah makan ini masih dikelola dengan baik oleh pemiliknya sebagai sebuah restoran. Toko OEN merupakan satu-satunya restoran dari jaman kolonial Belanda yang masih beroperasi. Secara fisik tidak ada penambahan kecuali beberapa penambahan pada bagian interiornya.

Sejarah : Restoran ini semula dimiliki oleh orang Inggris bernama Grillroom. Kemudian pada tahun 1938 dibeli oleh orang Cina bernama Oen tjoen Hok, kemudian diwariskan kepada Oen Liem Hwa. Sedangkan manager yang mengelola restoran ini bernama Djoa Kok Tie. Restoran Oen terdapat di semua kota di Jawa, antara lain Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya serta di negeri Belanda. Namun hanya Semarang dan Belanda yang pada saat ini masih berjalan. Toko Oen Semarang ini pada perkembangannya diwariskan pada anak-anaknya. Saat ini restoran Oen ini dikelola oleh keluarga Megaradjasa. Kini restoran Oen selain sebagai rumah makan juga sebagai toko yang menjual roti. Bangunan ini masih terawat dengan baik dan dilakukan beberapa perombakan khususnya pada bagian belakang bangunan dan jendela depan.

Arti Penting : Restoran Oen merupakan satu-satunya restoran yang berasal dari jaman kolonial Belanda yang kini masih ada dengan fungsi yang sama. Keunikan Toko Oen terletak pada rancangannya yang terbuka dan terintegrasi dengan kegiatan diluar namun sekitar

tahun 1990-an bukaan tersebut ditutup dengan jendela berpanil kaca.

j. Wisma Driyarkara

Gambar 15. Wisma Driyarkara



Sumber : Dokumentasi Penulis, 10 Mei 2008

Lokasi : Dr. Cipto 66 Semarang

Penggunaan: Semula rumah tinggal, sekarang wisma mahasiswa
Katolik

Keadaan : Baik

Deskripsi : Bangunan nirsetangkup dengan facade deret dan sangat mirip dengan Gereja Isa Almasih yang sederet di Jalan Dr. Cipto. Bangunan batu dengan struktur dinding pemikul dengan penyelesaian plester dan

cat. Bentuk atap perisai dengan penutup genting. Sementara serambinya dinaungi tritisan seng. Pintu berdaun ganda dengan panil kaca dan krepyak. Satu sisi dindingnya bersegi delapan dengan pengakhiran pelubangan jendela dengan bentuk busur.

Sejarah : Kawasan Dr. Cipto adalah pengembangan kawasan Kota Belanda setelah Kota Lama penuh sehingga orang-orang Belanda dan Cina yang tinggal di Semarang mulai menempati daerah ini. Bangunan ini merupakan bangunan rumah tinggal yang beralih fungsi untuk kantor dengan kegiatan kemanusiaan. Gedung ini kini dipakai untuk pusat kegiatan mahasiswa Katolik, baik yang tergabung dalam PMKRI maupun tidak. Bangunan ini pernah mengalami penambahan ruang pada bagian belakang, namun untuk bagian depan diperkirakan belum mengalami perubahan yang terlalu mencolok.

Arti Penting : Bangunan ini menunjukkan satu contoh rumah kopel yang banyak ditemui di Jl. Dr. Cipto dengan detail facade yang indah. Gaya yang digunakan khas kawasan Dr. Cipto, yaitu dengan pemakaian batu tempel serta gable dengan gaya renaissance.

k. SMA Sedes Sapientiae

Lokasi : Jl. Mataram 908 Semarang

Pemilik : Yayasan Katolik Marsudirini Semarang

Tanggal pembangunan : 1910 bertahap sampai dengan 1950-1951

Gambar 16. Gedung SMA Sedes Sapientiae



Sumber : Dokumentasi Penulis, 11 Mei 2008

Penggunaan: Semula perkumpulan suster St. Fransiscus sebagai biara Katolik, sekarang balai pengobatan, PIKAT, SMP Maria Mediatrik, dan SMA Sedes Sapientiae

Keadaan : Baik

Deskripsi : Komplek bangunan ini cukup luas sehingga facade bangunan menghadap ke Jalan Mataram. Bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar adalah bangunan dengan jumlah lantai 3 dan ditutup dengan atap pelana. Bangunan susteran terletak di bagian depan kompleks bangunan ini.

Bangunan yang tampak dari Jalan Mataram berupa bangunan setangkup dengan facade tunggal. Orientasi bangunan ke barat. Jumlah lantai 2 buah. Pondasi bangunan dari batu dengan sistem struktur batu bata. Dinding dari batu bata dengan hiasan list horisontal. Bentuk atap kerucut limasan pada dua menara. Bangunan yang lain menggunakan atap pelana dan limasan. Terdapat tritisan. Listplank diselesaikan dengan sederhana. Usuk terdedah. Tidak terdapat bungbungan dan cornice. Bangunan mempunyai serambi, yang diberi pagar dari besi. Pintu masuk ke kompleks ada 3, yaitu pintu masuk menuju bangunan SMA dan SMP, pintu masuk ke Kapel dan pintu masuk ke PIKAT. Pintu masuk ke kapel memiliki bentuk yang menarik, karena pada pintu masuk ini dinaungi atap yang berbentuk lengkung tanpa penyangga. Atap ini dilengkapi listplank sederhana bentuk pintu masuk ini juga menyerupai bentuk atapnya. Lengkung ini menyerupai dengan lengkung pada gereja-gereja Gothic. Pintu bertipe ganda dengan panel kayu bermotif kotak-kotak. Diatas pintu terdapat lubang angin dengan motif kotak-kotak. Tipe jendela pada lantai 1 sama dengan tipe lantai 2. Jendela ini juga mempunyai bentuk

lengkung pada ambang atasnya. Terdapat semacam list yang membingkai jendela-jendela tersebut dan diberi warna yang berbeda warna dinding. Jendela bertipe ganda dan di atasnya terdapat lubang angin dengan panel krepak. Untuk jendela lantai 1 dengan panel krepak dan jendela lantai 2 dengan panel kaca bermotif kotak-kotak. Dinding bagian atas terdapat penebalan dan dihiasi dengan motif yang menarik. Pada bangunan dengan atap limasan terdapat lubang angin yang berbentuk persegi panjang.

Sejarah : SMA Sedes Sapientiae pada mulanya merupakan bagian dari SMA Loyola yang dirintis pendiriannya oleh Romo Waaweburg S.J. almarhum bersama bapak Wiyono pada bulan Mei 1949. Mulai tahun ajaran 1950/1951 diadakan pemisahan untuk siswa putra dan siswa putri. Siswa putri dipercayakan pengelolaannya pada suster-suster Fransiskanes dengan suster Suitberta sebagai wakil kepala sekolah. Untuk sementara waktu SMA putri ini menempati gedung Kweekschool yang kemudian menjadi SPG St. Fransiskus Jl. Pemuda 159, dan sekarang menjadi SMIK St. Fransiskus. Pada tahun

1955, SMA Loyola putri pindah di Jl. Mataram 908, mulai tahun ini diperkenalkan nama suster Fransiskanes. Berdasarkan Surat keputusan Menteri P&K tanggal 1 Agustus 1965, Yayasan Loyola dipecah menjadi 2. Semula SMA ini hanya mempergunakan lantai bawah. Tahun 1981, SMP Maria Mediatrix, Akademi Sekretaris, balai pengobatan dan PIKAT bergabung dengan kompleks tersebut. Mulai tahun ajaran 1991-1992 terdapat tambahan gedung berlantai 3 lengkap dengan pepustakaan ruang baca, ruang ketrampilan, laboratorium dan ruang komputer di sayap utara.

Arti Penting : Komplek SMA ini merupakan karya arsitek H.J. Roosdorp. Tahun 1942-1945 pernah dikuasai oleh pasukan Jepang dan dijadikan tempat tahanan. Integritas langgam arsitektur Neo-Gotik dan kekriyaan terpancar kuat dari bangunan ini melalui bentuk busur-busur patah sebagai tritisan di atas pintu masuk dan jendela, dengan detil-detil Neo-Gotik yang telah disederhanakan tapi diselesaikan dengan cermat. Tipe bangunan sekolah berasrama tercermin dari bangunan ini. Hingga kini bangunan ini masih menunjukkan integritas kesinambungan fungsi. Peran

bangunan dalam pembentukan citra kawasan didukung oleh wujudnya yang sangat kontras dengan bangunan di sekitarnya, menjadikan bangunan sebagai *point of interest*. Kaitan bangunan dengan SMA Kolese Loyola yang dulu dirintis oleh Romo Wawenburg, yang kemudian diserahkan kepada suster Fransiskanes. Bangunannya sendiri dirancang oleh Roosdorp dan sempat digunakan sebagai tempat tahanan oleh pasukan Jepang. Keunikan bangunan ini berupa sistem segregasi (khusus putri), sebagai pancaran bangunan pendidikan yang dipengaruhi oleh gaya gotik. Bangunan ini merupakan salah satu diantara sedikit bangunan pendidikan dengan gaya gotik disamping juga banyak menyimpan informasi sejarah mengenai kondisi pendidikan menengah umum di Semarang serta berhubungan dengan sejarah perjuangan melawan tentara Jepang.

I. Gereja Katolik Admodirono – Gereja Keluarga Kudus

Gambar 17. Gereja Katolik Admodirono



Sumber : Dokumentasi Penulis, 11 Mei 2008

Lokasi : Jl. Atmodirono 8 Semarang

Pemilik : Paroki Atmodirono Semarang

Tanggal Pembangunan : Tahun 1939

Penggunaan : Semula Gereja, sekarang Gereja

Keadaan : Baik

Deskripsi : Bangunan utama Gereja St. Familia berubah nama menjadi Gereja Keluarga Kudus merupakan bangunan setangkup dengan menara lonceng pada sisi kanan bangunan. Orientasi ke arah barat dan menggunakan pondasi batu dan sistem struktur perkuatan kolom yang berderet. Atap berbentuk limasan dengan penutup atap berupa genteng. Bangunan dari bata diplester dan finishing cat.

Entrance pintu utama berupa lubang tinggi dengan ambang atas lengkung berjumlah tiga buah. Pada kanan kirinya juga terdapat lubang pintu masuk yang lebih kecil dengan bentuk yang serupa. Lubang angin terletak di sisi kanan kiri bangunan berambang atas datar dan berbentuk krepak besar terbuat dari kayu. Jendela berbentuk bujur sangkar terletak di sisi-sisi bangunan yang berada dibawah.

Sejarah : Pada tahun 1939 gereja ini mulai dibangun dan selesai 10 Agustus 1940. Peletakan batu pertama oleh Romo M. Wilkens MSF dan terbentuk paroki keempat di Semarang. Dulu jalan Atmodirono bernama Land Peterongan Straat.

Arti Penting : Gereja Atmodirono memiliki bentuk arsitektur Indische dengan pengaruh Neo Gothic. Paroki Atmodirono merupakan pusat pengembangan misi MSF (Misionaris St. Familia) di Indonesia.

m. Rumah Sakit Elisabeth

Gambar 18. Rumah Sakit Elisabeth



Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Tahun 2007

Lokasi : Jl. Kawi 1, Semarang

Tanggal Pembangunan : 1926

Penggunaan: Semula Rumah Sakit, sekarang Rumah Sakit dan Susteran

Keadaan : Baik

Deskripsi : RS Santa Elisabeth memiliki tapaknya berbukit dan terletak pada persimpangan jalan Kawi dan jalan Willis yang menyebabkan pencapaian ke rumah sakit lebih mudah. Bangunan ini merupakan kompleks dengan bangunan utama berupa bangunan setangkup facade selebar batu bata. Bentuk atap bangunan adalah limasan dan pelana majemuk dengan penutup atap genteng. Pintu masuk utama dengan ambang atas berbentuk setengah lingkaran lingkaran dengan daun pintu berupa kerangka dari besi. Sedangkan jendela memiliki ambang atas dan

bawah datar. Di atas jendela terdapat bouvenlicht berbentuk lingkaran dengan hiasan ukiran. Terdapat patung Bunda Maria ditengah taman. Bagian belakang kompleks merupakan susteran dan kapel dengan area parkir tersendiri. Komplek rumah sakit ini terletak pada tapak yang berbukit.

Sejarah : Dibangun oleh arsitek Belanda Thomas Karsten yaitu pada tahun 1926 dan bangunan sekarang masih tetap sama seperti dahulu. Hanya pada bagian belakang kompleks didirikan bangunan tambahan sebagai ruang pasien.

Arti Penting : RS St. Elisabeth merupakan suatu kompleks bangunan yang sangat luas dan menurut tipologi bangunannya, termasuk jenis yang rumit rancangannya. Namun dengan keahlian Thomas Karsten perancangnya, justru kompleks ini memiliki nilai estetis yang tinggi dan berhasil memanfaatkan potensi alam yang sejuk. Penyelesaian desain mewakili rancangan rumah sakit pada abad modern.

n. Rumah Tinggal Bp.Gunawan

Gambar 19. Rumah Tinggal Bp.Gunawan



Sumber : Dokumentasi Penulis, 17 Mei 2008

Lokasi : Jl. Dr. Cipto 159, Semarang

Pemilik : Bp. Gunawan

Penggunaan : Semula rumah tinggal, sekarang rumah tinggal

Keadaan : Baik

Deskripsi : Bangunan setangkup dengan facade deret. Bangunan merupakan rumah kopel dan menggunakan gaya arsitektur Jawa. Bangunan berorientasi kebarat dan tidak bertingkat. Pondasi dari batu, sistem strukturalisasi dari bata dan dinding dari bata. Dinding diselesaikan dengan plester dan cat dinding. Atap berbentuk pelana sederhana dan ditutup dengan genteng. Listplank dari kayu yang berhias ornamen khas Jawa. Ujung bumbungan diberi ornamen yang meruncing. Usuk tidak terdedah. Tidak terdapat jendela loteng tetapi pada bagian gable terdapat hiasan bundar yang berhiaskan ornamen

bunga. Serambi terdapat pada bagian depan bangunan dan dinaungi dengan atap yang menyatu dengan atap bangunan. Terdapat kolom besi yang mendukung atap serambi. Pada serambi depan ditambahkan panel-panel kayu yang menggantung membentuk busur lengkung dengan hiasan yang berbentuk meruncing. Panel kayu ini berfungsi menahan sinar matahari. Pada bangunan belakang terdapat dinding gable dari batu bata dengan dimensi tebal yang tampak dari facade depan sehingga mengesankan bangunan lebih tinggi. Pintu bertipe ganda dengan 4 daun pintu. Pintu bagian luar berpanel kayu sedangkan pintu bagian dalam berpanel kaca dan kayu. Pintu dirangkai terpadu dengan bouvenlicht di atasnya. Tidak terdapat jendela pada bagian facade depan. Serambi dibatasi dengan pagar batu pada bagian samping. Halaman bagian depan cukup luas dan terdapat tambahan bangunan garasi pada bagian samping. Halaman rumah sendiri dibatasi dengan pagar besi yang kokoh dan tinggi.

Sejarah : Jl. Dr. Cipto termasuk daerah yang cukup tua. Daerah ini merupakan pengembangan kawasan

Semarang dari kota lama ke arah selatan. Bangunan-bangunan yang cukup tua masih cukup banyak kita temukan di Jl. Dr. Cipto. Pada bangunan rumah tinggal ini dapat ditemukan perpaduan antara arsitektur kolonial klasik dengan ornamen-ornamen lokal yang ringan. Tambahan yang dilakukan pada bangunan ini antara lain pagar batu pada serambi dan pagar halaman depan. Keadaan bangunan terawat dengan baik.

Arti Penting : Sebagai kawasan yang cukup tua di Semarang, kawasan Dr. Cipto menyimpan banyak rumah-rumah dengan berlanggam arsitektur kolonial dengan paduan hiasan lokal. Walaupun rata-rata ukuran bangunan tidak begitu besar tetapi bentuk-bentuk kekriyaan yang tampil secara halus dalam bentuk ornamen terutama pada listplank dan gunungan yang menghiasi rumah tinggal ini memberi kesan antik dan unik diantara bangunan-bangunan baru di sekitarnya. Setting bangunan ini masih terjaga keasliannya. Peran bangunan bersama-sama rumah-rumah yang sejenis membentuk kawasan dr. Cipto sebagian kawasan yang cukup tua di Semarang. Keunikan pada bangunan ini adalah tipe rumah

yang mewakili gaya rumah gotik dengan portico dan beranda yang berhias. Atribut kelangkaan yang disandang oleh bangunan ini adalah merupakan bangunan satu diantara sedikit bangunan rumah (antara lain rumah tinggal di Sompok) yang berlanggam gotik.

o. Gambar 20. Rumah Tinggal Bp. Condro



Sumber : Dokumentasi Penulis, 17 Mei 2008

Lokasi : Jl. Dr. Cipto 173, Semarang

Pemilik : Bp. Condro

Penggunaan : Semula rumah tinggal, sekarang rumah tinggal

Keadaan : Baik

Deskripsi : Bangunan nirsetangkup dengan facade tunggal.
Jumlah trafe 4 buah. Bangunan berorientasi ketimur.
Bangunan berlantai 2. Pondasi bangunan dari batu

dengan sistem struktur bata. Dinding dari bata dengan plesteran. Bentuk atap limasan. Terdapat jendela loteng pada bagian depan. Tritisan tidak terlalu lebar dan didukung oleh konsol dengan listplank yang berbentuk datar. Usuk terdedah. Bentuk bumbungan dan cornice sederhana. Terdapat serambi pada bagian depan bangunan yang ditandai dengan penambahan pada bagian facade yang membentuk silinder dengan atap kerucut dan datar. Dinding serambi setengah dan transparan. Bukaannya pada bagian entrance terdiri dari *bouvenlicht* dan lubang angin. Ambang bawah jendela disangga. Jendela bertipe ganda dengan krepak kayu. Bangunan ini dibatasi oleh pagar besi yang merupakan bangunan baru. Gaya rumah ini diilhami oleh gaya Romantik dari Eropa pada abad XIX dan selanjutnya berkembang pada perempatan abad XX. Ciri-ciri terdapat pada bangunan utara yang beratap limasan dan memiliki bagian yang ditonjolkan disamping dan beratap pelana. Penyanggihan lanjut pada bangunan ini ialah pemasangan bay window yang di atasnya dihias dengan cornice. Bangunan ini terletak pada petak yang nisbah kecil dan tidak mempunyai pavilion.

Sejarah : Bangunan dengan gaya arsitektur romantis ini belum banyak mengalami renovasi terutama pada bagian facade. Keunikan bangunan terletak pada penojolan pada bagian facade yang ditutup dengan atap kerucut.

Arti Penting : Integritas langgam arsitektur Romantik dengan hasil kekriyaan berupa bentuk pada atap dan jendela yang dikerjakan secara halus. Setting bangunan belum mengalami perubahan. Peran bangunan rumah tinggal sebagai pembentuk kawasan Jl. Dr. Cipto yang termasuk elit pada masa pertengahan abad ini. Bangunan rumah tinggal ini merupakan salah satu contoh pengembangan lebih lanjut bangunan rumah tinggal yang diilhami oleh gaya Romantik Eropa.

p. Gambar 21. Rumah Tinggal Keluarga Kwan



Sumber : Dokumentasi Penulis, 17 Mei 2008

Lokasi : Jl. Dr. Cipto 248 Semarang

Pemilik : Keluarga Kwan

Penggunaan : Semula rumah tinggal, sekarang rumah tinggal

Keadaan : Baik

Deskripsi : Bangunan nirsetangkup dengan facade tunggal. Bangunan hanya mempunyai satu lantai saja. Pondasi menggunakan batu dengan sistem struktur bata. Dinding dari bata dan diplester. Bentuk atap limasan dengan bahan penutup atap genteng. Bangunan tidak mempunyai jendela loteng. Tritisan cukup lebar dengan listplank yang dilengkapi dengan talang. Tidak terdapat cornice. Serambi hanya terdapat pada bangunan utama. Atap serambi merupakan atap miring dan ditambahkan pada atap limasan. Atap ini didukung oleh kolom batu yang besar. Dinding pada bagian serambi menggantung setengah dan dibawahnya dipasang pagar besi dari lantai hingga langit-langit. Pada dinding yang menggantung terdapat bouvenlicht yang menjorok ke dalam. Bukaan pada bagian entrance berupa deretan kolom, lubang angin dan bouvenlicht. Pintu bertipe tunggal dengan bahan

kayu. Di atas pintu terdapat bouvenlicht. Tidak terdapat jendela pada bagian entrance. Halaman rumah tinggal ini tidak begitu lebar dan didepannya dipasang pagar batu. Gaya Art Deco tampak diterapkan pada bangunan ini. Gaya Art Deco sendiri pada dasarnya merupakan arsitektur klasik yang penyelesaian detailnya terpengaruh oleh budaya lain, maka ciri klasik bangsa Yunani disini tampak pada ruang di depan yang sepiintas merupakan bangunan kuil Yunani.

Sejarah : Dari tampilannya yang tampak bahwa rumah ini bergaya agak lain daripada rumah-rumah disekitarnya. Gaya Art Deco yang diterapkan tidak sama dengan pemakaian batu tempel pada dinding rumah yang banyak dijumpai di Jl. Dr. Cipto. Hal ini disebabkan karena usia bangunan ini lebih muda daripada rumah-rumah dengan batu tempel. Bangunan rumah tinggal ini pernah menjadi tempat tinggal sedikitnya 2 keluarga Belanda. Selain itu rumah ini pernah ditinggali oleh 3 hingga 4 orang Belanda hitam yang merupakan orang Maluku yang menjadi anggota tentara Belanda. Adanya gardu didepan rumah memperkuat informasi ini dan setelah

itu kepemilikan rumah jatuh ketangan keluarga Mangunagoro. Akhirnya pada tahun 1964 rumah ini dibeli oleh keluarga pengusaha Kwan.

Arti Penting : Termasuk rumah tinggal yang bergaya Art Deco. Cukup unik karena pada umumnya rumah-rumah di jalan ini menggunakan materi batu tempel yang menjadi ciri khas daerah ini. Karena tampil beda bukan berarti bangunan ini tidak selaras tetapi justru menimbulkan variasi yang menyenangkan. Integritas arsitektural bangunan ini tercermin dari langgam arsitektur Indische dengan pengaruh Art Deco. Kekriyaan pada detail-detail bangunan diselesaikan dengan cermat dan halus. Bangunan rumah ini masih menempati area yang sama walaupun pemilik bangunan telah berganti-ganti. Bangunan ini merupakan satu-satunya diantara sedikit dengan gaya Art Deco di Semarang.

q. Rumah Tinggal drs. Heru Sutyanto/Tan Yat Tiong

Lokasi : Jl.Beteng 65 Semarang

Pemilik : Drs. Heru Sutantyo/ Tan Yat Tiong

Penggunaan : Semula rumah tinggal, sekarang rumah tinggal

Keadaan : Baik

Gambar 22. Rumah Tinggal drs. Heru Sutyanto/Tan Yat Tiong



Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Tahun 2007

Deskripsi : Bangunan nirsetangkup dengan facade tunggal. Terdiri dari satu lantai. Orientasi bangunan ke timur. Pondasi dengan batu dan struktur dengan bata. Dinding diplester dan dicat. Bentuk atap limasan yang ditutup dengan genteng. Terdapat sebuah jendela loteng pada atap utama ini. Ambang atas pintu datar dan pintu memiliki daun ganda yang panelnya berupa panel kayu. Bangunan menganut gaya arsitektur Barok apada abad XIX. Dibatasi dengan jalan berupa pagar tembok. Facade depan dinding dipertinggi sehingga membentuk gunungan berumpak dan berornamen rumit. Pada gunungan terdapat lubang pencahayaan dengan ambang atas melengkung yang diikuti dengan list profil yang berada diatasnya. Puncak gunungan berbentuk

setengah lingkaran. Dibawah tritisan terdapat konsol dari besi. Pada dinding bagian depan diberi alur horisontal pada badan bangunan.

Arti Penting : Keunikan bangunan rumah tinggal ini adalah adanya gunungan pada bagian depan bangunan yang merupakan gaya arsitektur Barok. Gaya arsitektur kolonial ini tampak mencolok di kawasan Pecinan dengan arsitektural dari bangunan ini. Kekriyaan bangunan pada detil gunungan dan pintu jendela sangat halus. Keunikan dari bangunan ini adalah bentuk bangunan itu sendiri yang merupakan rumah yang terbesar dan terindah di kawasan Jl. Beteng.

r. Rumah Tinggal Keluarga Flatterman

Gambar 23. Rumah Tinggal Keluarga Flatterman



Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Tahun 2007

Lokasi : Jl. Kiai Saleh 15 Semarang

Pemilik : Keluarga Flatterman

Tanggal Pembangunan : 1890-an

Penggunaan : Semula rumah tinggal, sekarang rumah tinggal

Deskripsi : Bangunan rumah tinggal ini merupakan bangunan nirsetangkup dengan menara bersegi 6 dan mempunyai facade tunggal. Terdiri dari 2 lantai. Bangunan menghadap ke timur. Pondasi bangunan dari tembok bata dengan struktur berupa konstruksi kayu dan dinding bata. Bentuk atap adalah modifikasi dari pelana dan ditutup dengan genteng, serta sirap dari batu ley pada atap menara. Terdapat jendela loteng pada bagian depan, samping dan belakang bangunan. Serambi hanya terdapat pada bagian depan bangunan dengan atap yang merupakan lantai kedua bangunan. Pada serambi ini terdapat sebuah kolom. Baik pintu maupun jendela memiliki daun ganda. Pada bagian atas jendela terdapat bouvenlicht. Halaman depan dari bangunan ini juga cukup luas. Rumah ini mewakili rumah tinggal pedesaan Inggris dengan menara yang khas pada arsitektur Inggris.

Sejarah : Ditinjau dari pemilik-pemilik terdahulu, ternyata bangunan ini merupakan bangunan yang cukup bersejarah. Pemilik pertama adalah Flatterman, seorang berkebangsaan Belanda. Kemudian juga pernah ditempati janda pahlawan RI, Jend. Oerip Soemohardjo, yaitu Raden Ayu Rohmah Subroto. Raden Mas Soeryo Soemarwoto juga pernah tinggal disini. Sekarang pada bangunan tambahan, juga digunakan sebagai kantor Alliance Francais Semarang. Ditambahkan pula garasi pada bangunan tambahan.

Arti Penting : Integritas langgam arsitektur berupa langgam gaya rumah pedesaan Inggris yang mencerminkan masa itu dengan terpengaruh gaya Suburbia. Kekriyaan yang ditampilkan oleh bangunan ini tampak halus dan mempunyai estetika yang tinggi. Bangunan masih menempati setting sebagai rumah tinggal dengan bahan bangunan yang dominan berupa bata dan kayu yang berkesan kerang kayu. Penghuni rumah tinggal ini dicurigai masih keturunan dari keluarga Flatterman. Peran bangunan sebagai pembentuk citra kawasan sangat berarti terutama di kawasan Gergaji. Nilai sejarah yang dikandung oleh

bangunan ini dan sempat dihuni cukup lama oleh janda pahlawan Oerip Soemohardjo memberikan arti penting yang cukup besar bagi bangunan rumah tinggal ini. Keistimewaan bangunan ini berupa bentuk bangunan yang seperti rumah pedesaan Inggris dan menggambarkan bahwa bangunan ini merupakan bangunan peristirahatan yang terletak jauh dari pusat kota. Selain itu metode konstruksi kerangka kayu yang diterapkan pada bangunan ini menambah keunikan tersendiri. Bangunan rumah tinggal ini merupakan satu diantara rumah bergaya Inggris di Semarang.

A.3. Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Melindungi Bangunan Kuno/Bersejarah

A.3.1. Upaya Pemkot Semarang Dalam Melindungi Bangunan Kuno/Bersejarah

Dimulai dari usaha Pemerintah Kota Semarang untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap bangunan kuno/bersejarah maka Pemkot juga menyelenggarakan Semarang Pesona Asia untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara sekaligus menggugah kesadaran pada masyarakat untuk menghargai dan mencintai peninggalan sejarah atau warisan budaya bangsa. Semarang Pesona Asia (SPA) 2007 sebagai suatu kegiatan (event) akbar yang diselenggarakan Pemerintah bersama seluruh masyarakat akan digelar selama 5 (lima) hari pada akhir bulan Agustus sampai dengan awal September 2007 lalu yang rencananya dapat menjadi event tahunan di Kota Semarang.

Kegiatan yang untuk sementara waktu dipusatkan di daerah-daerah strategis seperti Simpang Lima, PRPP, Kawasan Tugu Muda, Lawang Sewu, Gedong Batu, diikuti oleh 18 negara Asia dan dihadiri perwakilan negara sahabat, duta besar, investor, pengusaha, turis domestik maupun mancanegara. Adapun maksud diadakannya SPA 2007 ini adalah untuk mengenalkan dan memasarkan kota Semarang kepada masyarakat luar, bahwa kota Semarang adalah kota yang menarik untuk dikunjungi, dengan keamanan kota yang senantiasa kondusif, tertib, indah, penduduk yang ramah dan menyenangkan. Dalam rangka mendukung SPA tersebut Pemkot meluncurkan program

city walk yang berlokasi di kota lama Semarang sepanjang kurang lebih 400 meter.⁷⁸

Selama ini Pemerintah Kota Semarang telah berusaha memberikan perlindungan terhadap bangunan kuno/bersejarah untuk menjaga dari kelestariannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melalui Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang dan Himpunan Ahli Perawatan Bangunan Indonesia (HAPBI) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang membuat draf kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Semarang agar para pemilik bangunan kuno mau merawat bangunan-bangunan yang menjadi cagar budaya.⁷⁹
2. Dalam hal proses pengalihan fungsi terhadap bangunan-bangunan kuno bersejarah, Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta instansi terkait yaitu Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L), Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K), Ikatan Arsitek Indonesia, dan HAPBI melakukan rapat koordinasi sebelum mengizinkan suatu bangunan kuno bersejarah dialihfungsikan berdasarkan prinsip-prinsip konservasi.⁸⁰

⁷⁸ Endang Riwayati, *Loc.cit.*

⁷⁹ Irwansyah, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Kawasan, Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang, *Hasil Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2008.

⁸⁰ Nik Sutiyani, *Loc.cit.*

3. Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) yang terdiri atas pengurus dan dewan penasihat yang diisi kalangan birokrat, pengusaha, akademisi, LSM, budayawan/seniman, dan media massa.⁸¹ Dibentuknya BPK2L bukan hanya sekadar aplikasi dari Surat Keputusan Wali Kota untuk mengkonservasi kawasan Kota Lama.
4. Selain itu sebagai *cities advisory* bagi Kota Semarang dibentuk Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) yang diketuai oleh Prof. Eko Budihardjo.⁸² DP2K berperan untuk memberikan saran dan masukan mengacu pada isu dan persoalan krusial yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang sehingga merupakan bagian pelaksanaan sistem dan prosedur kebijakan pembangunan yang transparan, aspiratif, dan partisipatif.

A.3.2. Hambatan Yang Dihadapi Pemkot Semarang Dalam Melindungi Bangunan Kuno/Bersejarah

Namun pada kenyataannya upaya pemerintah tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat karena mengalami beberapa hambatan. Adapun faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

⁸¹ Suara Merdeka, *Insentif Bagi Pemilik Bangunan Kuno, "Tergantung Kriteria"*, Semarang, Rabu, 08 Agustus 2007.

⁸² Suara Merdeka, *Opini DP2K Akan Diperkuat*, Semarang. Jumat, Tanggal 12 Agustus 2005 (Sumber: <http://google.com>, diakses tanggal 19 Mei 2008).

- a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami mengenai prinsip perlindungan bangunan kuno/bersejarah.
- b. Kurangnya sosialisasi terhadap penanganan bangunan kuno kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana seharusnya memperlakukan bangunan kuno bersejarah sebagai warisan budaya bangsa yang harus dipertahankan.
- c. Pemilik bangunan kuno tidak peduli terhadap bangunan miliknya. Pemilik bangunan merasa bisa menguasai penuh dan berhak memperlakukan apa saja sesuai kehendaknya baik membongkar, memugar sembarangan, atau bahkan tidak mau merawat bangunan kuno miliknya dikarenakan biaya pemeliharaan yang cukup besar.
- d. Banyak bangunan-bangunan kuno yang sulit diketahui atau dilacak siapa pemiliknya.

B. PEMBAHASAN

B.1. Kondisi Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Bangunan Kuno/ Bersejarah Di Kota Semarang

Dari beberapa bangunan kuno di Kota Semarang tersebut, banyak yang telah dialihfungsikan seperti yang terjadi pada bangunan-bangunan kuno bersejarah di kawasan Kota Lama. Selain itu tidak sedikit bangunan tersebut dialihwujudkan (dibongkar atau dirubah baik sebagian maupun seluruhnya) secara sembarangan karena seringkali dialihfungsikan. Hal ini tentu saja membuat gerah kita semua dan harus

segera diatasi karena di dalam ciptaan bangunan kuno/ bersejarah tersebut terkandung nilai historis dan seni bangunan atau arsitektur yang bernilai tinggi sebagai warisan budaya bangsa.

Karya ciptaan bangunan kuno tersebut mengandung nilai seni arsitektur yang sangat tinggi dari hasil kreatifitas manusia. Kreatifitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi, serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi harus dilindungi karena untuk dapat melahirkan suatu karya yang mempunyai nilai seni yang tinggi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pengorbanan akan waktu, tenaga, pikiran bahkan biaya untuk menciptakan karya-karya intelektual tersebut sehingga sudah menjadi suatu keharusan jika haknya diberikan penghargaan yang bersifat eksklusif sebagai hak kekayaan intelektual (*intelektual property rights*) sekaligus perlindungan hukumnya di bidang hak cipta. Oleh karena itu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan bentuk pengakuan, penghargaan serta perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta sekaligus obyek hak ciptaannya khususnya di bidang seni.

Di sini dibutuhkan hukum untuk mengubah masyarakat secara sadar sebagai *social engineering (law as social engineering)*. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku dalam masyarakat tetapi mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki. Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-

perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses-proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Sebaliknya, apabila konsepnya justru merupakan kebalikan dari itu, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu peranan hukum yang demikian itu berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Perencanaan membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan yang mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Apabila pilihan telah ditentukan, maka pilihan inilah yang akan diwujudkan melalui hukum. Hukum dibentuk untuk melindungi hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra secara yuridis melalui Undang-Undang Hak Cipta.

Bagaimana hukum memandang warisan budaya. Konsep warisan budaya itu sendiri dilihat sebagai bentuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi kebudayaan tradisional (*traditional cultural expression*) dari masyarakat lokal Indonesia, baik dalam bentuk teknologi berbasis tradisi maupun ekspresi kebudayaan seperti seni musik, tari, seni lukis atau seni rupa lainnya, seni bangunan atau arsitektur, tenun, batik, cerita, dan legenda. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya,

pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Perilaku dan sikap masyarakat semacam ini memang rentan untuk terjadinya *misappropriation* atas warisan budaya mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memandang keuntungan pribadi sebagai tujuan hidupnya.⁸³ Di sinilah faktor hukum memainkan peran yang penting. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti, siapa yang berhak. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya. Bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan sarana atau perangkat hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap bangunan-bangunan kuno/ bersejarah sebagai warisan budaya bangsa.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian "*mengumumkan* atau *memperbanyak*", termasuk kegiatan

⁸³ Agus Sardjono, *Op.cit.*

menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Berarti setiap kegiatan *perbanyakan* menurut Pasal 1 angka 6 UUHC 2002 yaitu penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk *mengalihwujudkan* secara permanen atau temporer tanpa izin pemegang hak cipta, dalam hal ini negara menyangkut kepentingan obyek hak cipta yang dimaksud dari ancaman kepunahan terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain merupakan tindakan pelanggaran terhadap UUHC 2002.

Menurut Pasal 10 ayat (1) UUHC 2002, dalam hal negara ditetapkan sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya maka obyek ciptaan bangunan kuno yang tidak diketahui siapa penciptanya atau pemiliknya otomatis hak ciptanya dikuasai atau dipegang oleh negara sehingga tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, atau bahkan mengalihwujudkan sembarangan tanpa izin pemegang hak cipta yaitu negara. Ketentuan ini lebih diarahkan pada perlindungan terhadap objek hak cipta yang dimaksud yaitu karya ciptaan bangunan kuno/ bersejarah dari ancaman kepunahan, terutama pengalihannya

dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain. Nilai historislah yang menjadi tolak ukur utama dalam penentuan kaedah ini, meskipun secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk benda berwujud mempunyai nilai jual yang tinggi sebagai aset wisata dari nilai seni ciptaan bangunan atau arsitektur yang khas dan unik. Wujud perlindungan itu teristimewa dalam hal melindungi karya peninggalan sejarah sebagai warisan budaya bangsa.

Menurut Pasal 12 ayat (1) huruf g UUHC 2002, arsitektur yang terdapat pada bangunan kuno/ bersejarah merupakan ciptaan di bidang seni yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Apabila ada perbuatan yang melawan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta maupun obyek hak ciptaan bangunan kuno/ bersejarah yang bertentangan dengan UUHC 2002 maka hal tersebut merupakan pelanggaran. Tindakan menjual, menyewakan kepada pihak lain bahkan sampai mengalihwujudkan bangunan kuno tanpa izin pemegang hak ciptanya, dalam hal ini negara, merupakan pelanggaran terhadap hak cipta karena perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta atas Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002.

Perubahan yang terjadi terhadap bangunan-bangunan kuno/ bersejarah tersebut harus dapat dilihat sejauh mana batas kewajarannya, apa hanya menata kembali wujud fisik luarnya, atau merubah bentuk dan strukturnya. Menurut Pasal 15 huruf f UUHC 2002 perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya

arsitektur, contohnya pada ciptaan bangunan, bukan suatu pelanggaran hak cipta. Tetapi apabila melakukan perubahan, penambahan jumlah suatu ciptaan bangunan baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk *mengalihwujudkan* secara permanen atau temporer tanpa didasari pertimbangan pelaksanaan teknis maka merupakan suatu pelanggaran. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, teknis berarti bersifat teknik atau secara teknik, yaitu cara melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan seni.⁸⁴ Dalam hal ini pertimbangan teknis merupakan cara atau pedoman yang digunakan untuk mengerjakan ciptaan bangunan di bidang seni arsitektur khususnya terhadap ciptaan bangunan kuno/ bersejarah tersebut. Sedangkan terhadap alasan pertimbangan pelaksanaan teknis yang diatur dalam UUHC 2002 tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut baik mengenai petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya sehingga belum diketahui secara jelas apa ruang lingkup atau batasan dari pelaksanaan teknis yang dimaksud tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC 2002 memang belum diketahui masyarakat luas. Padahal perlindungan terhadap ciptaan bangunan kuno/ bersejarah menyangkut nilai seni arsitektur tinggi yang patut diberikan perlindungan dari sisi pencipta atau pemegang hak cipta maupun obyek ciptaannya tersebut. Namun pada kenyataannya

⁸⁴ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*, Difa Publisher, Tanpa Tahun, Hal. 801.

pengalihfungsian bangunan kuno dilakukan dengan adanya perubahan-perubahan bentuk atau pengalihwujudan secara keseluruhan ataupun bagian substansial tanpa mempertimbangkan alasan pelaksanaan teknisnya. Dengan kata lain banyak bangunan kuno yang terancam hilang atau berubah bentuk baik sebagian maupun keseluruhan.

Sekalipun UUHC maupun UUBCB bertujuan untuk memberikan perlindungan bangunan kuno/ bersejarah, di masa sekarang ini masyarakat mempunyai kesadaran tentang penggunaan hukum untuk menyusun dan mengubah masyarakat, namun masih harus dipertanyakan seberapa jauh hukum mampu dipakai sebagai instrumen yang demikian dan jika hukum memang mampu menimbulkan pengaruh dan efek yang dikehendaki maka seberapa jauh pengaruh tersebut dapat ditimbulkan oleh hukum juga perlu diketahui. M. Friedman melihat hukum sebagai komponen struktur, substansi, dan kultur hukum.⁸⁵ Ketiga komponen tersebut berada di dalam suatu proses interaksi satu sama lain dan membentuk satu totalitas yang dinamakan sistem hukum. Aspek substansi merupakan rantai pengikat dari rangkaian aspek-aspek yang lain yaitu aspek struktur dan kultur hukum. Jadi substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Sedang komponen struktur merupakan institusi-institusi yang telah ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan,

⁸⁵ Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, Hal. 154.

menegakkan, mempertahankan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dengan komponen struktur ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Di sisi lain komponen kultur hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan. Menurut Friedman, kultur hukum itu mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum. Menurut Darmodihardjo dan Sidharta, budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Sementara itu Soekanto dan Taneko mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.⁸⁶ Indikator - indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1) pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*legal awareness*),

⁸⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 158.

2) pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*legal acquaintance*),

3) sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*),

4) pola perilaku hukum (*legal behaviour*).

Walaupun memang tidak mudah untuk memastikan apakah hukum memang telah berhasil menimbulkan perubahan seperti yang dikehendaki.

Dimulai dari pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan hukum (*legal awareness*) mengenai perlindungan karya seni ciptaan bangunan kuno/ bersejarah tersebut, apakah dapat digunakan sebagai landasan atau acuan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi pengaturan terhadap perlindungan bangunan kuno/ bersejarah selama ini. Dalam rangka perlindungan karya cipta bangunan kuno/ bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, pada dasarnya telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai komponen substansi hukum itu sendiri yang menjadi inventarisasi perangkat hukum mengenai perlindungan bangunan-bangunan kuno bersejarah.

Bangunan kuno/ bersejarah merupakan salah satu obyek benda cagar budaya karena menurut Pasal 1 ayat (1) UUBCB pengertian benda cagar budaya adalah :

"benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang

berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.”

Penjelasan atas Undang-Undang RI nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menyatakan bahwa benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional, serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa dan sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya, maka demi pelestarian budaya bangsa benda cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan, untuk keperluan ini benda cagar budaya perlu dikuasai oleh negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa upaya melestarikan benda cagar budaya dilaksanakan selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkuat jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Oleh karena itu perlindungan benda cagar budaya termasuk didalamnya perlindungan terhadap bangunan-bangunan kuno/bersejarah.

Dalam kerangka pelestarian benda cagar budaya khususnya karya ciptaan bangunan kuno/ bersejarah semata-mata bukan hanya keindahan dari seni atau nilai arsitektur bangunannya saja tetapi yang juga nilai historis atau informasi yang terkandung di dalamnya karena bangunan-bangunan tersebut merupakan kesinambungan atau

penghubung masa lalu dan saat ini yang dapat memberikan informasi-informasi yang penting tentang masa lalu bagi masyarakat saat ini. Berdasarkan pertimbangan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional dengan beberapa langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya perlu diatur melalui suatu perangkat peraturan tentang benda cagar budaya.

Ketentuan mengenai benda cagar budaya pada awalnya diatur dalam Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515). Keberadaan Ordonnantie tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya sehingga dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan benda cagar budaya dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan kemudian juga ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Berdasarkan ketentuan UU Benda Cagar Budaya Pasal 13 ayat (2) perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 26 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1993 atas Pelaksanaan UU Benda Cagar Budaya, prinsip pelestarian benda cagar budaya meliputi aspek keaslian bentuk, bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak untuk mempertahankan nilai sejarah dan budayanya. Menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 15 ayat (2) huruf d dinyatakan bahwa mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya dilarang tanpa izin dari Pemerintah. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1993 tersebut,

“Pemugaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat strukturnya bila diperlukan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Pemugaran meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.”

Kemudian pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas diancam dengan pidana penjara dan/ atau denda yang diatur dalam Pasal 26 UUBCB yaitu “Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)".

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dijelaskan bahwa untuk pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak mengurangi kewajiban untuk tetap tunduk kepada ketentuan tentang Hak Cipta yaitu UU No. 19 Tahun 2002. Menurut UUHC, penggandaan tanpa seizin pemegang hak cipta, termasuk memperbanyak merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Mengenai perubahan atas ciptaan bangunan dalam ketentuan Pasal 15 huruf f UU Hak Cipta hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis atas ciptaan bangunan.

Perlindungan bangunan kuno/bersejarah diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini maka semua penyelenggaraan bangunan gedung baik pembangunan maupun pemanfaatan yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, serta oleh pihak asing wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang

Bangunan Gedung untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib dalam rangka menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi baik informasi maupun arsitektur dan rekayasa sehingga diperlukan adanya penerapan yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang telah ada, khususnya nilai-nilai kontekstual, tradisional, spesifik, dan bersejarah.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan. Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dan pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/ atau karakter cagar budaya yang dikandungnya. Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/ atau karakter cagar budaya harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (29) dan (30) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya dan pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan gedung tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

Menurut SK Walikota Daerah Tingkat II Semarang No. 646/50/1992, bangunan kuno/ bersejarah merupakan bangunan yang berumur lebih dari 50 tahun atau memiliki masa bangunan sedikit-sedikitnya berumur 50 tahun dan dikategorikan mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, atau *kesenian*.

SK Walikota Semarang No.646/50/Tahun 1992 tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengatur tata cara membangun, mengubah atau membongkar sebagian atau seluruh bangunan kuno/bersejarah yang dinilai layak untuk dilestarikan, untuk menjabarkan strategi pembangunan berwawasan jati diri melalui arsitektur dengan melindungi bangunan kuno/bersejarah. Bangunan yang dilindungi tersebut adalah :

1. Bangunan yang mempunyai keistimewaan atau superlativitas, yaitu bangunan yang memiliki keistimewaan seperti misalnya terpanjang, tertinggi, tertua, tersebar, yang pertama dan sebagainya.

2. Bangunan kuno/bersejarah yang memiliki nilai estetika yang tinggi dalam hal bentuk, struktur.
3. Kejamakan, yaitu bangunan kuno/bersejarah yang memiliki suatu kelas, jenis atau ragam khusus yang spesifik pada kurun waktu tertentu.
4. Citra Lingkungan, yaitu bangunan kuno/bersejarah yang kehadirannya sangat bermakna untuk meningkatkan citra lingkungan sekitarnya.

Dalam SK No.646/50/Tahun 1992 tersebut terdapat 101 buah bangunan yang dilindungi dan terhadap bangunan-bangunan kuno/bersejarah tersebut harus dilakukan konservasi, yaitu segenap proses pengelolaan suatu tempat, khususnya menyangkut bangunan kuno/ bersejarah agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik, mencakup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, atau revitalisasi. Preservasi merupakan pelestarian suatu bangunan kuno/bersejarah seperti keadaan aslinya tanpa adanya perubahan termasuk upaya mencegah atau menangkai penghancuran. Restorasi atau rehabilitasi merupakan pengembalian suatu bangunan kuno/bersejarah ke keadaan semula, dengan menghilangkan tambahan dan memasang komponen asli semula tanpa menggunakan bahan baru. Rekonstruksi merupakan pengembalian suatu bangunan kuno bersejarah semirip mungkin dengan keadaan semula baik menggunakan bahan lama maupun bahan baru. Adaptasi atau revitalisasi adalah merubah kegunaan fungsi yang lebih sesuai tanpa melakukan perubahan

menyeluruh atau hanya mengakibatkan dampak sekecil mungkin. Berhubungan dengan itu, prinsip konservasi bangunan kuno/bersejarah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Konservasi dilandasi atas penghargaan terhadap keadaan semula dari bangunan kuno/bersejarah meliputi hal-hal sebagai berikut :
2. Konservasi bangunan kuno/bersejarah sedapat mungkin tidak mengubah atau menghilangkan bukti-bukti sejarah yang dimilikinya
3. Melalui upaya konservasi dapat dijamin keamanan dan pemeliharaan bangunan kuno/bersejarah dimasa mendatang sehingga makna kulturalnya tetap terpelihara.

Beberapa persyaratan konservasi bangunan kuno/bersejarah yang harus diperhatikan adalah :

1. Bangunan kuno/bersejarah harus tetap berada pada lokasi historisnya
2. Pemindahan seluruh atau sebagian dari bangunan kuno/bersejarah tidak diperkenankan kecuali bila hal tersebut merupakan satu-satunya cara guna menjamin kelestariannya.
3. Dalam upaya konservasi wajib dijamin terpeliharanya latar visual yang cocok seperti bentuk, skala, warna, tekstur, dan bahan bangunan. Setiap perubahan baru yang akan berakibat negatif terhadap latar visual tersebut harus dicegah.

Perlindungan bangunan kuno bersejarah juga dilakukan Pemerintah Kota Semarang yang dikelola oleh Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BP2KL) dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk

melaksanakan kewenangan konservasi dan revitalisasi⁸⁷ kawasan Kota Lama Semarang. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama sehubungan dengan perlindungan bangunan kuno/bersejarah yang terfokus di kawasan Kota Lama Semarang karena merupakan warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan, dan budaya yang tinggi. Ketentuan dalam perda itu menjadi pedoman, landasan, dan garis besar kebijakan bagi pelestarian dan revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang. Tujuannya untuk melindungi kekayaan historik dan budaya serta mengembangkannya untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata. Perda RTBL Kawasan Kota Lama itu memuat rumusan kebijakan pelestarian dan revitalisasi yang menyatu dengan susunan dan nilai arsitektural kawasan Kota Lama. Perda tersebut disusun dan ditetapkan sebagai landasan hukum untuk menyiapkan perwujudan kawasan Kota Lama dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kawasan itu yang dilakukan pemerintah, swasta, dan masyarakat menyangkut pemeliharaan, perbaikan, dan pemugaran gedung dan bangunan bukan gedung, berbagai pelestarian bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

⁸⁷ Yang dimaksud dengan konservasi atau pelestarian adalah berbagai upaya memelihara, mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi suatu kawasan, situs, obyek, bangunan atau tempat dengan mempertahankan nilai historis dan budayanya. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali kawasan, bangunan-bangunan, jalan-jalan dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penataan arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya. Lihat Pasal 1 Perda RTBL Kawasan Kota Lama No. 16 Tahun 2003

Menurut Pasal 4 huruf a Perda RTBL Kawasan Kota Lama No. 16 Tahun 2003 bertujuan untuk melindungi kekayaan historik dan budaya di kawasan Kota Lama baik yang berupa bangunan kuno bersejarah maupun bentuk kota yang ada. Adapun prinsip konservasi bangunan berdasarkan Pasal 38 Perda RTBL Kawasan Kota Lama tersebut dilaksanakan dengan cara preservasi, restorasi, rehabilitasi, adaptasi, atau rekonstruksi.⁸⁸ Selain itu rambu-rambu perlindungan terhadap bangunan kuno bersejarah tersebut meliputi : Tata letak bangunan harus dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya (Pasal 41); Dinding muka dan atau fasade bangunan kuno harus dipertahankan sesuai kondisi aslinya (Pasal 42); (1) Elemen dan ornamen asli bangunan harus dipertahankan, (2) Elemen dan ornamen tambahan yang tidak memperhatikan makna bangunan bersejarah harus dilepas/dihilangkan (Pasal 43); (1) Warna asli yang digunakan pada bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah harus dipertahankan, (2) Warna pada bangunan kuno yang tidak memiliki nilai sejarah dapat disesuaikan dengan fungsi dan harus kontekstual (Pasal 44).

Perlindungan terhadap bangunan warisan budaya khususnya bangunan-bangunan kuno bersejarah belum menjadi kesadaran luas di masyarakat walaupun

⁸⁸ Yang dimaksud dengan preservasi adalah bagian dari konservasi yang berupa pemeliharaan dan pencegahan suatu tempat atau bangunan dari perubahan atau kehancuran agar tetap sesuai dengan keadaan aslinya. Restorasi adalah bagian dari konservasi yang berupa pengembalian kondisi fisik bangunan keaslinya dengan cara memasang kembali unsur-unsur yang hilang tanpa menggunakan bahan baru atau dengan membuang unsur-unsur baru. Rehabilitasi adalah bagian dari konservasi yang berupa perbaikan dan pengembalian kondisi bangunan yang rusak atau menurun dengan menjaga nilai historisnya sehingga dapat berfungsi kembali. Adaptasi adalah bagian dari konservasi yang berupa perubahan sebagian kecil bangunan atau tempat-tempat agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang lebih diperlukan. Rekonstruksi adalah bagian dari konservasi yang berupa pengembalian suatu tempat atau bangunan semirip mungkin dengan aslinya dengan menggunakan bahan baru yang telah diteliti. Lihat Pasal 1 Perda RTBL Kawasan Kota Lama No. 16 Tahun 2003.

telah ada perangkat hukumnya tetapi prinsip perlindungan dalam perundang-undangan tersebut belum banyak tersosialisasikan di dalam masyarakat karena pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan hukum (*legal awareness*) mengenai perlindungan karya seni ciptaan bangunan kuno/ bersejarah sangat minim sekali. Sebagai bahan acuan mengenai kondisi pengaturan hukum mengenai perlindungan bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang, penulis telah menanyakan kepada beberapa responden yang akan disajikan dalam tabel spesifikasi berikut :

Tabel 2. Tabel Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perlindungan Bangunan Kuno/Bersejarah

| Variabel Pertanyaan | Jumlah Responden | | |
|--|-------------------------|-----------------|----------------|
| | f (tidak tahu) | f (kurang tahu) | f (mengetahui) |
| Apakah Saudara mengetahui bahwa bangunan milik Saudara termasuk bangunan kuno bersejarah yang dilindungi ? | 1 | 5 | 4 |
| Apakah Saudara mengetahui dan | 1 | 5 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| memahami perangkat peraturan tentang perlindungan bangunan kuno bersejarah ? | | | |
| Apakah Saudara mengetahui adanya bantuan Pemerintah untuk pelestarian bangunan kuno ? | 8 | 0 | 2 |

Keterangan :

Responden dalam penelitian ini antara lain :

1. Soeranto : Juru kunci Lawang Sewu
2. Rm. Fajar Muhammad MSF : Pastor Paroki Gereja Admodirono
3. Pendeta MM Pontoh : Pengurus Gereja Blenduk
4. Suradi : Karyawan Toko Oen
5. Chris Dharmawandi : Penyewa eks Pabrik Limun Fresh
6. Sri Wardhani Murbaningsih : Kepala SMA Ibu Kartini
7. Bp. Gunawan : Pemilik hunian di Jl. Dr. Cipto No. 159
8. Bp. Condro : Pemilik hunian di Jl. Dr. Cipto No. 173
9. Bp. Hendra : Keluarga besar Kwan di Jl. Dr. Cipto 248
10. Bp. Iskak Hartoyo : Keluarga Pemilik hunian di Jl. Beteng 65

Berdasarkan data yang telah disajikan dalam tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebagian besar pemilik bangunan kuno kurang mengetahui bahwa bangunannya termasuk bangunan yang dilindungi. Hal ini disebabkan karena tidak ada sosialisasi langsung dari Pemerintah mengenai penetapan bangunan sebagai bangunan kuno/bersejarah yang dilindungi melalui SK Walikota Semarang.
2. Sebagian besar pemilik bangunan kuno kurang mengetahui atau memahami perangkat peraturan yang melindungi bangunan kuno miliknya, baik mengenai bentuk pelanggaran maupun sanksi yang dikenakan. Mereka hanya terbatas mengetahui UU Benda Cagar Budaya tidak dengan perangkat peraturan yang terkait lainnya, misal UU Hak Cipta, UU Bangunan Gedung.
3. Hampir seluruh pemilik bangunan kuno menyatakan bahwa tidak ada upaya Pemerintah untuk memberikan dana bantuan untuk pelestarian bangunannya. Dana pemeliharaan ataupun pelestarian hanya bersumber dari anggaran pemilik bangunan kuno sendiri.

Minimnya *legal awareness* mengenai perlindungan bangunan-bangunan kuno bersejarah menyebabkan kondisi pengaturan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dan pelestarian bangunan kuno tidak berjalan efektif. Kemudian dari hasil pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*legal acquitance*) mengenai prinsip perlindungan bangunan-bangunan kuno tersebut, sangat disayangkan bahwa pembentukan Perda hanya terfokus kepada perlindungan bangunan cagar budaya di kawasan Kota Lama Semarang saja, walaupun dari hasil penelaahan antara peraturan yang diterbitkan di tingkat nasional dengan

peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah memang tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain.

B.2. Pengalihfungsian Bangunan Kuno/Bersejarah Menurut UUHC 2002

Maupun Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya

B.2.1. Pengalihfungsian Bangunan Kuno/Bersejarah Menurut Ketentuan UUHC 2002

Semakin majunya pembangunan kota menuntut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga membuat pemilik bangunan kuno memanfaatkan bangunannya untuk kegiatan ekonomi. Semakin lama semakin banyak bangunan kuno yang berubah fungsi, seperti Restoran Ikan Bakar Cianjur dari gedung eks Pengadilan Negeri, Pabrik Limun Fresh menjadi Galeri Seni Semarang, maupun wacana Lawang Sewu akan menjadi hotel. Bila hal tersebut dikaitkan dengan kegiatan perlindungan maupun pelestarian bangunan kuno bersejarah, pemanfaatan bangunan lama untuk mengakomodasi kegiatan baru yang relevan melalui alih fungsi dapat dipahami sebagai upaya interpretasi baru terhadap warisan budaya.

Apa yang dilakukan ini sebenarnya merupakan aplikasi dari teori pemberian fungsi dan makna baru bagi bangunan bersejarah. Upaya yang cukup berhasil ini dengan sendirinya membuat beratnya kendala biaya dalam pelestarian bangunan kuno bersejarah menjadi berkurang, atau bahkan hilang sama sekali. Bangunan-bangunan kuno dengan arsitektur yang indah yang sekarang banyak dibiarkan terbengkalai, tidak terawat, dapat diberi sentuhan dan fungsi baru yang lebih komersial. Dengan demikian, biaya pemeliharaan yang tinggi dapat tertutup.

Dari hasil penelitian di atas, hal tersebut dapat dilakukan pada beberapa bangunan kuno bersejarah yang kemudian difungsikan secara lebih *up to date*, misalnya sebagai *factory outlet*, *cafe*, hotel, restoran, galeri, dan lain-lain. Bangunan kuno memiliki citra tersendiri yang cukup memberi keuntungan *brand image* kepada pemilik usaha yang bersangkutan. Disadari atau tidak, hanya dengan fungsi baru yang mendatangkan profit sajalah, bangunan-bangunan kuno seperti itu akan dapat bertahan.

Berdasarkan pemahaman tentang isi peraturan hukum (*legal acquittance*) mengenai prinsip perlindungan bangunan-bangunan kuno bersejarah maka pada dasarnya suatu konsep alih fungsi terhadap karya ciptaan bangunan kuno bersejarah tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 karena hal tersebut tidak diatur di dalam UUHC. Melalui Pasal 12 huruf g UUHC bahwa UU melindungi karya arsitektur, termasuk di dalamnya karya ciptaan bangunan kuno bersejarah yang mempunyai nilai seni dan historis tinggi. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUHC, negara juga memegang hak cipta terhadap karya ciptaan yang tidak diketahui penciptanya atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Hanya saja di dalam pengalihfungsian bangunan dapat terjadi pembongkaran atau suatu perubahan bahkan pengalihwujudan baik secara keseluruhan ataupun bagian substansi dengan menggunakan bahan yang sama atau tidak sama tanpa didasari oleh pertimbangan pelaksanaan teknis terhadap ciptaan bangunan kuno bersejarah tersebut. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 15 huruf f UU Hak Cipta 2002, perubahan yang dilakukan hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan

bangunan kuno bersejarah. Tetapi apabila melakukan perubahan, penambahan jumlah suatu ciptaan bangunan baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk *mengalihwujudkan* secara permanen atau temporer tanpa didasari pertimbangan pelaksanaan teknis maka merupakan suatu pelanggaran.

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, teknis berarti bersifat teknik atau secara teknik, yaitu cara melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan seni.⁸⁹ Dalam hal ini pertimbangan teknis merupakan cara atau pedoman yang digunakan untuk mengerjakan ciptaan bangunan di bidang seni arsitektur khususnya terhadap ciptaan bangunan kuno/ bersejarah tersebut. Sedangkan terhadap alasan pertimbangan pelaksanaan teknis yang diatur dalam UUHC 2002 tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut baik mengenai petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya sehingga belum diketahui secara jelas apa ruang lingkup atau batasan dari pelaksanaan teknis yang dimaksud tersebut.

Menurut Pasal 47 Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa dari Ikatan Arsitek Indonesia, syarat-syarat teknis, sekurang-kurangnya mencakup:⁹⁰

1. Persyaratan bahan dan cara pelaksanaan menyangkut jenis dan uraian teknis pelaksanaan pekerjaan, jenis dan mutu bahan yang dipergunakan, persyaratan tata cara pelaksanaan dan persyaratan teknis lainnya.

⁸⁹ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*, Difa Publisher, Tanpa Tahun, Hal. 801.

⁹⁰ Sumber : <http://www.iai.or.id> diakses tgl 19-02-2008.

2. Persyaratan perlengkapan/peralatan bangunan atau elemen/bagian bangunan yang digunakan, menjelaskan tentang: persyaratan mutu/kualitas produk dan kinerja (*performance*), standar acuan yang digunakan, dan tata cara pengujian.

Mengingat bahwa syarat-syarat teknis mempunyai hubungan sangat erat dengan gambar-gambar dan Rencana Anggaran Biaya, syarat-syarat teknis merupakan keterangan lengkap dari semua hal yang tidak dapat dijelaskan secara/melalui gambar. Oleh karena itu, harus lebih teliti dan cermat agar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) atau gambar-gambar tidak satu bagian pun yang bertentangan satu dengan yang lain.

Dalam hal ini bisa diambil suatu kesimpulan bahwa perubahan yang dilakukan dengan pertimbangan pelaksanaan teknis merupakan cara yang digunakan untuk merubah suatu ciptaan bangunan dengan menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan secara lebih detail dan menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek historis dan orisinalitas (keaslian) serta keandalan/ pengamanan bentuk bangunan asli yang menjadi prinsip perlindungan hak cipta terhadap kepentingan pemegang hak cipta maupun obyek ciptaan bangunan yang dimaksudkan dari ancaman kepunahan, terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain. Hal ini tentunya menyangkut perlindungan suatu seni

arsitektur terhadap bangunan kuno itu sendiri sebagai obyek hak cipta dan negara atau orang sebagai pemegang hak ciptanya.

Mengacu pada pemikiran di atas, pemanfaatan bangunan lama sebagai upaya pelestarian sangat dianjurkan. Namun, sering pembangunan baru pada kawasan bersejarah menjadi sesuatu yang tak terelakkan, khususnya bila kondisi bangunan membahayakan keselamatan dan keamanan pengguna. Namun di lain pihak para pemilik bangunan tetap mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 38 UU Bangunan Gedung. Hak pemilik bangunan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Daerah.
2. Mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dari Pemerintah Daerah karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan.
3. Mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
4. Mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.

Kewajiban pemilik bangunan adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
2. Memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala.

3. Melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung.
4. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung.
5. Memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi.
6. Untuk pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya (menurut Pasal 38 UU Bangunan Gedung mengenai pelestarian);
7. Serta perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.2.2. Pengalihfungsian Bangunan Kuno/Bersejarah Menurut UU Benda Cagar Budaya 1992

Alih fungsi terhadap bangunan kuno bersejarah berdasarkan UU Benda Cagar Budaya sendiri pun tidak dilarang sepanjang dilakukan menurut kaidah konservasi atau pelestarian.⁹¹ Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Benda Cagar Budaya diatur pula bahwa setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Menurut Penjelasan Pasal 26 ayat

⁹¹ Irwansyah, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Kawasan, Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang, *Hasil Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2008.

(2) PP No. 10 Tahun 1993 atas Pelaksanaan UU Benda Cagar Budaya, prinsip pelestarian benda cagar budaya meliputi aspek keaslian bentuk, bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak untuk mempertahankan nilai sejarah dan budayanya. Kemudian pada Pasal 15 ayat (1) UU Benda Cagar Budaya diatur bahwa setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Ayat (2) huruf d-nya menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1993 tersebut adalah :

”Pemugaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat strukturnya bila diperlukan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Pemugaran meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.”

Pelanggaran terhadap tindakan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh (10) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,00).

Selain itu rambu-rambu yang digunakan untuk pemeliharaan bangunan cagar budaya melalui PP No.10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Cagar Budaya, yaitu :

▪ **Pasal 29**

Ayat (1), untuk kepentingan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya, situs, dan lingkungannya;

Ayat (2), termasuk kegiatan yang dapat merusak benda cagar budaya dan situsnya adalah kegiatan :

- a). mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya;
- b). mengurangi, mencemari dan/atau mengubah fungsi situs

▪ **Pasal 34**

Ayat (1), setiap orang tanpa izin Menteri dilarang :

- a). mengambil atau memindahkan sebagian benda cagar budaya ataupun seluruhnya;
- b). mengubah bentuk dan/atau warna benda cagar budaya;
- c). memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya.

Konservasi merupakan istilah yang menjadi payung dari semua kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan internasional yang telah dirumuskan dalam Piagam Burra Tahun 1981. Beberapa batasan pengertian tentang istilah-istilah dasar yang disepakati dalam Piagam Burra, dicantumkan di bawah ini :⁹²

1. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar kandungan makna kulturalnya terpelihara dengan baik yang meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dapat pula mencakup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan revitalisasi.
2. Preservasi adalah pelestarian suatu tempat persis seperti keadaan semula dengan perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran.

⁹² "The Burra Charter for The Conservation of Place of Cultural Significance", 1981, Hal. 2 dalam Sidharta & Eko Budihardjo., *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Besejarah Di Surakarta*, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta, 1989, Hal. 11.

3. Restorasi/rehabilitasi adalah mengembalikan suatu tempat ke keadaan semula dengan menghilangkan tambahan-tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.
4. Rekonstruksi adalah mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru.
5. Adaptasi/revitalisasi adalah merubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai. Yang dimaksud dengan fungsi yang lebih sesuai adalah kegunaan yang tidak menuntut perubahan drastis atau yang hanya memerlukan sedikit dampak minimal.
6. Demolisi adalah penghancuran atau perombakan suatu bangunan yang sudah rusak atau membahayakan.

Mengenai tingkat perubahan yang diakibatkan oleh masing-masing kategori kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :⁹³

Tabel 4. Tingkat Perubahan Kegiatan Konservasi Bangunan

| No | Kegiatan | Tingkat Perubahan | | | |
|----|------------------------|-------------------|---------|--------|-------|
| | | Tidak Ada | Sedikit | Banyak | Total |
| 1 | Konservasi | * | * | * | * |
| 2 | Preservasi | * | - | - | - |
| 3 | Restorasi/Rehabilitasi | - | * | * | - |
| 4 | Rekonstruksi | - | - | * | * |
| 5 | Adaptasi/Revitalisasi | - | * | - | * |
| 6 | Demolisi | - | - | - | * |

Sumber : Dobby, A. "Conservation and Planning", 1978.

⁹³ Dobby, A. "Conservation and Planning", 1978, Hal. 8.

Menurut Prof. Eko Budihardjo, batasan konservasi bangunan kuno tergantung kriteria masing-masing gedung. Fungsi bangunan lama sebisa mungkin adalah *adaptive use*, atau sesuai dengan kebutuhan mutakhir, tetapi tidak boleh berubah bentuk.⁹⁴ Pengalihfungsian beberapa bangunan kuno maupun wacana alih fungsi bangunan Lawang Sewu akan menjadi hotel, bisa terjadi kemungkinan penambahan toilet atau kamar mandi. Hal itu diperbolehkan tetapi ornamen asli atau khas tidak boleh dibongkar karena konservasi bangunan kuno tergantung pada aspek originalitas (keaslian). Dalam pelaksanaan atau penjabaran suatu konsep konservasi perlu ditentukan sejumlah tolak ukur (kriteria) dan motivasi. Tetapi terlebih dahulu harus ada dasar yang kokoh untuk mengetahui bagian mana yang dari bangunan apa yang perlu dilestarikan. Berikut ini adalah beberapa kriteria umum yang bisa digunakan untuk menentukan obyek yang perlu dilestarikan, antara lain :⁹⁵

1. Estetika : Bangunan-bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili prestasi khusus dalam suatu gaya sejarah tertentu. Kerangka pertimbangan dari keputusan-keputusan yang diambil, berbeda-beda, sehingga cukup sulit untuk membuktikan suatu bangunan lebih penting dari lainnya. Tolak ukur estetika ini dikaitkan dengan nilai estetis dan arsitektonis yang tinggi dalam hal bentuk, struktur, tata ruang dan ornamennya.

⁹⁴ Suara Merdeka, *Insentif Bagi Pemilik Bangunan Kuno, "Tergantung Kriteria"*, Semarang, Rabu, 08 Agustus 2007.

⁹⁵ Sidharta dan Eko Budihardjo, *Op.Cit.*, Hal. 13.

2. Kejamakan : Bangunan-bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili satu kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan. Jadi tolak ukur kejamakan ditekankan pada seberapa jauh karya arsitektur tersebut mewakili suatu ragam atau jenis khusus yang spesifik.
3. Kelangkaan : Bangunan yang hanya satu dari jenisnya, atau merupakan contoh terakhir yang masih ada. Jadi termasuk karya yang sangat langka atau bahkan satu-satunya di dunia, tidak dimiliki oleh daerah lain.
4. Peranan Sejarah : Bangunan-bangunan dan lingkungan perkotaan yang telah merupakan lokasi-lokasi bagi peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting untuk dilestarikan sebagai ikatan simbolis antara peristiwa terdahulu dan sekarang.
5. Memperkuat kawasan di dekatnya : Bangunan-bangunan dan bagian kota yang karena investasi di dalamnya, akan mempengaruhi kawasan-kawasan di dekatnya, atau kehadirannya sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan sekitarnya.
6. Keistimewaan : Bangunan-bangunan ruang yang dilindungi karena memiliki keistimewaan, misalnya yang terpanjang, tertinggi, tertua, terbesar, yang pertama, dan sebagainya.

Walaupun telah ada rumusan kriteria yang telah ditetapkan secara umum, tetapi masih memerlukan kesepakatan dari pihak yang mewakili pemilik, ahli-ahli, atau pihak pengelola yang dalam hal ini adalah pemerintah kota. Di dalam

menentukan arah pembangunan suatu bangunan, kita perlu memiliki motivasi-motivasi yang melandasi konsep konservasi tersebut, yaitu antara lain :

1. Motivasi untuk mempertahankan warisan budaya atau warisan sejarah.
2. Motivasi untuk menjamin terwujudnya variasi dalam bangunan perkotaan sebagai tuntutan aspek estetis dan variasi budaya masyarakat.
3. Motivasi ekonomis yang menganggap bangunan-bangunan yang dilestarikan tersebut dapat meningkatkan nilainya apabila dipelihara sehingga memiliki nilai komersial yang digunakan sebagai modal lingkungan.
4. Motivasi simbolis, dimana bangunan-bangunan merupakan manifestasi fisik dari identitas suatu kelompok masyarakat tertentu yang pernah menjadi bagian dari kota.

Antara motivasi yang satu dengan yang lain, selayaknya tidak dilihat secara terpisah melainkan saling memperkuat. Setelah motivasi dan kriteria konservasi dikembangkan lebih mendetail, kemudian obyek konservasi diklasifikasikan dalam kelompok sesuai dengan kedudukan, peran, dan arti obyek dalam lingkungannya sebagai pertimbangan terhadap prioritas konservasi.

Menurut Prof. Eko Budihardjo, beberapa prinsip konservasi yang perlu diperhatikan adalah :

- Konservasi dilandasi atas penghargaan terhadap keadaan semula dari suatu tempat dan sesedikit mungkin melakukan intervensi fisik

bangunannya, supaya tidak mengubah bukti-bukti sejarah yang dimilikinya.

- Maksud dari konservasi adalah untuk menangkap kembali makna kultural dari suatu tempat dan harus bisa menjamin keamanan dan pemeliharannya di masa mendatang.
- Konservasi suatu tempat harus dipertimbangkan segenap aspek yang berkaitan dengan makna kulturalnya tanpa menekankan pada salah satu aspek saja dan mengorbankan aspek yang lain.
- Suatu bangunan atau suatu hasil karya bersejarah harus tetap berada pada lokasi historisnya. Pemindahan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan atau hasil karya tidak diperkenankan kecuali bila hal tersebut merupakan satu-satunya cara guna menjamin kelestariannya.
- Konservasi menjaga terpeliharanya latar visual yang cocok seperti bentuk, skala, warna, tekstur, dan bahan pembangunan. Setiap perubahan baru yang akan berakibat negatif terhadap latar visual tersebut harus dicegah.
- Kebijakan konservasi yang sesuai untuk suatu tempat harus didasarkan atas pemahaman terhadap makna kultural dan kondisi fisik bangunannya.

Suatu proses konservasi mencakup masalah-masalah yang sangat luas dari suatu penyusunan data atas fakta-fakta hingga pengendalian dan pengembangan serta pemeliharannya yang merupakan strategi dalam proses perencanaannya. Kegiatan konservasi harus diawasi dan dikontrol dengan studi yang mendalam

dan profesional dalam mengkaji masalah-masalah makro, mengembangkan rencana yang diusulkan, menganalisa pola-pola spesifik dan menyusun suatu strategi pelaksanaan. Tahapan perencanaannya berlangsung sebagai berikut :

- Tahap 1. Inventarisasi/ Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data yang pertama dilakukan adalah mencoba mencari kebenaran dan bukti-bukti sejarah terhadap obyek dalam rangka mengkaji kelayakannya untuk suatu rencana kegiatan konservasi. Pendataan dimulai dengan survey-survey terhadap dokumen-dokumen yang berupa surat-surat, laporan-laporan, sketsa-sketsa, foto-foto, peta-peta, film dan slide, survey-survey terhadap kondisi fisik, nilai-nilai fisik dan bilamana perlu boleh dilakukan penggalian-penggalian atau pembongkaran guna memperoleh data yang diperlukan sebagai komponen dasar untuk menyusun kebijaksanaan dan membuat rencananya. Sesudah itu dilakukan observasi dan wawancara di lapangan kepada semua pihak yang terkait. Keadaan semula harus direkam terlebih dahulu secara lengkap dan dianalisa agar dapat disusun secara sistematis arti penting tempat tersebut hingga inventarisasi kelompok-kelompok bukti fisik dan menyusun urutan prioritas sesuai dengan artinya, kelangkaannya, kualitas dan sebagainya. Data-data yang diperlukan meliputi : penyusunan data fisik yang penting, keunikan budaya, kebutuhan dan potensi serta tanggapan

terhadap lingkungan fisik, kebutuhan-kebutuhan lain yang menyangkut pemerintahan dan kebutuhan sosial masyarakat, fungsi dan penggunaan lingkungan, keadaan struktur fisik, fungsi-fungsi penting terhadap *site*, membandingkan data-data konservasi pada daerah yang hampir sama mengestimasi data yang tidak ada yang mungkin berpengaruh pada perencanaan ataupun pelaksanaannya.⁹⁶

- Tahap 2. Penyusunan/ Pengolahan Data dan Analisa

Dalam tahapan ini dilakukan terlebih dahulu penyusunan/pengolahan data secara sistematis untuk kemudian dilakukan analisa terhadap setiap obyek konservasi. Dari seluruh data yang diperoleh dilakukan kategorisasi atau klasifikasi jenis-jenis bangunan atau lingkungan yang diteliti, mulai dari skala makro sampai mikro. Dari klasifikasi tersebut diperoleh pengelompokan lingkungan bersejarah, taman/ruang terbuka dan arsitektur kuno.

- Tahap 3. Pengkajian Makna Kultural

Dalam tahapan ini dilakukan pengkajian makna kultural dengan tolak ukur : estetika, kejamakan, kelangkaan, peran sejarah, pengaruh terhadap lingkungan dan keistimewaan. Tidak tertutup pula kemungkinan untuk penggunaan tolak ukur lain seperti misalnya nilai-nilai sosial (kualitas tempat/lingkungan yang

⁹⁶ "The Burra Charter for The Conservation of Place of Cultural Significance", Op.Cit., Hal. 25-27.

menjadi pusat kegiatan spiritual), nilai ilmiah (manfaat tempat/lingkungan terhadap pengembangan ilmu dan jasa informasi), nilai komersial (arti penting suatu tempat/ lingkungan untuk kegiatan yang menghasilkan uang).

- Tahap 4. Penentuan Prioritas dan Peringkat

Dari hasil pengkajian makna kultural dengan menggunakan pembobotan akan diperoleh prioritas dan peringkat dari setiap obyek penelitian. Hasil inilah yang akan dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan konservasi dan strategi untuk implementasinya (tahap 5 dan 6).

- Tahap 5. Perumusan Kebijakan Konservasi

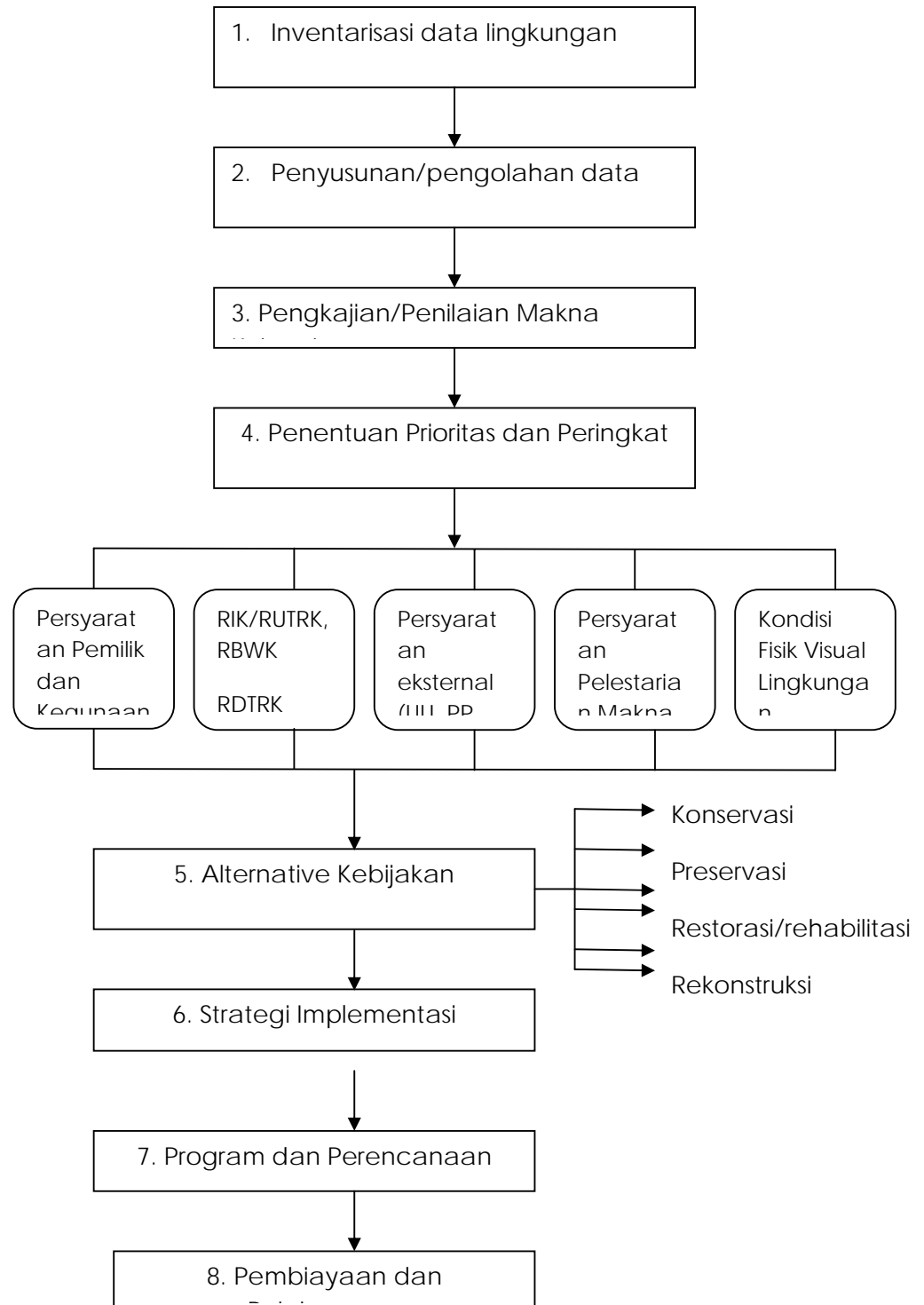
Alternatif kebijakan meliputi konservasi, preservasi, restorasi/rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi/revitalisasi dan demolisi/penghancuran.

- Tahap 6. Strategi Implementasi

- Tahap 7. Program dan Perencanaan

- Tahap 8. Pembiayaan dan Pelaksanaan di Lapangan

Bagan 2. Tahapan/Proses Konservasi



mSumber : Sidharta dan Eko Budihardjo, Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta, Gadjah Mada University Press, 1989.

Konservasi atau pelestarian bukan berarti memuja-muja peninggalan-peninggalan yang ada tetapi bagaimana mempertahankan suatu bangunan yang merupakan bangunan cagar budaya dan menyesuaikannya dengan fungsi sekarang atau fungsi dari bangunan tersebut dikembangkan sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman dengan melibatkan semua pihak, masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. Pelestarian bangunan kuno bersejarah sebagai benda cagar budaya bukan berarti cagar budaya tidak boleh dipergunakan atau tidak boleh tersentuh. Prinsipnya ialah pengelolaan dan pemanfaatan dikembalikan pada status yang layak.⁹⁷ Menurut Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Benda Cagar Budaya diatur bahwa pengelolaan benda cagar budaya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperan serta dalam pengelolaan benda cagar budaya. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Benda Cagar Budaya dijelaskan bahwa pemanfaatan benda cagar budaya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya. Sehubungan dengan pengelolaan terhadap bangunan-bangunan kuno tersebut dapat dilakukan melalui tiga (3) cara yaitu :⁹⁸

1. Sistem kerjasama, bangunan diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola,
2. Sistem sewa, bangunan disewakan pada pihak lain, berdasarkan persetujuan dari Pemerintah, dan

⁹⁷ Kompas, *Cagar Budaya*, “ *Perlindungan Belum Disadari Oleh Banyak Pihak* ”, Tanggal 28 Januari 2008.

⁹⁸ Irwansyah, *Op. Cit.*, Tanggal 09 Mei 2008.

3. Diberdayakan, bangunan dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui instansi tertentu.

B.3. Peranan Pemerintah Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah Sebagai Warisan Budaya Bangsa

Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati dan mengetahui asal-usul serta apa yang pernah terjadi pada masa lampau atas peninggalan-peninggalan karya ciptaan bangunan kuno yang bernilai seni dan historis tinggi. Selain itu merupakan tanggung jawab semua pihak untuk ikut menjaga obyektifitas sejarah dengan melindungi dan melestarikan obyek-obyek peninggalan sejarah itu, tidak hanya karena bentuk/ wujud fisiknya namun juga yang terpenting adalah nilai yang terkandung di dalamnya sehingga dapat diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya dalam rangka mempertahankan eksistensi sebuah perjalanan budaya.

Dalam upaya menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap bangunan kuno/bersejarah maka Pemerintah Kota Semarang kemarin telah menyelenggarakan Semarang Pesona Asia untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara sekaligus menggugah kesadaran pada masyarakat untuk menghargai dan mencintai peninggalan bangunan kuno/sejarah sebagai warisan budaya bangsa.

Pemkot juga melengkapi perangkat peraturan mengenai perlindungan terhadap bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang. Belakangan ini melalui

Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang dan Himpunan Ahli Perawatan Bangunan Indonesia (HAPBI) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang membuat draft kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Semarang agar para pemilik bangunan kuno mau merawat bangunan-bangunan yang menjadi cagar budaya.⁹⁹ Rumusan pemeliharaan bangunan kuno bersejarah tersebut perlu dibuat karena belum banyak masyarakat Kota Semarang yang mengetahui tentang tata cara pengelolaan dan perawatan bangunan kuno. Hal tersebut juga dapat menjadi patokan umum atau aturan main bagi penyewa bangunan kuno meliputi perawatan dan pengelolaan menyangkut kekuatan konstruksi, fungsi atau kegunaan bangunan, dan estetika agar tidak memperlakukan bangunan itu sembarangan. Materi itu berbentuk identifikasi detail empat bangunan kuno yaitu Lawang Sewu, Pasar Jatingaleh, Gereja Blenduk, dan Gedung bekas Pengadilan Negeri di Kota Lama. Saat ini, Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang dan HAPBI sedang merekam atau mendokumentasikan Lawang Sewu dan telah memasuki proses pengolahan data.¹⁰⁰

Dalam proses pengalihan fungsi terhadap bangunan-bangunan kuno bersejarah, Pemerintah Kota Semarang khususnya instansi yang terkait yaitu Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang beserta Badan

⁹⁹ Irwansyah, *Op.Cit.*, Tanggal 12 Mei 2008.

¹⁰⁰ Kompas, *Bangunan Kuno*, “*Didukung, Pembuatan Draf Pengelolaan*”, Tanggal 17 September 2007.

Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L), Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K), Ikatan Arsitek Indonesia dan HAPBI melakukan rapat koordinasi¹⁰¹ sebelum mengizinkan suatu bangunan kuno bersejarah dapat dialihfungsikan berdasarkan prinsip-prinsip konservasi. Rekomendasi konservasi baru akan diberikan setelah HAPBI mendokumentasikan bangunan secara detail. Seperti kasus pengalihfungsian Pabrik Limun Fresh milik Tasripin menjadi Galeri Seni Semarang di Jl. Sri Gunting 5-6. Proses perizinan sudah disiapkan jika HAPBI selesai mendokumentasikan dan memberi laporan, konservasi bangunan tersebut dapat segera dimulai.¹⁰² Dokumentasi bangunan kuno merupakan upaya pengumpulan data detail tentang gambar, kondisi fisik, dan sejarah arsitektur atau penggunaan gedung. Pendokumentasian tersebut juga menyangkut ornamen, mozaik, material, dan kerusakan-kerusakan bangunan. HAPBI kemudian mencocokkan dengan realita di lapangan dan merumuskan tindakan konservasi yang tepat. Pembangunan maupun penambahan fasilitas perlu memperhatikan kaidah-kaidah konservasi.

Pemerintah Kota Semarang juga telah membentuk Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) yang terdiri atas pengurus dan dewan penasihat yang diisi kalangan birokrat, pengusaha, akademisi, LSM, budayawan/seniman, dan media massa. Terpilih sebagai Kepala

¹⁰¹ Yudha, Staf Perencanaan dan Perizinan, Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang, *Hasil Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2008.

¹⁰² Kompas, *Konservasi Bangunan*, “*Rekomendasi Menunggu Dokumentasi HAPBI*”, Tanggal 07 November 2007.

BPK2L adalah Camat Semarang Utara, Surachman SIP, dan Ketua Dewan Penasihat, Prof Eko Budihardjo.¹⁰³ Dibentuknya BPK2L bukan hanya sekedar aplikasi dari Surat Keputusan Wali Kota saja. Lembaga ini bisa menjadi badan yang memiliki hak otonom untuk membuat kawasan Kota Lama jadi lebih hidup dan berwarna. BPK2L punya hak untuk mengkonservasi Kota Lama termasuk bangunan-bangunan kuno bersejarah yang terletak di dalamnya dan mereka punya otoritas ke dalam termasuk kerja sama dengan pihak luar.

Selain itu sebagai *cities advisory* bagi Kota Semarang dibentuk Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) yang diketuai oleh Prof. Eko Budihardjo.¹⁰⁴ DP2K berperan untuk memberikan masukan dan pertimbangan mengenai kebijakan pembangunan kepada pemerintah kota. Semakin kompleksnya permasalahan pembangunan kota, memerlukan keterlibatan para pakar dalam proses pembangunan. untuk mengkaji permasalahan serta merumuskan kebijakan pembangunan, agar keputusan Pemkot mengenai persoalan tersebut bisa berjalan tepat sasaran. DP2K dapat memberikan saran dan masukan mengacu pada isu dan persoalan krusial yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang. Telaah dan rekomendasi tersebut merupakan bagian pelaksanaan sistem dan prosedur kebijakan pembangunan yang transparan, aspiratif, dan partisipatif.

¹⁰³ Suara Merdeka, *Insentif Bagi Pemilik Bangunan Kuno, "Tergantung Kriteria"*, Semarang, Rabu, 08 Agustus 2007.

¹⁰⁴ Suara Merdeka, *Opini DP2K Akan Diperkuat*, Semarang. Jumat, Tanggal 12 Agustus 2005 (Sumber: <http://google.com>, diakses tanggal 19 Mei 2008).

Usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya ciptaan bangunan kuno yang bernilai seni arsitektur dan historis tinggi yang ditetapkan juga sebagai benda cagar budaya dalam rangka melindungi dan melestarikannya, bukanlah merupakan suatu usaha yang mudah. Meskipun telah ditetapkan beberapa perangkat hukum yang berhubungan dengan perlindungan terhadap benda cagar budaya tersebut, namun pada kenyataan di lapangan hal tersebut sangat sulit untuk diterapkan karena sangat tergantung dengan sikap masyarakat sendiri terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) tersebut.

Realitasnya bahwa upaya perlindungan terhadap karya cipta bangunan warisan budaya seperti bangunan kuno/ bersejarah belum menjadi kesadaran luas di masyarakat walaupun perangkat hukumnya sudah ada. Selain itu sikap apatis atau kurangnya kepedulian masyarakat sehingga memperlakukan bangunan-bangunan tersebut secara sembarangan disebabkan karena masyarakat belum bisa memberikan penghargaan terhadap seni arsitektur yang bernilai tinggi serta aspek historis dan kultural yang unik pada ciptaan bangunan kuno/ bersejarah sebagai hasil karya intelektual manusia. Padahal di dalam ciptaan bangunan kuno/bersejarah mengandung sisi-sisi historis dan kultural yang bisa dijadikan sebagai identitas kota sekaligus merupakan aset wisata yang bisa dijual atau dipromosikan. Hal ini tentunya dapat membentuk pola perilaku hukum (*legal behaviour*) pada masyarakat untuk tidak memilih bersikap apatis karena belum bisa memberikan penghargaan

terhadap nilai seni serta aspek historis dan kultural pada elemen kota yang dituangkan dalam arsitektur ciptaan bangunan kuno melainkan membangkitkan kesadaran untuk menghargai dan mencintai serta melindungi peninggalan bangunan kuno/bersejarah sebagai warisan budaya bangsa.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kondisi pengaturan hukum terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelestarian bangunan kuno tidak berjalan efektif dikarenakan perlindungan terhadap bangunan warisan budaya khususnya bangunan kuno bersejarah belum menjadi kesadaran luas di masyarakat walaupun telah ada perangkat hukumnya. Begitupun dengan prinsip perlindungan dalam perundang-undangan tersebut belum banyak tersosialisasikan di dalam masyarakat karena pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan hukum (*legal awareness*) mengenai perlindungan ciptaan bangunan kuno/ bersejarah sangat minim sekali. Kemudian dari hasil pengetahuan atau pemahaman tentang isi peraturan hukum (*legal acquitance*) mengenai prinsip perlindungan bangunan kuno tersebut, sangat disayangkan bahwa pembentukan Perda hanya terfokus kepada perlindungan bangunan cagar budaya di kawasan Kota Lama Semarang saja, walaupun dari hasil penelaahan antara peraturan yang diterbitkan di tingkat nasional dengan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah memang tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain.

2. Berdasarkan pemahaman tentang isi peraturan hukum (*legal acquittance*) terhadap prinsip perlindungan bangunan kuno bersejarah tersebut maka pada dasarnya suatu konsep alih fungsi terhadap karya ciptaan bangunan kuno bersejarah tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 karena hal tersebut tidak diatur di dalam UUHC. Alih fungsi terhadap bangunan kuno bersejarah tersebut juga tidak melanggar UU terkait lainnya yaitu UU Benda Cagar Budaya sepanjang dilakukan menurut kaidah-kaidah konservasi atau pelestarian karena konservasi bangunan kuno bergantung pada aspek *originalitas* atau keaslian yang harus dipertahankan terhadap bangunan fisiknya.
3. Upaya Pemkot Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap bangunan kuno/bersejarah dilakukan melalui kegiatan Semarang Pesona Asia (SPA), untuk menggugah kesadaran pada masyarakat sehingga dapat menghargai, mencintai dan melindungi peninggalan bangunan kuno/sejarah sebagai warisan budaya bangsa. Pemkot juga berusaha melengkapi perangkat hukum dengan membuat draft kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Semarang agar para pemilik bangunan kuno mau merawat bangunan-bangunan yang menjadi cagar budaya. Di samping mengoptimalkan kinerja instansi terkait yaitu BAPPEDA, DTKP, maupun Disparta, Pemkot juga membentuk lembaga-lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

karya-karya ciptaan bangunan kuno yang bernilai seni arsitektur dan historis tinggi seperti DP2K, HAPBI, BPK2L.

B. SARAN

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran-saran :

1. Sebagai solusi jangka pendek, setiap permasalahan bangunan tua hendaknya diselesaikan dengan pendekatan kasuistik oleh satu tim. Tim atau komisi yang menangani terdiri dari perwakilan pemerintah, asosiasi, dan didominasi oleh personel yang kompeten di bidang konservasi.
2. Pemerintah menyediakan anggaran sebagai kompensasi bagi pemilik bangunan kuno/bersejarah berupa keringanan pajak atau bantuan dana pemeliharaan bangunan, misalnya pemberian insentif berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Pemerintah mengawasi renovasi yang dilakukan para pemilik sehingga tidak mengakibatkan perubahan bentuk bangunan yang dapat menghilangkan sisi keaslian (*originalitas*) .
4. Sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat meliputi pengaturan atau perangkat perundang-undangan yang terkait maupun

perlindungannya untuk membentuk masyarakat yang peduli akan keberadaan bangunan kuno sebagai warisan budaya.

5. Dalam jangka panjang perlu adanya lembaga finansial yang mencari dan mengelola dana serta lembaga sumber daya manusia (SDM) yang menyiapkan tenaga ahli dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman SDM mengenai penanganan terhadap bangunan kuno.
6. Sedangkan secara struktural, diperlukan lembaga pendataan dan lembaga konstruksi atau proyek pembangunan bangunan kuno/bersejarah agar memenuhi prinsip-prinsip konservasi.
7. Melengkapi UUHC 2002 dengan PP mengenai pertimbangan pelaksanaan teknis sebagai aplikasi Pasal 15 huruf f dan Pasal 10 beserta ketentuan pidananya sanksinya sehingga implementasi perlindungan bangunan kuno/bersejarah berjalan efektif.

Melalui perlindungan hak cipta pada seni ciptaan bangunan khususnya bangunan kuno/bersejarah sekaligus sebagai benda cagar budaya diharapkan agar para pemilik bangunan kuno maupun semua pihak lainnya mau melindungi bangunan-bangunan yang menjadi cagar budaya tersebut sehingga mampu dipertahankan demi keutuhan sebagai warisan budaya bangsa. Diharapkan karya ciptaan bangunan kuno/bersejarah tersebut bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi dengan kesadaran dan talenta masing-masing warga masyarakat hendaknya turut menyikapi dan memberikan kontribusi konkret pada aspek perlindungan secara operasional maupun direksional sehingga mampu menjadi sebuah gerakan (*movement*) masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Tanpa Nama, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2003.

Adisumarto, Harsono *Hak Milik Intelektual, khususnya Hak Cipta*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1990.

Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005.

Akihary, Huib, *Architectuur en Stedebouw in Indonesia 1870-1970*, Geenwenburg : Grafitiplan, 1988.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

Bappeda, *Inventarisasi dan Konservasi Bangunan Tua dan Lingkungannya Kotamadya Dati II Semarang*, Semarang : PT Reka Citra, 1987.

Blumensen, J.G. John, *Identifying American Architecture*, New York : W.W. Norton, 1989.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Budihardjo, Eko, *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung : PT. Alumni, 2005.

_____, *Menuju Arsitektur Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 1987.

_____, dalam Satjipto Rahardjo, et.all., *Arsitek dan Arsitektur Indonesia*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 1997.

Ching, Francis D.K, *Arsitektur : Bentuk, Ruang dan Susunannya*, Jakarta : Erlangga, 1985.

Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua-Cetakan Ke-3, Bandung : PT. Alumni, 2005.

De Vries, H.M, *The Importance of Java- Seen from The Air*, Batavia : G. Kolff & Co, 1928.

De Chiara, Joseph dan Koppleman, Lee E, *Standar Perencanaan Tapak*, Jakarta : Erlangga, 1997.

Djumhana, Muhammad, dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.

_____, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Dobby, A. "*Conservation and Planning*", 1978

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*, Diva Publisher, Tanpa Tahun.

Etty Susilowati Suhardo, *Penegakan Hukum Pada Hak Cipta*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun.

Frick, Heinz, *Arsitektur dan lingkungan*, Yogyakarta : Kanisius, 1986.

Frick, Heinz, C.H Koesmartadi, *Ilmu Bahan Bangunan*, Semarang, 1999.

Frick, Heinz, Suskiyatno, Bambang, *Dasar – dasar Eko Arsitektur*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Gautama, Sudargo, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung : Alumni, 1981.

Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan, 1982.

H.K Ishar, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya : Airlangga University Press, 2007

Kesowo Bambang, *Pengantar Umum Mengenai HKI di Indonesia*, Tanpa terbit, tanpa Tahun.

Liem, Thian Joe. *Riwayat Semarang, Dari Djamannja Sampo Sampe Terhaposnja Kongkoan*. Semarang : Boekhandel Ho Kim Yoe. 1931.

Lindsey, Tim, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Bandung : PT Alumni, 2006.

Lippsmeier, George, *Bangunan Tropis*, Jakarta : Erlangga, 1994.

L. J. Taylor, *Copyright for Librarians*, Cetakan Pertama, East Sussex: Tamarisk Books Hastings, 1980.

Maulana, Insan Budi, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta : PT Hecca Mitra Utama, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

—————, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

—————, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Naning, Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1982.

Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Tanpa Tahun.

Parmono Atmadi, Sidharta, Suwondo Bismo Sutedjo, dan Eko Budiardjo, *Perkembangan Arsitektur dan Pendidikan Arsitek di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1997.

Pemerintah Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Senarai Bangunan dan Kawasan Pusaka Budaya Kota Semarang 2006*, Semarang : Sahabat Warisan Budaya, 2007.

Pound, Roscou, (penerjemah Mohamamad Radjab), *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Bharatara Karya Aksara, 1982.

Priyotomo Yosef, *Modernisme dan Arsitektur Indonesia*, Bandung, 1988.

Purba, Acmad Zen Umar *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung : PT. Alumni, 2005.

Rosidi, Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta : Djambatan, 1984.

Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Santoso, Budi *Butir-butir berserakan tentang Hak atas kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, 2005.

_____, *Dekonstruksi Hak Cipta Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia*, Kapita Selekta Hukum, 2007.

Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung : PT. Alumni, 2006.

Syarifin, Pipin & Jubaedah, Dedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sidharta, Eko Budihardjo, *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1998.

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Penerbit Rajawali, 1983.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty 1981.

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2003.

Vollmar, Terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Press, 1983.

Wijanarka, *Semarang Tempo Dulu, Teori Desain Kawasan Bersejarah*, Yogyakarta : Ombak, 2007.

Wijaya, Y.B Mangun, *Fisika Bangunan*, Jakarta, 1988.

Karya dan Artikel Ilmiah :

Agus Sardjono, "Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa". Melalui makalahnya pada seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Rabu 11/7 pukul 17.00 di Ruang Cenderawasih, Balai Sidang Senayan, Jakarta.

Angus J, Macdonald, *Structural Design for Architecture*, Architecture Press, Oxford, 1997.

Bappeda, *Inventarisasi dan Dokumentasi, Detail Old City Semarang*, Rekaman Kawasan dan Bangunan Bersejarah di Kodya Semarang : Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang, 1997.

Bappeda, *Inventarisasi dan Dokumentasi, Detail Old City Semarang*, Rekaman Kawasan dan Bangunan Bersejarah di Kodya Semarang : Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang, 1994-1995.

Bappeda, *Senarai Bangunan dan Kawasan Pusaka Kota Semarang 2006*, Sahabat Warisan Budaya, Semarang, 2007.

Budi Agus Riswandi, *Ratifikasi WIPO Copyright Treaty dan Implementasi Dalam UU Hak Cipta Di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum pada Program Pasca

Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 1 No. 2
Mei 2005

*Buenos Aires, Cayc Fondation, Jorge Glusberg, Vision of the Modern
dalam Journal of Architectural Theory and Critism Volume 1, 1988.*

Danrivanto Budhijanto, "Hak Atas Kekayaan Intelektual" dalam Kuliah
Umum Konsep Teknologi E10T1, Aula Timur ITB, 18 September 2007.

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, *Inventarisasi Data Masalah Urban
Design Kawasan Kota Lama Kodia Semarang-Final Repor,*
Semarang, 1994.

E. Bogaers, "*Ir. Thomas Karsten en de ontwikkeling van de stedebouw in
Nederlands-Indie 1915-1940,* " Skripsi doktoral, Planologisch en
Denografisch Instituut Universiteit van, 1983.

HEN, *Konservasi Bangunan; Rekomendasi Menunggu Dokumenatsi HAPBI,*
Semarang : Kompas, Tanggal 07 November 2007.

H.F.Tilema, "*Van Wonen en Bewonen, van Bouwen, Huis en erf,*"
Semarang, 1913.

H. Westboek, "*De Woningdienst,*" dalam *Gedenbaoek der Gemeente*
Semarang, 1906-1931, Semarang : Nv Dagblad de Locomotief,
1931.

Indra Riawan, dalam Tesis "Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Wilayah DKI
Tinjauan Kritis Atas Kriteria Penilaian Pencagarbudayaan", Program
PascaSarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,
Depok, 2004.

INE, *Cagar Budaya, " Perlindungan Belum Disadari Oleh Banyak Pihak "*,
Semarang : Kompas, Tanggal 28 Januari 2008.

Jurnal Kebudayaan, Postmodernisme Disekitar Kita Volume 1, Jakarta :
Pustaka Utama, 1994.

Kartika, *Bangunan Kuno; Didukung Pembuatan Draft Pengelolaan*, Semarang :
Kompas, Tanggal 17 September 2007. .

Landscape Development, U.S Department of Interior, Field Technical
Office, 1991.

M. Syamsudin, *Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematika perlindungan
Hukumnya*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII No. 16 Vol. 8 – 2001.

Naniek Widayati, *Strategi Pengembangan Warisan Budaya (Sebuah Pandangan
Dari Sisi Arsitektur)*, Makalah dipresentasikan pada Kongres Kebudayaan
Indonesia ke V di BukitTinggi, Tanggal 19-23 Oktober 2003.

Panitia Katalog SMA Sedes Sapientiae Tahun Ajaran 1992-1993, Katalog SMA
Sedes Sapientiae Tahun Ajaran 1992/1993, Semarang.

Paulus Hadisuprpto dalam makalah “Ilmu Hukum dan Pendekatannya” disajikan
dalam Diskusi Panel “ Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum” dalam rangka
Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 17
Januari 2006.

Pemda Semarang, *Semarang Historic And Heritage Building, First Edition*,
1996.

Sekilas Blenduk, Brosur yang dikeluarkan oleh pengelola Gereja Blenduk
Semarang, 2004.

“Semarang”, *Twentieth Century Impressions of Netherlands India*.

Sohirin, *Lawang Sewu, Antara Cerita Kemegahan dan Keseraman*,
Semarang : Tempo, Jumat, 09 Mei 2008.

T. Karsten, "*lets over de Centrale Pasar*," LB.T.-Locale Techniek 7, 1983.

Widya Wijayanti, *Senarai Penganugerahan Penghargaan Pelestarian Pusaka Budaya (bangunan) Kota Semarang*, Oktober 2005.

Peraturan Perundang-undangan :

"The Burra Charter for The Conservation of Place of Cultural Significance",
1981

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya.

SK Wali Kota No. 646/50/Tahun 1992 tentang Konservasi Bangunan-
Bangunan Kuno/Bersejarah di Semarang.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 16 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota
Lama.

Website :

www.adipe.multiply.com

www.archipeddy.com

www.arsitekturindis.com

www.iai.or.id

www.infosemarang.net

www.google.com

www.jawatengah.go.id

www.suaramerdeka.com

www.kompas.com

www.semarang.go.id

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

[http://id.loenpia.net/semua tentang semarang.html](http://id.loenpia.net/semua_tentang_semarang.html)

<http://id.central-java.com/tourism.html>

